



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional tentang Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2025-2029

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 254);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Lemhannas Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Lembaga Ketahanan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 2

Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **10 Oktober 2025**

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL





RENCANA STRATEGIS

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

2025-2029





KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Lemhannas RI 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja di bidang Ketahanan Nasional yang selaras dengan Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2029, dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Dalam RPJMN 2025-2029, Lemhannas RI memiliki peran strategis sebagai Kontributor Asta Cita Prioritas Nasional 1, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Selain itu, Lemhannas RI juga ditetapkan memberi kontribusi pada Program Prioritas 1, yakni penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional.

Sebagai bagian dari kontribusi konkret dalam mendukung pembangunan nasional, Lemhannas RI menjadi pengampu Kegiatan Prioritas 3, yaitu peningkatan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah. Dalam hal ini, Lemhannas RI berperan sebagai *Leading Sector* untuk dua proyek prioritas utama, yaitu: Penyelenggaraan Pendidikan Pengkaderan Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Tingkat Daerah dan Penyelenggaraan *Training of Trainers* Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Renstra Lemhannas RI 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi sebagai pedoman penyusunan perencanaan unit kerja di lingkungan Lemhannas RI. Dokumen ini dirumuskan dengan menggunakan metode *Logical Framework*, *SWOT analysis*, *Scenario Planning*, serta pendekatan *Balanced Scorecard*, yang memungkinkan strategi organisasi diterjemahkan ke dalam kerangka operasional yang terukur hingga level individu.

Melalui Renstra ini, Lemhannas RI berkomitmen untuk meningkatkan perannya dalam memperkokoh ketahanan nasional. Dengan dukungan dan kerja sama solid dari seluruh jajaran, diharapkan organisasi ini mampu menjawab tantangan strategis yang semakin kompleks demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia.

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



TB. ACE HASAN SYADZILY, M.Si



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Renstra 2020-2024	1
1.1.2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan	4
1.1.3. Evaluasi SAKIP dan LAKIP	12
1.1.4. Hasil Aspirasi Masyarakat terkait Kinerja Lemhannas RI	14
1.2. Potensi dan Permasalahan	18
1.2.1. Potensi yang Dimiliki	18
1.2.2. Permasalahan yang Akan Dihadapi	19
1.2.3. Analisis SWOT Jangka Menengah	21
1.2.4. Scenario Planning Lemhannas RI 2029	25
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis	34
2.1. Visi	34
2.2. Misi	35
2.3. Tujuan	37
2.4. Sasaran Strategis	38
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	54
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	54
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Lemhannas RI	64
3.3. Penjabaran Strategi Lemhannas RI	68
3.4. Road Map Strategi Lemhannas RI 2025-2029	74
3.5. Kerangka Regulasi	76
3.6. Kerangka Kelembagaan	82
3.6.1. Struktur Organisasi	82
3.6.2. Rencana Pengembangan Struktur Organisasi	84
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	95
4.1. Target Kinerja	95
4.1.1. Kegiatan dalam Program Pembinaan Ketahanan Nasional	96
4.1.2. Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen	107



4.2. Kerangka Pendanaan	107
BAB V Penutup	110
Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan	
Lampiran 2 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	
Lampiran 3 Matriks Kerangka Regulasi	



DAFTAR TABEL

Tabel 1	<i>Strengths</i>	21
Tabel 2	<i>Weaknesses</i>	22
Tabel 3	<i>Opportunities</i>	24
Tabel 4	<i>Threats</i>	25
Tabel 5	Kwadran I Tannas Tangguh	27
Tabel 6	Kwadran II Tannas Cukup Tangguh	29
Tabel 7	Kwadran III Tannas Kurang Tangguh	31
Tabel 8	Kwadran IV Tannas Rawan	32
Tabel 9	Tujuan dan Indikator Tujuan Lemhannas RI	37
Tabel 10	Sasaran Strategis dan Indikator Lemhannas RI	40
Tabel 11	Sasaran Strategis Pendukung dan Rencana Aksi Lemhannas RI	40
Tabel 12	Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis	42
Tabel 13	Manajemen Risiko Sasaran Strategis-1	42
Tabel 14	Sasaran Strategis 2 dan Indikator Sasaran Strategis	43
Tabel 15	Manajemen Risiko Sasaran Strategis-2	43
Tabel 16	Sasaran Strategis 3 dan Indikator Sasaran Strategis	44
Tabel 17	Manajemen Risiko Sasaran Strategis-3	44
Tabel 18	Sasaran Strategis 4 dan Indikator Sasaran Strategis	45
Tabel 19	Manajemen Risiko Sasaran Strategis-4	46
Tabel 20	Sasaran Strategis 5 dan Indikator Sasaran Strategis	47
Tabel 21	Manajemen Risiko Sasaran Strategis-5	48
Tabel 22	Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Lemhannas RI 2025-2029	67
Tabel 23	Beberapa Regulasi terkait Kelembagaan Lemhannas RI	76
Tabel 24	Sejarah Regulasi Perkembangan Kelembagaan Lemhannas	77
Tabel 25	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Lemhannas RI 2025-2029	95
Tabel 26	Sasaran dan Indikator Program Pembinaan Ketahanan Nasional Lemhannas RI 2025-2029	97
Tabel 27	Peserta Program Pendidikan Kepemimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI 2020-2024	98
Tabel 28	Target Kinerja Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI 2025-2029	99
Tabel 29	Target Kinerja Pengkajian Strategik Lemhannas RI 2025-2029	101
Tabel 30	Target Kinerja Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI 2025-2029	103
Tabel 31	Target Kinerja Pusat Laboratorium Lemhannas RI 2025-2029	105



Tabel 32	Sasaran dan Indikator Program Dukungan Manajemen Lemhannas RI 2025-2029	107
Tabel 33	Target Kinerja Biro Perencanaan Lemhannas RI 2025-2029	108
Tabel 34	Target Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI 2025-2029	109
Tabel 35	Target Kinerja Biro Umum Lemhannas RI 2025-2029	111
Tabel 36	Target Kinerja Biro Telematika Lemhannas RI 2025-2029	111
Tabel 37	Target Kinerja Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI 2025-2029	112
Tabel 38	Target Kinerja Inspektorat Lemhannas RI 2025-2029	113
Tabel 39	Kerangka Pendanaan Lemhannas RI 2025-2029 (dalam ribu rupiah)	114



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Capaian Lemhannas RI tahun 2020-2024	13
Gambar 2	<i>Scenario Planning</i> Lemhannas RI 2029	26
Gambar 3	Klasifikasi Indeks Ketahanan Nasional	37
Gambar 4	Peta Strategi Lemhannas RI	39
Gambar 5	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Lemhannas RI 2025-2029	53
Gambar 6	Keterkaitan RPJMN dengan Renstra Lemhannas RI	55
Gambar 7	Asta Cita dan Prioritas Nasional	55
Gambar 8	Tiga Elemen Trisula	56
Gambar 9	Prioritas Nasional 1	57
Gambar 10	Kedudukan Lemhannas RI dalam Prioritas Nasional 1 RPJMN 2025-2029	58
Gambar 11	Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi	64
Gambar 12	Arah Kebijakan Lemhannas RI 2025-2029	65
Gambar 13	Strategi Lemhannas RI 2025-2029	66
Gambar 14	<i>Road Map</i> Strategi Lemhannas RI 2025-2029	74
Gambar 15	Kerangka Kelembagaan Lemhannas RI 2025-2029	83
Gambar 16	Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Lemhannas RI saat ini	84
Gambar 17	Konsep Revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Lemhannas RI	94
Gambar 18	Perjenjangan Sasaran Strategis pada Prrogram di Lemhannas RI	96



BAB I

PENDAHULUAN





Bab I

Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Renstra 2020-2024

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Lemhannas RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) memiliki fokus bidang utama, yakni menyelenggarakan program pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional, melakukan kajian strategis di bidang ketahanan nasional serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan menyelenggarakan program peningkatan wawasan kebangsaan guna memperkokoh karakter bangsa serta ideologi Pancasila.

Sebagai LPNK, Lemhannas RI menjalankan tugas dan fungsi tersebut di atas berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) yang diterbitkan secara berkala dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) setiap lima tahunan dan hasil evaluasi setiap akhir periode.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Lemhannas RI 2020-2024 menunjukkan pencapaian yang signifikan dalam berbagai aspek, yakni peningkatan kualitas pendidikan kader pimpinan nasional, penguatan kajian strategis, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan pengukuran indeks ketahanan nasional. Capaian tersebut memberikan gambaran bahwa Lemhannas RI telah berhasil memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan. Namun demikian, untuk menghadapi tantangan masa depan, seperti disrupti teknologi dan dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, diperlukan inovasi yang berkelanjutan dalam program dan kegiatan.

Dalam Program Pembinaan Ketahanan Nasional, Lemhannas RI berhasil mewujudkan berbagai inisiatif strategis. Program pendidikan yang relevan, berkualitas, dan praktis menjadi salah satu sorotan utama. Melalui Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), Lemhannas RI mampu mencetak pemimpin yang memahami dinamika nasional dan global serta memiliki kemampuan strategis dalam mengambil keputusan. Proses pendidikan yang mengadopsi pendekatan berbasis studi kasus, simulasi, dan analisis strategis terbukti efektif meningkatkan kompetensi peserta, menjadikan mereka pemimpin yang tangguh di berbagai sektor.

Untuk menjawab tantangan masa depan sebagai *Leading Sector* Peningkatan Kualitas Pemimpin di Tingkat Pusat hingga Daerah, maka Lemhannas akan melakukan reaktualisasi ketahanan nasional dengan mentransformasikan PPRA menjadi Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N), dan mentransformasikan PPSA menjadi Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N).

Selain itu, Lemhannas RI juga menghasilkan kajian strategis yang mendalam, akurat, dan implementatif. Kajian-kajian ini berfokus pada isu-isu strategis seperti ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, konsolidasi demokrasi, Ibu Kota Nusantara, Papua, resiko krisis global dan nasional. Hasil kajian tersebut telah menjadi rujukan penting bagi pembuat kebijakan di berbagai kementerian, lembaga negara, Pemerintah Daerah serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



Program pemantapan nilai-nilai kebangsaan juga menjadi pilar penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Melalui kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, Lemhannas RI berhasil menanamkan nilai-nilai cinta tanah air, memperkuat identitas nasional, dan mendorong penerapan nilai-nilai kebangsaan. Pendekatan inovatif, termasuk pemanfaatan media digital untuk menjangkau generasi muda, telah memperluas dampak program ini.

Dalam Program Dukungan Manajemen, pencapaian Lemhannas RI juga mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pembaruan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan telah meningkatkan efisiensi dan transparansi organisasi Lemhannas RI. Pengelolaan Keuangan yang transparan, akuntabel dan efisien telah dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang berkinerja optimal juga menjadi prioritas utama. Melalui pelatihan, sertifikasi, dan penerapan *Key Performance Indicators* (KPI), Lemhannas RI berhasil menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kompeten. Di sisi lain, Pusat Laboratorium Ketahanan Nasional telah diperkuat dengan teknologi terkini, seperti big data dan kecerdasan buatan (AI), yang memungkinkan pengukuran ketahanan nasional secara komprehensif. Data yang dihasilkan laboratorium ini menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan strategis.

Pengelolaan keuangan yang akuntabel melengkapi capaian Lemhannas RI. Sistem keuangan berbasis teknologi telah meningkatkan akurasi dan efisiensi penggunaan anggaran, sehingga mendukung pelaksanaan program secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian Renstra 2020-2024 menunjukkan keberhasilan Lemhannas RI dalam menjalankan fungsi strategisnya. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi di masa depan, Lemhannas RI perlu terus berinovasi, adaptif terhadap perubahan global, dan memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Di samping itu, Lemhannas RI telah mempersiapkan transformasi menuju Lemhannas 5.0 untuk menghadapi tantangan geopolitik regional dan global pada periode 2025–2045. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan adaptabilitas Lemhannas RI dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah, melalui peningkatan teknologi, inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketahanan nasional yang kuat dan berkelanjutan.

Sebagai hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan, perlindungan terhadap serangan siber menjadi sangat penting karena serangan siber semakin meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu, Lemhannas RI telah mencanangkan reaktualisasi ketahanan nasional dalam konteks era *Geo-cybernetic*. Upaya ini bertujuan untuk memperbarui dan menyesuaikan strategi dan kebijakan ketahanan nasional dengan tantangan dan dinamika yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), perubahan iklim, dan interaksi manusia dengan lingkungan.

Dalam meningkatkan SDM nasional yang berkualitas dan berdaya saing, Lemhannas RI telah menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang komprehensif dan berorientasi pada peningkatan kapasitas kepemimpinan dan kemampuan analisis strategis para peserta. Lemhannas RI juga telah melakukan kerjasama dengan berbagai universitas dan



lembaga penelitian dalam negeri dan internasional untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan *up-to-date*, serta melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program yang dijalankan untuk memastikan output yang dihasilkan mampu bersaing di kancah global.

Dalam hal revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, Lemhannas RI telah meluncurkan berbagai inisiatif dan program yang bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, etika, dan moral di kalangan peserta dan masyarakat luas. Ini termasuk penyelenggaraan seminar, workshop, dan diskusi panel yang melibatkan tokoh-tokoh budaya, akademisi, dan praktisi untuk mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang pentingnya revolusi mental dalam membangun karakter bangsa yang tangguh. Selain itu, Lemhannas RI juga aktif dalam mempromosikan budaya gotong royong dan nasionalisme melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya.

Dalam memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, Lemhannas RI telah mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang berfokus pada peningkatan koordinasi antara lembaga terkait dalam bidang politik, hukum, keamanan, dan ketahanan nasional. Lemhannas RI juga telah melakukan kajian strategis untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat stabilitas nasional. Selain itu, dalam rangka mendukung transformasi pelayanan publik, Lemhannas RI telah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penguatan kapasitas dan kapabilitas, Lemhannas RI telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mendukung ketahanan nasional. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi peserta program Lemhannas RI, pengembangan kurikulum yang relevan dengan dinamika global, serta kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkemuka untuk berbagi pengetahuan dan praktik terbaik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan Lemhannas RI tetap kompeten dan adaptif terhadap perubahan.

Dalam kerjasama internasional, Lemhannas RI telah menjalin berbagai kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga sejenis di berbagai negara. Kerjasama ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam bidang ketahanan nasional dan geopolitik, serta untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi tantangan global. Melalui pertukaran informasi, penelitian bersama, dan program pelatihan, Lemhannas RI berupaya memperkuat jejaring internasional guna mendukung stabilitas dan keamanan global.

Dalam peningkatan kualitas pengkajian dan publikasi, Lemhannas RI telah meningkatkan standar publikasi yang dihasilkan. Upaya ini mencakup penerbitan berbagai kajian strategis yang relevan dengan isu-isu ketahanan nasional dan global. Selain itu, Lemhannas RI juga mengadakan seminar dan konferensi untuk memfasilitasi diskusi ilmiah, serta menjalin kolaborasi dengan akademisi dan peneliti internasional guna memastikan relevansi dan dampak kajian yang dihasilkan.

Dalam pengembangan teknologi dan inovasi, Lemhannas RI telah mengembangkan berbagai teknologi untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga. Upaya ini mencakup penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Lemhannas RI juga mengadopsi sistem digitalisasi dan automasi dalam proses kerja, serta menerapkan teknologi canggih dalam analisis data untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat dan akurat.



Dalam peningkatan kualitas SDM, Lemhannas RI telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan lembaga. Ini mencakup pelatihan intensif dan pengembangan kompetensi bagi pegawai serta peserta program. Selain itu, Lemhannas RI juga mengadakan workshop, seminar, dan kursus lanjutan untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan, memastikan bahwa SDM yang dihasilkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masa depan.

Dalam penyelenggaraan program Pendidikan dan Pelatihan, Lemhannas RI telah melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya ketahanan nasional. Program ini mencakup kursus, seminar, dan workshop yang dirancang untuk membekali peserta dengan wawasan strategis dan keterampilan analitis. Lemhannas RI juga melibatkan pakar dan praktisi dalam berbagai bidang untuk memberikan perspektif mendalam, memastikan peserta siap menghadapi tantangan nasional dan global.

Dalam peningkatan peran dalam kebijakan publik, Lemhannas RI telah berperan aktif dengan memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah terkait isu-isu strategis yang mempengaruhi ketahanan nasional. Lemhannas RI telah menyelenggarakan berbagai forum diskusi dan kajian mendalam untuk menganalisis tantangan dan peluang. Dengan demikian, lembaga ini berkontribusi dalam pembentukan kebijakan yang tepat dan responsif terhadap dinamika nasional dan global.

1.1.2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Program dan Kegiatan

Pengukuran kinerja pencapaian program dan kegiatan bertujuan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan sasaran yang ditetapkan, guna mendukung pencapaian visi dan misi Lemhannas RI. Hasil evaluasi capaian kinerja Renstra 2020-2024 menjadi dasar untuk penilaian dan perbaikan ke depan.

Evaluasi Program Pembinaan Ketahanan Nasional difokuskan pada pendidikan kepemimpinan, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, kajian strategis, dan sistem pengukuran ketahanan nasional untuk memastikan efektivitas serta efisiensi pelaksanaan program. Sementara itu, evaluasi Program Dukungan Manajemen mencakup aspek peningkatan kualitas layanan, pengembangan kerja sama, perencanaan dan organisasi, sistem informatika, administrasi, serta pengawasan.

Melalui evaluasi ini, Lemhannas RI dapat mengidentifikasi tantangan, peluang perbaikan, serta langkah strategis untuk meningkatkan kinerja kelembagaan. Hasil evaluasi juga menjadi bahan rekomendasi kebijakan guna memperkuat implementasi program pada Renstra 2025-2029. Dengan pendekatan berbasis kinerja, Lemhannas RI memastikan bahwa setiap program berjalan efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

1.1.2.1. Program Pembinaan Ketahanan Nasional

Program Pembinaan Ketahanan Nasional di Lemhannas RI selama periode 2020-2024 dirancang untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pendekatan pendidikan, kajian strategis, pengukuran yang akurat, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Program ini terdiri dari empat komponen utama yang saling melengkapi: Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Pengkajian Strategik, dan Pengukuran Indeks Ketahanan



Nasional. Evaluasi terhadap masing-masing komponen ini menunjukkan keberhasilan signifikan, meskipun masih ada ruang untuk pengembangan guna menghadapi dinamika dan tantangan global yang terus berkembang. Berikut ini adalah evaluasi capaian dari setiap komponen.

Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, yang mencakup Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), merupakan salah satu instrumen utama dalam mencetak pemimpin nasional yang memiliki wawasan strategis, pemahaman mendalam terhadap dinamika nasional dan global, serta kemampuan kepemimpinan yang tangguh. Program ini dirancang secara komprehensif dengan pendekatan multidisiplin yang menggabungkan teori, praktik, dan pengalaman langsung guna membekali peserta dengan perspektif luas mengenai tantangan kebangsaan.

Kurikulum dalam program ini dirancang secara sistematis dengan metode pembelajaran berbasis studi kasus, simulasi kebijakan, diskusi strategis, serta kunjungan lapangan ke berbagai wilayah strategis di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman holistik kepada peserta mengenai kondisi bangsa, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Melalui interaksi langsung dengan pemangku kepentingan di daerah, peserta mendapatkan wawasan mendalam tentang realitas kebijakan di lapangan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program menunjukkan bahwa Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional telah berhasil meningkatkan kompetensi peserta, khususnya dalam hal kemampuan analisis strategis, pengambilan keputusan berbasis data, serta kepemimpinan transformatif. Banyak alumni program ini yang kini menduduki posisi strategis di pemerintahan, TNI, Polri, maupun sektor swasta, mencerminkan relevansi serta dampak positif dari program ini terhadap kepemimpinan nasional. Keberhasilan ini juga tercermin dalam meningkatnya indeks kompetensi kepemimpinan nasional serta tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap lulusan program ini.

Namun, seiring dengan tantangan di era digital dan disrupti global, program ini perlu terus berinovasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Integrasi teknologi dalam proses pembelajaran menjadi langkah yang krusial, termasuk penerapan metode pembelajaran daring, serta simulasi berbasis *virtual reality* untuk memperkaya pemahaman peserta dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dalam mencetak pemimpin yang tidak hanya memiliki wawasan luas tetapi juga adaptif terhadap perubahan global yang semakin cepat.

Keberhasilan program ini dapat diukur melalui berbagai indikator utama, di antaranya selektivitas dalam proses penerimaan peserta, analisis dampak dari implementasi kebijakan yang dibuat oleh para alumni, tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lulusan, serta rasio keragaman peserta dalam hal latar belakang institusi, gender, dan wilayah asal. Selain itu, indeks kompetensi kepemimpinan nasional serta hasil *tracer study* terhadap alumni menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberlanjutan dampak program ini terhadap tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan nasional.

Dengan pendekatan yang komprehensif, integral, dan berkarakter kebangsaan, Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional berperan sebagai pilar utama dalam membentuk pemimpin masa



depan yang unggul dalam pemahaman geopolitik serta memiliki kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan demi kepentingan bangsa dan negara.

Pengkajian Strategik

Pengkajian Strategik merupakan salah satu pilar utama Lemhannas RI dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap perumusan kebijakan nasional. Program ini bertujuan untuk menghasilkan kajian yang mendalam, akurat, dan aplikatif guna mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kebijakan di berbagai sektor. Dengan pendekatan berbasis data dan analisis multidisiplin, pengkajian strategik diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang solutif dan relevan dalam memperkuat ketahanan nasional.

Selama periode 2020-2024, Lemhannas RI telah menyelesaikan berbagai kajian strategis yang mencakup isu-isu utama seperti geopolitik, ketahanan energi, ketahanan pangan, transformasi digital, serta pembangunan berkelanjutan. Kajian-kajian ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga dirancang agar dapat diimplementasikan secara langsung dalam kebijakan nasional. Evaluasi menunjukkan bahwa berbagai hasil kajian Lemhannas RI telah dimanfaatkan oleh kementerian, lembaga pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merancang strategi dan kebijakan yang berdampak luas terhadap pembangunan nasional.

Metodologi yang digunakan dalam pengkajian strategik terus berkembang seiring dengan dinamika global dan kebutuhan nasional. Pemanfaatan teknologi dalam analisis data, penggunaan model prediktif, serta pendekatan multidisiplin memungkinkan Lemhannas RI untuk menghasilkan kajian yang lebih komprehensif. Selain itu, kolaborasi dengan universitas, lembaga penelitian, serta mitra internasional turut memberikan perspektif yang lebih luas dan memperkaya hasil kajian. Sinergi ini menjadikan kajian strategik Lemhannas RI sebagai salah satu rujukan akademis dan kebijakan bagi berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri.

Namun, di tengah dinamika global yang semakin cepat, terdapat tantangan yang perlu diantisipasi dalam pengkajian strategik. Salah satunya adalah kebutuhan untuk memperbarui data secara cepat dan memastikan bahwa hasil kajian dapat diakses serta diimplementasikan secara efektif oleh pemangku kepentingan. Selain itu, perubahan geopolitik, kemajuan teknologi, dan kompleksitas isu-isu nasional menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang analitik data dan kebijakan strategis. Oleh karena itu, Lemhannas RI perlu terus memperkuat sistem pengelolaan data, meningkatkan keahlian analitis para peneliti, serta memperluas jaringan kolaborasi internasional guna memperoleh wawasan yang lebih mendalam.

Keberhasilan program pengkajian strategik dapat diukur melalui beberapa indikator utama. Salah satunya adalah sejauh mana rekomendasi hasil kajian telah diimplementasikan dalam kebijakan nasional. Selain itu, meningkatnya minat pemangku kepentingan dalam memanfaatkan hasil kajian Lemhannas RI juga menjadi indikator penting. Tingkat pemanfaatan kajian oleh Presiden dan pemangku kebijakan, serta jumlah sitasi dalam jurnal akademik, turut mencerminkan efektivitas kajian yang telah dilakukan. Indeks jurnal Lemhannas RI yang semakin meningkat juga menunjukkan bahwa hasil kajian strategik memiliki relevansi tinggi dalam dunia akademik dan kebijakan publik.

Dengan pendekatan yang terus diperbarui, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang semakin luas, Lemhannas RI diharapkan dapat terus menghasilkan rekomendasi strategis yang solutif bagi Presiden dan pemangku kepentingan. Melalui



pengkajian strategik yang berkualitas, Indonesia dapat lebih siap menghadapi tantangan global dan mewujudkan ketahanan nasional yang kokoh di masa depan.

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan merupakan salah satu upaya strategis Lemhannas RI dalam memperkuat identitas nasional, menanamkan rasa cinta tanah air, serta mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat. Program ini dirancang sebagai langkah konkret dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika globalisasi, perkembangan teknologi, serta tantangan sosial-politik yang semakin kompleks.

Dalam implementasinya, program ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Lokakarya, diskusi kebangsaan, dan seminar nasional menjadi sarana utama dalam memperkuat pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, Lemhannas RI juga memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan melalui media sosial dan platform digital, termasuk konten edukatif berbasis video, kampanye daring, serta aplikasi berbasis pendidikan.

Sasaran utama program ini mencakup akademisi, tokoh masyarakat, pelajar, serta generasi muda. Pemanfaatan media digital menjadi faktor kunci dalam menarik perhatian generasi milenial dan Gen Z, yang kelak akan menjadi pemimpin dan penggerak bangsa. Pendekatan inovatif ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kebangsaan serta memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya, agama, dan pandangan politik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini telah berhasil menjangkau audiens yang lebih luas melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif. Keberhasilan ini tercermin dalam beberapa indikator utama, antara lain meningkatnya indeks Wawasan Kebangsaan, Indeks Ketahanan Nasional, serta tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan kebijakan yang berorientasi pada penguatan karakter kebangsaan. Selain itu, pengembangan Algoritma Kebangsaan di media sosial telah membantu mendeteksi serta mengatasi konten yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi polarisasi sosial yang semakin tajam akibat maraknya disinformasi dan hoaks di ruang digital. Untuk itu, Lemhannas RI perlu memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, komunitas lokal, serta *influencer* yang memiliki pengaruh besar di kalangan generasi muda. Literasi digital harus menjadi bagian integral dari program ini agar masyarakat tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyaring informasi secara kritis.

Keberlanjutan program ini menjadi kunci bagi terwujudnya ketahanan nasional yang kokoh di masa depan. Dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman, diharapkan seluruh komponen bangsa dapat berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bukan sekadar agenda jangka pendek, melainkan sebuah investasi strategis bagi keberlanjutan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi.



Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional

Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional merupakan instrumen strategis yang dikembangkan oleh Lemhannas RI untuk menilai kondisi ketahanan nasional secara objektif, terukur, dan komprehensif. Indeks ini mencakup berbagai dimensi utama, seperti ketahanan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang dikaji menggunakan metodologi berbasis data terintegrasi. Dengan pendekatan berbasis teknologi modern, pengukuran ini tidak hanya menjadi refleksi kondisi aktual ketahanan nasional, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan daya tahan dan ketangguhan bangsa di berbagai sektor.

Selama periode 2020-2024, Lemhannas RI berhasil meningkatkan akurasi dan validitas pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dengan memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi memungkinkan analisis data yang lebih cepat, luas, dan mendalam, sehingga pengukuran yang dilakukan semakin presisi dan berbasis pada kondisi faktual di lapangan. Salah satu capaian signifikan adalah kemampuannya dalam memetakan potensi kerawanan di berbagai daerah, memungkinkan pengambilan langkah mitigasi yang lebih dini dan berbasis bukti.

Indeks ini tidak hanya bersifat evaluatif, tetapi juga menjadi alat peringatan dini bagi pemerintah dalam mendeteksi potensi ancaman terhadap stabilitas nasional. Data yang dihasilkan telah digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk kementerian dan lembaga negara, untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan nasional maupun global. Dengan indikator yang semakin akurat, indeks ini menjadi referensi penting dalam perencanaan strategis pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Namun, tantangan utama dalam pengukuran Indeks Ketahanan Nasional adalah ketersediaan dan integrasi data yang bersumber dari berbagai institusi. Mengingat dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terus berubah, Lemhannas RI perlu memastikan bahwa data yang digunakan selalu mutakhir, valid, dan relevan dengan konteks yang sedang berkembang. Oleh karena itu, penguatan sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga penelitian, serta pemerintah daerah menjadi krusial dalam menjaga kualitas dan kredibilitas indeks ini.

Ke depan, Lemhannas RI perlu mengembangkan sistem pengukuran yang lebih interaktif dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Digitalisasi platform pengukuran akan memungkinkan para pengambil kebijakan untuk mengakses data secara real-time dan menggunakan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Selain itu, pengembangan model prediksi berbasis kecerdasan buatan dapat membantu dalam mengantisipasi potensi ancaman dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih strategis.

Keberhasilan pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dapat dilihat dari dua indikator utama, yaitu makin akuratnya hasil pengukuran indeks serta semakin luasnya penggunaan indeks ini oleh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan ketahanan nasional. Dengan penguatan kapasitas teknologi, peningkatan sinergi antar-lembaga, serta pemanfaatan data yang lebih canggih, Indeks Ketahanan Nasional diharapkan terus berkembang sebagai fondasi strategis dalam memperkuat ketahanan bangsa.

Secara keseluruhan, Program Pembinaan Ketahanan Nasional di Lemhannas RI selama periode 2020-2024 telah mencatatkan capaian yang membanggakan. Pendidikan kepemimpinan berhasil mencetak pemimpin dengan kompetensi strategis yang tinggi.



Pemantapan nilai-nilai kebangsaan memperkuat persatuan dan kesadaran nasional di tengah masyarakat. Kajian strategis memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan nasional, dan pengukuran indeks ketahanan nasional menjadi landasan penting dalam menilai kondisi bangsa.

Namun, dinamika global yang semakin kompleks, disertai perkembangan teknologi yang pesat, menuntut Lemhannas RI untuk terus berinovasi. Beberapa rekomendasi yang dapat menjadi pertimbangan ke depan meliputi:

1. Peningkatan kualitas sistem dan proses pendidikan melalui pembaruan kurikulum berbasis kebutuhan strategis, digitalisasi sistem pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran interaktif, peningkatan kualitas pengajar, serta modernisasi sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung.
2. Perluasan aksesibilitas dan ragam kajian strategis, mencakup eksplorasi topik baru seperti *Geo-cybernetics*, *Resilience Development Goals* (RDGs), perluasan target pengguna, penerapan *foresight* dan *scenario planning*, serta penguatan mitigasi risiko strategis.
3. Peningkatan cakupan, kualitas, dan kuantitas pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dengan sertifikasi pengajar, pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), penyelarasan dengan KKNI, standarisasi profesi, penguatan kode etik dan disiplin, serta inovasi dalam program, kurikulum, dan metode pelatihan.
4. Peningkatan kualitas dan perluasan pemanfaatan hasil pengukuran indeks ketahanan nasional untuk menjawab tantangan geopolitik yang semakin kompleks, melalui peningkatan kualitas data, peningkatan frekuensi pengukuran, modernisasi algoritma dengan teknologi kecerdasan buatan (AI), dan penyajian analisis yang lebih relevan.
5. Peningkatan kualitas dan peran laboratorium kepemimpinan nasional, dengan menerapkan standarisasi kompetensi kepemimpinan nasional, membangun dan mengelola *talent pool* kepemimpinan yang unggul, serta menciptakan model kepemimpinan yang adaptif dan visioner untuk menjawab tantangan era global.

1.1.2.2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen Lemhannas RI merupakan fondasi utama dalam memastikan kelancaran seluruh kegiatan lembaga serta mendukung pencapaian visi dan misi Lemhannas RI sebagai pusat unggulan dalam bidang ketahanan nasional. Sepanjang periode 2020-2024, program ini telah mengalami berbagai kemajuan yang signifikan dalam aspek perencanaan, administrasi umum, hubungan masyarakat, kerja sama, serta telematika. Evaluasi terhadap capaian program ini menunjukkan keberhasilan yang perlu dipertahankan, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang harus diatasi guna menjawab dinamika nasional dan global di masa depan.

Aspek perencanaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja Lemhannas RI. Selama lima tahun terakhir, kualitas dan ketepatan waktu dalam penyusunan rencana strategis dan operasional telah meningkat secara signifikan. Pendekatan berbasis partisipatif yang melibatkan seluruh unit kerja memungkinkan penyusunan rencana kerja tahunan dan strategis yang lebih realistik, adaptif, dan terukur. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi manajemen telah memungkinkan pemantauan pencapaian program secara *real-time*, sehingga potensi hambatan dapat diidentifikasi dan diatasi lebih dini.



Salah satu inovasi penting yang diterapkan adalah pendekatan berbasis data dalam proses perencanaan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, perencanaan strategis dapat disesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dan dinamika global, sehingga setiap kebijakan yang diambil berbasis pada informasi yang akurat dan relevan. Evaluasi rutin terhadap implementasi program juga dilakukan untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun tetap kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dalam bidang administrasi umum, reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan efisiensi tata kelola kelembagaan. Langkah-langkah yang telah diambil mencakup penerapan sistem SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) guna mendukung digitalisasi layanan administrasi, peningkatan indeks Reformasi Birokrasi, serta penguatan sistem pengawasan internal melalui implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Upaya ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional, sesuai dengan standar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Meskipun telah banyak capaian positif, evaluasi juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih perlu diatasi, salah satunya adalah integrasi yang lebih baik antara rencana strategis dengan implementasi program operasional di lapangan. Oleh karena itu, ke depan, Lemhannas RI perlu memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang perencanaan strategis, terutama dalam pemanfaatan teknologi big data dan analitik prediktif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Keberhasilan Program Dukungan Manajemen Lemhannas RI dapat diukur melalui berbagai indikator kinerja utama, antara lain Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Hukum, Opini LHP BPK RI, Indeks Integritas Nasional KPK, Indeks Statistik Nasional BPS, Indeks HAM (kesetaraan gender dan aksesibilitas difabel), serta Indeks Profesionalitas ASN BKN. Dengan peningkatan indeks-indeks ini, Lemhannas RI semakin memperkuat posisinya sebagai lembaga strategis yang adaptif dan inovatif dalam menjawab tantangan ketahanan nasional.

Ke depan, Lemhannas RI perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan kapasitas SDM, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa Program Dukungan Manajemen tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi ketahanan nasional secara luas.

Administrasi umum merupakan tulang punggung dalam pengelolaan organisasi. Selama periode 2020-2024, Lemhannas RI telah mencatatkan berbagai kemajuan dalam aspek ini, terutama dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penerapan sistem berbasis teknologi informasi, seperti e-office dan e-budgeting, membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan transparansi.

Di bidang pengelolaan keuangan, Lemhannas RI secara konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan aset negara juga mengalami perbaikan, dengan dilakukan inventarisasi dan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan optimalisasi penggunaan aset.



Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal koordinasi lintas unit kerja untuk menghindari duplikasi proses administrasi. Pengembangan sistem administrasi yang lebih terintegrasi dan berbasis *cloud* dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi lebih lanjut.

Hubungan masyarakat (humas) merupakan salah satu elemen penting dalam memperkuat citra Lemhannas RI sebagai lembaga yang kredibel dan terpercaya dalam bidang ketahanan nasional. Selama periode 2020-2024, Lemhannas RI berhasil meningkatkan intensitas dan kualitas komunikasi publiknya melalui berbagai saluran media, baik konvensional maupun digital.

Lemhannas RI aktif menggelar konferensi pers, seminar nasional, serta diskusi publik yang melibatkan tokoh-tokoh penting dari berbagai sektor. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga menjadi salah satu strategi utama dalam menjangkau audiens yang lebih luas, terutama generasi muda. Akun media sosial resmi Lemhannas RI menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pengikut dan interaksi, mencerminkan keberhasilan dalam membangun komunikasi dua arah yang efektif.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menghadapi arus informasi yang sangat cepat di era digital. Lemhannas RI perlu memperkuat kemampuan tim humasnya dalam merespons isu-isu yang muncul di media secara cepat dan tepat, sekaligus meningkatkan kolaborasi dengan media massa untuk memastikan penyebaran informasi yang akurat dan relevan.

Aspek kerja sama menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung keberhasilan program Lemhannas RI. Selama periode 2020-2024, Lemhannas RI berhasil menjalin dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kerja sama ini mencakup berbagai bidang, seperti pendidikan, kajian strategis, dan pengembangan kapasitas.

Di tingkat nasional, Lemhannas RI aktif bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, universitas, dan organisasi masyarakat. Kemitraan ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, pemanfaatan sumber daya bersama, serta peningkatan sinergi dalam menangani isu-isu strategis. Sementara itu, di tingkat internasional, Lemhannas RI menjalin kerja sama dengan lembaga sejenis di negara lain, yang memberikan peluang untuk belajar dari praktik terbaik global dan memperkuat diplomasi ketahanan nasional.

Evaluasi menunjukkan bahwa kerja sama ini telah memberikan manfaat nyata, seperti tersedianya sumber daya tambahan untuk mendukung program, serta meningkatnya reputasi Lemhannas RI di tingkat internasional. Namun, untuk ke depan, Lemhannas RI perlu mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi kerja sama yang lebih terstruktur untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari setiap kemitraan yang dibangun.

Dalam era digital yang serba cepat, aspek telematika memainkan peran strategis dalam mendukung efisiensi dan inovasi di Lemhannas RI. Selama periode 2020-2024, Lemhannas RI telah melakukan berbagai inisiatif transformasi digital untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet yang lebih andal, server yang aman, dan perangkat lunak manajemen, menjadi dasar penting dalam mendukung operasional lembaga.

Salah satu pencapaian utama adalah implementasi sistem informasi berbasis daring yang terintegrasi untuk pengelolaan data dan dokumen. Sistem ini memungkinkan akses data yang



lebih cepat dan transparan, serta meminimalkan risiko kehilangan data. Selain itu, Lemhannas RI juga mulai memanfaatkan teknologi analitik data untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Namun, tantangan di bidang telematika masih ada, terutama dalam hal keamanan data dan peningkatan kapasitas SDM untuk mengelola teknologi baru. Dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, Lemhannas RI perlu memperkuat sistem keamanan informasi dan menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi staf di bidang teknologi informasi.

Secara keseluruhan, Program Dukungan Manajemen di Lemhannas RI selama periode 2020-2024 telah mencatatkan capaian yang signifikan. Perencanaan yang berbasis data, administrasi yang efisien dan akuntabel, hubungan masyarakat yang aktif, kerja sama yang produktif, serta transformasi digital melalui telematika, semuanya berkontribusi pada pencapaian visi Lemhannas RI sebagai pusat layanan unggulan dalam bidang ketahanan nasional.

Namun, untuk menjawab tantangan masa depan, Lemhannas RI perlu terus berinovasi dan meningkatkan kapasitas dalam setiap aspek. Beberapa rekomendasi untuk pengembangan ke depan meliputi:

1. Penguatan sistem manajemen berbasis organisasi tumbuh dan belajar dengan membangun mekanisme evaluasi yang dinamis, pengelolaan risiko yang adaptif, dan implementasi sistem pengetahuan berbasis data.
2. Penguatan budaya organisasi melalui peningkatan kolaborasi lintas sektor, penerapan prinsip keterbukaan, peningkatan agilitas organisasi, serta optimalisasi pemanfaatan SDM dari berbagai latar belakang dan keahlian.
3. Penguatan kualitas dan integritas SDM melalui pelatihan berkelanjutan di bidang teknologi informasi, perencanaan strategis, analisis kebijakan, dan manajemen kerja sama guna memastikan kesiapan menghadapi era digital.
4. Perluasan jejaring kerja Lemhannas RI, baik di tingkat nasional maupun internasional, dengan memperkuat kemitraan strategis, forum diskusi global, serta kolaborasi riset bersama lembaga dan universitas.
5. Adaptasi teknologi digital di era siber melalui pemanfaatan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, *big data*, dan platform kolaborasi digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.
6. Penguatan strategi branding, dengan menekankan ketahanan nasional berbasis dinamika geopolitik global, memperkuat narasi kepemimpinan, dan mengedepankan posisi Lemhannas RI sebagai pusat unggulan dalam membangun pemimpin bangsa.

Dengan langkah-langkah tersebut, Lemhannas RI diharapkan dapat terus memberikan kontribusi terbaiknya bagi penguatan ketahanan nasional dan pembangunan bangsa.

1.1.3. Evaluasi SAKIP dan LAKIP

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa Lemhannas RI berhasil meraih nilai kategori B (Baik). Pencapaian ini mencerminkan peningkatan dalam akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan program untuk mendukung visi Lemhannas RI dalam mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.



Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2020-2024 menunjukkan bahwa Lemhannas RI mencapai kinerja yang sangat baik dengan satu sasaran strategis utama, yaitu *"mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh di pusat dan daerah."*

Kinerja Lemhannas RI selama tahun 2020-2024 diukur melalui lima indikator utama, yang semuanya berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Performa Kader dan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI mencatat realisasi skor sebesar 9,4 dari target 8,4, mencapai 111,9% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan Lemhannas RI dalam melaksanakan program pendidikan kepemimpinan tingkat nasional yang menghasilkan kader-kader unggul. Program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami isu-isu strategis nasional dan global tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam mengambil keputusan yang mendukung kepentingan nasional.

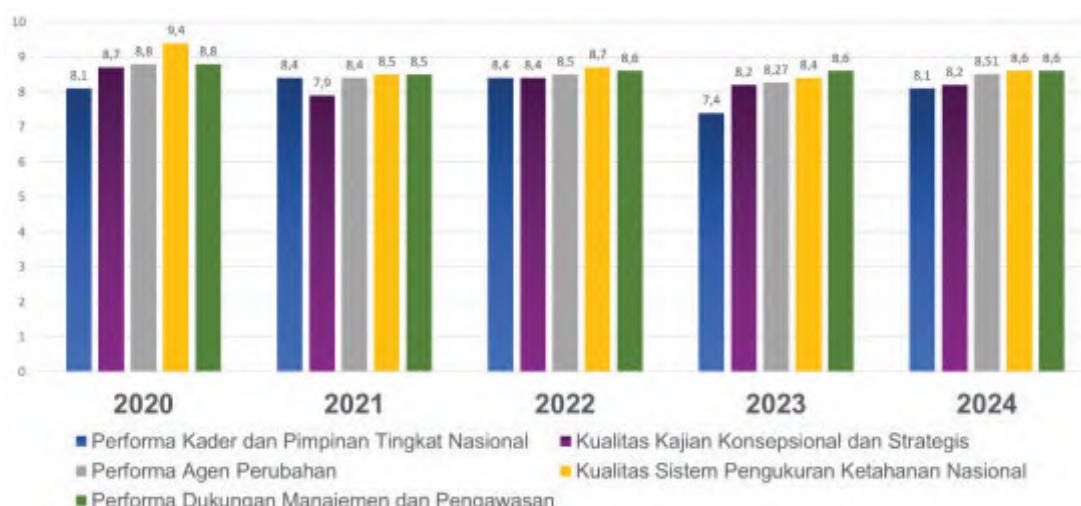
Indikator Kualitas Kajian Strategis mencatat realisasi skor sebesar 8,5 dari target 8,4, atau 101,1% dari target. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan kualitas kajian strategis yang dihasilkan oleh Lemhannas RI. Kajian-kajian ini tidak hanya relevan dengan dinamika nasional dan internasional, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif kepada para pengambil keputusan. Hal ini menjadi salah satu kekuatan Lemhannas RI dalam berkontribusi terhadap penyelesaian berbagai isu strategis di Indonesia.

Realisasi skor Performa Agen Perubahan sebesar 8,7 dari target 8,4, mencapai 103,5%. Ini menunjukkan keberhasilan Lemhannas RI dalam mencetak agen-agen perubahan yang mampu mempraktikkan nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan nasional di lingkungan masing-masing. Para agen perubahan ini berperan penting dalam memperkuat kohesi sosial, mendorong semangat kebangsaan, dan menghadapi tantangan perubahan yang semakin kompleks.

Kualitas Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional Lemhannas RI mencapai skor 8,4, yang merupakan 100% dari target yang ditetapkan. Sistem pengukuran ketahanan nasional yang dikembangkan oleh Lemhannas RI telah terbukti menjadi alat yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi kondisi ketahanan nasional di tingkat pusat maupun daerah. Dengan pendekatan yang berbasis data dan metodologi yang komprehensif, sistem ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kekuatan dan kelemahan ketahanan nasional.

Gambar 1

Capaian Lemhannas RI tahun 2020-2024





Indikator Dukungan Manajemen dan Pengawasan mencatat realisasi skor sebesar 8,6 dari target 8,4, atau 102,3%. Capaian ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam aspek manajemen dan pengawasan, termasuk pengelolaan anggaran, administrasi, dan koordinasi lintas unit kerja. Dukungan manajemen yang solid memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di Lemhannas RI.

Secara keseluruhan, evaluasi kinerja Lemhannas RI tahun 2020-2024 melalui SAKIP dan LAKIP menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam mencapai tujuan strategisnya. Dengan pencapaian di atas target pada hampir semua indikator kinerja utama, Lemhannas RI berhasil menunjukkan komitmennya dalam mendukung ketahanan nasional yang tangguh. Namun, untuk terus meningkatkan kualitas dan relevansi program, Lemhannas RI perlu mempertahankan momentum positif ini, meningkatkan inovasi dalam setiap program, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi menjawab tantangan masa depan.

1.1.4. Hasil Aspirasi Masyarakat terkait Kinerja Lemhannas RI

Hasil aspirasi masyarakat terhadap kinerja Lemhannas RI menunjukkan betapa besar harapan dan ekspektasi yang diberikan kepada lembaga ini sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga ketahanan nasional. Masyarakat memandang Lemhannas RI sebagai lembaga yang memiliki peran strategis untuk memastikan tercapainya ketahanan nasional yang kokoh di tengah tantangan global dan dinamika nasional yang semakin kompleks.

Masyarakat berharap bahwa ke depan, Lemhannas RI dapat lebih meningkatkan perannya dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan kepemimpinan, kajian strategis, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan pengukuran ketahanan nasional. Harapan ini mencerminkan kebutuhan akan lembaga yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai permasalahan bangsa, baik yang bersifat strategis maupun yang langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, Lemhannas RI dinilai sebagai lembaga pemerintah yang memiliki posisi unik untuk menjadi penghubung sekaligus katalisator dalam mengkomunikasikan dan mengkaji isu-isu strategis.

Kepercayaan masyarakat terhadap Lemhannas RI juga menjadi modal penting bagi lembaga ini untuk terus berperan dalam menjaga stabilitas nasional. Masyarakat melihat Lemhannas RI sebagai lembaga yang tidak hanya mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang obyektif kepada pemerintah, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan yang saat ini cenderung mengalami penurunan. Dalam era modernisasi dan globalisasi, tantangan terhadap identitas nasional semakin nyata. Oleh karena itu, masyarakat berharap Lemhannas RI dapat menjadi benteng yang menjaga sekaligus menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan (*national values*) di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan hingga sektor publik.

Selain itu, masyarakat juga menginginkan agar Lemhannas RI terus melakukan koreksi dan perbaikan di semua bidang tugasnya. Hal ini penting agar lembaga ini dapat terus relevan dengan perubahan zaman dan mampu menjawab tantangan masa depan. Dari pendidikan kepemimpinan hingga pengukuran ketahanan nasional, masyarakat menginginkan inovasi yang tidak hanya meningkatkan kualitas program tetapi juga memperkuat dampaknya terhadap ketahanan nasional. Dalam hal ini, Lemhannas RI diharapkan mampu mengembangkan metodologi dan pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi baik di tingkat nasional maupun internasional.



Aspirasi masyarakat ini menjadi bukti bahwa Lemhannas RI tidak hanya dilihat sebagai lembaga pemerintahan biasa, tetapi sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga eksistensi dan keberlanjutan bangsa. Harapan ini juga memberikan tantangan bagi Lemhannas RI untuk terus bertransformasi dan meningkatkan kinerjanya agar dapat memenuhi ekspektasi masyarakat. Dengan terus mengedepankan profesionalisme, integritas, dan inovasi, Lemhannas RI memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga yang tidak hanya relevan tetapi juga menjadi inspirasi bagi upaya kolektif dalam menjaga ketahanan nasional.

Aspirasi masyarakat ini seharusnya menjadi refleksi sekaligus motivasi bagi Lemhannas RI untuk terus berbenah dan memperkokoh perannya dalam membangun bangsa yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing tinggi di tengah persaingan global. Dalam hal peningkatan kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional, Lemhannas RI perlu memperluas jaringan diplomasi dengan lembaga-lembaga sejenis dan mitra internasional. Hal ini mencakup penyelenggaraan forum internasional, partisipasi aktif dalam dialog multilateral, dan promosi kebijakan strategis yang memperkuat posisi Indonesia dalam isu-isu global. Dengan demikian, Lemhannas RI dapat mengamplifikasi peran dan pengaruhnya dalam arena internasional serta mendukung diplomasi nasional untuk mencapai tujuan keamanan nasional yang lebih luas.

Dalam hal memperkuat supremasi hukum, stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan yang mampu meneguhkan posisi Indonesia dalam diplomasi kawasan, Lemhannas RI mengimplementasikan strategi penguatan kapasitas. Ini mencakup pengembangan kebijakan hukum yang progresif, pelatihan dalam pertahanan nasional yang terintegrasi, dan diplomasi proaktif. Melalui kolaborasi dengan lembaga terkait dan kerjasama internasional, Lemhannas RI berupaya menjaga kedaulatan negara serta mendorong stabilitas regional yang kokoh, mencerminkan komitmen terhadap keamanan nasional dan perdamaian global.

Dalam memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai fondasi utama pembangunan, Lemhannas RI aktif dalam pendidikan kader-kader pemimpin bangsa, pengkajian strategis, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Melalui pendekatan ini, Lemhannas RI berperan dalam membentuk kepemimpinan yang berkualitas, menganalisis dinamika sosial budaya serta ekologi, dan memperkuat kesadaran akan nilai-nilai kebangsaan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menopang pembangunan berkelanjutan yang melindungi warisan budaya dan lingkungan serta memajukan kesejahteraan nasional.

Dalam hal transparansi dan akuntabilitas, Lemhannas RI perlu meningkatkan transparansi dengan lebih aktif menyampaikan hasil pengkajian dan rekomendasi kebijakan kepada publik. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan publikasi laporan dan hasil pengkajian secara teratur di situs web resmi dan melalui platform media sosial. Langkah ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas informasi bagi publik tetapi juga memperkuat kepercayaan dan keterbukaan Lemhannas RI dalam menjalankan perannya dalam pembentukan kebijakan nasional.

Dalam hal efektivitas program pendidikan dan pelatihan, program pendidikan Lemhannas RI perlu diperbarui agar lebih relevan dengan tantangan ketahanan nasional, regional, dan global saat ini. Untuk itu, Lemhannas RI perlu melakukan review berkala terhadap kurikulum yang ada dan mengadopsi perubahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa peserta didiknya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan isu-isu terkini yang mempengaruhi keamanan nasional dan stabilitas regional.

Dalam rangka reaktualisasi ketahanan nasional, terdapat empat aspek strategis yang perlu dipertimbangkan. Pertama, dalam era *Geo-cybernetic*, ancaman siber merupakan salah satu



ancaman yang paling merusak dan meresahkan. Serangan siber dapat meliputi serangan terhadap infrastruktur penting, pencurian data sensitif, dan propaganda online yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, strategi ketahanan nasional harus memperkuat pertahanan siber serta kemampuan untuk mendeteksi, merespons, dan memulihkan diri dari serangan siber. Dalam proses reaktualisasi ini, penguatan kelembagaan menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian khusus.

Kedua, perubahan iklim dan dampak lingkungan lainnya dapat menyebabkan bencana alam yang merusak dan mengancam keamanan nasional. Reaktualisasi ketahanan nasional harus mencakup pemantauan lingkungan yang lebih baik, pemodelan bencana, serta upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana alam dan dampaknya terhadap masyarakat.

Ketiga, dalam era *Geo-cybernetic*, sumber daya alam menjadi semakin penting karena permintaan global yang terus meningkat. Strategi ketahanan nasional harus mempertimbangkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam, perlindungan terhadap eksploitasi yang berlebihan, serta diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya tertentu.

Keempat, dalam konteks *Geo-cybernetic*, informasi memiliki peran kunci dalam pengambilan keputusan strategis dan manajemen krisis. Oleh karena itu, keamanan dan kedaulatan informasi menjadi aspek penting dari ketahanan nasional. Ini melibatkan upaya untuk melindungi data sensitif, memperkuat infrastruktur komunikasi, dan membangun kapasitas untuk analisis informasi yang akurat dan cepat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Untuk mewujudkan empat fokus di atas, terdapat tiga hal strategis yang perlu dijadikan landasan penguatan Lemhannas RI sebagai wahana pendidikan dan pengembangan ketahanan nasional.

Pertama, Penguatan Atmosfer Akademik pada Pelaksanaan Program Pendidikan, Pengkajian, dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan:

1. Membangun Lemhannas RI sebagai wahana tempat belajar mengajar dan berbagi ilmu pengetahuan (*Universitas Magistrorum et Scholarium*).
2. Menjadikan Lemhannas RI sebagai Ibu Pengasuh Studi (*Alma Mater Studiorum*) melalui penyempurnaan proses belajar mengajar yang terus menerus dan penguatan pola berpikir kritis (*critical thinking*).
3. Mengembangkan Lemhannas RI sebagai institusi pendidikan yang mengacu pada prinsip kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan (*Magna Charta Universitatum*) melalui proses belajar yang dititikberatkan pada diskusi kelompok untuk mengasah kemampuan mengembangkan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Membangun Lemhannas RI sebagai lembaga kajian strategis yang mampu menerjemahkan berbagai masalah strategis normatif menjadi strategi praktis yang implementatif.
5. Menciptakan Lemhannas RI sebagai kawah candradimuka bagi para peserta didik sebagai calon pemimpin nasional yang berkarakter kebangsaan (*Learning and Humble Society*) melalui penguatan kemampuan para peserta didik untuk menjadi pemimpin global namun tetap berbasis pada karakter nasional.



Kedua, Penguatan *Network* dengan terus mengembangkan jejaring kerja serta menjalin kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun global, termasuk partai politik.

Ketiga, *Branding Development* yang dapat diwujudkan melalui penyampaian gagasan yang sering bersifat *out of the box*, walaupun kadang mengundang perdebatan karena berbeda dengan kebiasaan, pelaksanaan berbagai seminar internasional, serta menjadikan *Jakarta Geopolitical Forum* (JGF) sebagai ikon Lemhannas RI.

Dalam hal kolaborasi dan sinergi antar lembaga, Lemhannas RI masih perlu meningkatkan kerja sama dalam merumuskan kebijakan strategis dengan lembaga lain. Langkah ini mencakup inisiatif untuk lebih aktif berkolaborasi dengan lembaga pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Melalui kerja sama ini, Lemhannas RI dapat memperluas pandangan strategisnya, memanfaatkan keahlian yang beragam, dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih holistik dan responsif terhadap dinamika kompleks dalam bidang keamanan nasional dan geopolitik.

Dalam hal inovasi dan adaptasi teknologi, Lemhannas RI belum sepenuhnya memanfaatkan potensi teknologi digital untuk analisis strategis. Untuk itu, Lemhannas RI perlu mengambil langkah-langkah untuk mengadopsi teknologi analitik dan *big data* guna memperkuat kapabilitas pengkajian dan pengambilan keputusan. Dengan memanfaatkan teknologi ini secara optimal, Lemhannas RI dapat meningkatkan ketepatan analisisnya, mengidentifikasi tren yang relevan, dan merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mendukung kebijakan keamanan nasional dan respons terhadap dinamika geopolitik yang cepat berubah.

Dalam upaya peningkatan kualitas pengkajian dan analisis, hasil pengkajian Lemhannas RI perlu lebih aplikatif dan berdampak langsung pada kebijakan publik. Saat ini, fokus perlu diperkuat pada isu-isu yang memiliki relevansi langsung terhadap kebijakan, agar hasil pengkajian lebih mudah diimplementasikan dan memberikan kontribusi yang nyata dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Dengan demikian, Lemhannas RI dapat memastikan bahwa setiap riset yang dilakukan memberikan nilai tambah signifikan bagi pembuatan kebijakan dan masyarakat secara umum.

Dalam hal pelayanan publik dan sosialisasi, Lemhannas RI perlu lebih aktif dalam menyosialisasikan peran dan fungsinya kepada masyarakat. Langkah ini dapat dilakukan melalui peningkatan kegiatan sosialisasi, seminar, dan diskusi publik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Dengan lebih terlibat secara langsung, Lemhannas RI dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran strategisnya dalam menjaga keamanan nasional dan stabilitas regional, serta menggalang dukungan luas untuk tujuan-tujuan yang diemban oleh lembaga ini.

Dalam pengembangan SDM, Lemhannas RI perlu meningkatkan pelatihan bagi pegawai untuk memperbaiki kompetensi mereka. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala harus disediakan agar pegawai dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang ketahanan nasional dan geopolitik. Dengan demikian, Lemhannas RI dapat memastikan bahwa timnya tetap relevan dan efektif dalam menanggapi tantangan yang kompleks di masa depan serta mengoptimalkan kontribusi mereka terhadap keamanan dan stabilitas nasional.

Dalam hal pemanfaatan output Lemhannas RI dalam kepemimpinan nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1964 tentang Pembentukan Lemhannas RI, khususnya Pasal 3, menyatakan bahwa lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mencapai dan merealisasikan integrasi serta kerja sama yang sebulat-bulatnya dalam pembinaan



segenap unsur kekuatan dan potensi nasional dalam rangka penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional. Selanjutnya, Pasal 4 menyatakan bahwa berdasarkan tujuan tersebut, Lemhannas RI mendapat tugas pokok untuk mempersiapkan tenaga-tenaga senior terpilih, baik militer maupun sipil, agar mampu menyelenggarakan pembinaan pertahanan dan keamanan secara terkoordinasi pada tingkat kebijaksanaan atas.

Kedua pasal tersebut mengandung maksud bahwa pembentukan Lemhannas RI adalah sebagai lembaga pendidikan tertinggi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri, yang berperan penting dalam pengembangan karier mereka. Lemhannas RI berfungsi sebagai pusat pengembangan kapasitas dan kompetensi nasionalisme, kepemimpinan, serta strategi pertahanan dan keamanan yang krusial bagi ketahanan dan kemajuan negara.

Dalam hal evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, Lemhannas RI perlu meningkatkan frekuensi evaluasi terhadap program-program yang dijalankan. Langkah ini mencakup evaluasi berkala dan penerapan umpan balik dari masyarakat untuk memastikan program-program yang ada dapat ditingkatkan secara efektif. Dengan memperkuat mekanisme evaluasi ini, Lemhannas RI dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat, serta terus meningkatkan kualitas layanan dan kontribusinya dalam mendukung keamanan nasional dan ketahanan regional.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi yang Dimiliki

Lemhannas RI, sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, memiliki sejumlah potensi yang sangat signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu potensi utama yang dimiliki Lemhannas RI adalah posisi strategisnya dalam pemerintahan. Posisi ini memungkinkan Lemhannas RI untuk memiliki akses langsung dan memberikan masukan yang substansial kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan nasional, terutama yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Selain itu, Lemhannas RI juga didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Tenaga ahli, akademisi, dan praktisi yang bekerja di Lemhannas RI memiliki pengalaman luas dan kompetensi yang mendalam dalam bidang ketahanan nasional, kepemimpinan, dan strategi. Hal ini memungkinkan Lemhannas RI untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tinggi, serta melakukan pengkajian strategis yang berdampak besar. Integrasi sipil dan militer, yang melibatkan keberagaman masyarakat sipil, ASN, TNI, dan Polri, menjadi kekuatan tambahan dalam menciptakan sinergi yang solid untuk merespons tantangan ketahanan nasional secara holistik dan terkoordinasi.

Jaringan kerjasama Lemhannas RI juga merupakan potensi besar. Lembaga ini memiliki kerjasama yang luas dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi, pengetahuan, dan praktik terbaik, yang dapat memperkaya program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Melalui kerjasama internasional, Lemhannas RI juga dapat mengadopsi dan menyesuaikan strategi serta metode terbaru yang diterapkan di negara lain untuk konteks Indonesia.

Kurikulum yang komprehensif dan selalu diperbarui juga menjadi salah satu potensi penting Lemhannas RI. Kurikulum yang dirancang mencakup berbagai aspek penting, seperti kepemimpinan, ketahanan nasional, dan strategi, yang disesuaikan dengan perkembangan



global dan kebutuhan nasional. Dengan kurikulum yang terus diperbarui, Lemhannas RI dapat memastikan bahwa para peserta didiknya mendapatkan pendidikan yang relevan dan up-to-date dengan tantangan zaman.

Reputasi Lemhannas RI sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang berpengaruh di tingkat nasional dan regional juga merupakan aset berharga. Reputasi ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas Lemhannas RI, tetapi juga menarik minat para pemimpin dan calon pemimpin dari berbagai sektor untuk mengikuti program-program yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI.

Komitmen Lemhannas RI terhadap inovasi juga menjadi potensi yang tidak kalah penting. Lemhannas RI selalu berusaha untuk mengembangkan metode pengajaran, pengkajian, dan pengukuran ketahanan nasional yang inovatif. Dengan komitmen ini, Lemhannas RI dapat terus relevan dan responsif terhadap perubahan serta tantangan zaman modern.

Dengan berbagai potensi yang dimilikinya, Lemhannas RI berada dalam posisi yang kuat untuk terus berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan ketahanan nasional Indonesia. Potensi-potensi ini memungkinkan Lemhannas RI untuk menjadi pusat layanan unggulan (*Center of Excellence*) dalam bidang ketahanan nasional, sejalan dengan visi dan misinya untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

1.2.2. Permasalahan yang Akan Dihadapi

Meskipun Lemhannas RI memiliki banyak potensi yang signifikan, tetapi juga menghadapi berbagai permasalahan yang perlu diatasi untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Lemhannas RI adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program strategis, terutama yang memerlukan investasi besar seperti pengembangan infrastruktur dan teknologi. Anggaran yang terbatas dapat menghambat kemampuan Lemhannas RI untuk meningkatkan fasilitas dan mengadopsi teknologi terbaru yang sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengkajian.

Infrastruktur dan fasilitas yang dimiliki oleh Lemhannas RI juga merupakan salah satu permasalahan. Lemhannas RI belum dilengkapi dengan fasilitas modern yang mendukung pelaksanaan berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pengkajian. Fasilitas ini mencakup ruang kelas yang canggih, perpustakaan yang lengkap dengan akses digital ke sumber-sumber global, teknologi informasi mutakhir untuk simulasi dan analisis strategis, laboratorium kebijakan, serta ruang kolaborasi yang fleksibel. Semua ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, pengkajian strategis, dan pengembangan pemimpin nasional yang siap menghadapi tantangan global.

Proses birokrasi yang panjang dan kompleks juga menjadi tantangan tersendiri bagi Lemhannas RI. Birokrasi yang tidak efisien dapat memperlambat pengambilan keputusan dan implementasi program-program penting. Hal ini bisa menyebabkan terhambatnya berbagai inisiatif dan proyek yang seharusnya bisa segera dijalankan untuk mendukung ketahanan nasional. Selain itu, birokrasi yang rumit seringkali menguras banyak waktu dan sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif.



Lemhannas RI juga dihadapkan pada tantangan global dan dinamika regional yang terus berubah. Situasi politik, ekonomi, dan keamanan di tingkat regional dan global sering kali menuntut penyesuaian yang cepat dan tepat. Hal ini tidak selalu mudah dilakukan, terutama ketika perubahan tersebut membutuhkan perubahan strategi dan pendekatan yang mendalam. Lemhannas RI perlu terus memantau dan menganalisis perkembangan global serta menyesuaikan program dan kebijakan mereka agar tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan tersebut.

Ketergantungan pada teknologi juga menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh Lemhannas RI. Di satu sisi, teknologi adalah alat yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan. Namun, di sisi lain, teknologi yang terus berkembang memerlukan pembaruan dan pemeliharaan yang berkelanjutan, yang membutuhkan biaya dan waktu yang signifikan. Ketergantungan ini menuntut Lemhannas RI untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan memastikan bahwa infrastruktur teknologinya selalu *up-to-date*.

Perubahan kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan program Lemhannas RI. Kebijakan yang berubah-ubah dapat menyebabkan ketidakpastian dan memerlukan penyesuaian yang cepat dalam strategi dan operasional. Lemhannas RI perlu memiliki fleksibilitas tinggi untuk dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebijakan tersebut agar program-program yang telah direncanakan dapat tetap berjalan sesuai dengan target.

Pengukuran kinerja yang efektif dan akurat untuk program-program yang kompleks dan multidimensi seperti yang dilakukan Lemhannas RI juga merupakan tantangan tersendiri. Menilai keberhasilan dan kegagalan program secara komprehensif memerlukan sistem pengukuran yang canggih dan metodologi yang tepat. Tanpa pengukuran kinerja yang baik, sulit untuk mengevaluasi dampak dari program-program yang dijalankan dan membuat perbaikan yang diperlukan.

Lemhannas RI juga menghadapi tantangan dalam hal sumber daya manusia. Meskipun memiliki SDM yang berkualitas, mempertahankan dan meningkatkan kompetensi serta kapasitas SDM sesuai dengan tuntutan zaman adalah tugas yang berat. Pelatihan dan pengembangan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa SDM Lemhannas RI tetap mampu menghadapi berbagai tantangan baru dan mengimplementasikan strategi yang efektif.

Terakhir, resistensi terhadap perubahan dari berbagai pihak juga merupakan permasalahan yang perlu diatasi. Inovasi dan pengembangan program sering kali menghadapi hambatan dari pihak-pihak yang tidak ingin atau tidak siap untuk berubah. Lemhannas RI perlu mengembangkan strategi komunikasi dan manajemen perubahan yang efektif untuk mengatasi resistensi ini dan memastikan bahwa semua pihak terkait mendukung inisiatif baru yang diambil.

Secara keseluruhan, meskipun Lemhannas RI memiliki banyak potensi besar, berbagai permasalahan yang dihadapinya memerlukan perhatian dan penanganan serius agar lembaga ini dapat menjalankan perannya dengan optimal dalam mendukung ketahanan nasional Indonesia.



1.2.3. Analisis SWOT Jangka Menengah

Berdasarkan hasil analisis SWOT yang dilakukan menunjukkan bahwa Lemhannas RI memiliki beberapa kekuatan signifikan dalam dinamika internalnya. Pertama, Lemhannas RI memiliki kapasitas yang besar untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional. Hal ini tercermin dari berbagai program pelatihan dan pengembangan yang dirancang untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan para peserta, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kedua, Lemhannas RI aktif dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui edukasi dan publikasi. Berbagai inisiatif dan kegiatan yang dilakukan tidak hanya fokus pada peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga berusaha menanamkan dan memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat luas.

Ketiga, Lemhannas RI mampu melakukan kajian strategis berkelas dunia yang mendalam dan komprehensif. Dengan pendekatan ilmiah yang ketat dan metodologi yang teruji, hasil kajian yang dihasilkan oleh Lemhannas RI selalu relevan dan memberikan kontribusi yang berarti bagi pengambilan kebijakan nasional.

Keempat, Lemhannas RI memiliki jaringan dan kerjasama internasional yang luas dengan lembaga sejenis dan mitra internasional. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan best practices yang sangat berharga, serta membuka peluang untuk peningkatan kapasitas institusi melalui benchmarking dan adopsi teknologi terbaru.

Kelima, Lemhannas RI memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Investasi yang konsisten dalam pengembangan kompetensi dan keterampilan para pegawai memastikan bahwa Lemhannas RI selalu memiliki tim yang siap menghadapi tantangan global dan mampu memberikan kontribusi optimal dalam setiap tugas yang diemban.

Dengan kekuatan sebesar 350 poin sebagaimana tercantum pada Tabel 1 di bawah ini, Lemhannas RI berada pada posisi yang sangat baik untuk terus memainkan peran strategis dalam pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia.

Tabel 1

Strengths

No	Variabel	NU	BF	NUxBF
1.	Memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional	4	25	100
2.	Aktif dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui edukasi dan publikasi.	1	10	10
3.	Mampu melakukan kajian strategis berkelas dunia yang mendalam dan komprehensif.	3	20	60
4.	Memiliki jaringan dan kerjasama internasional yang luas dengan lembaga sejenis dan mitra internasional.	2	15	30



No	Variabel	NU	BF	NUxBF
5.	Memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.	5	30	150
	Jumlah		100	350

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa secara dinamika internal, Lemhannas RI memiliki kelemahan sebesar 348 poin, yang mendekati nilai kekuatan sebesar 350 poin. Kelemahan-kelemahan ini mencakup beberapa aspek penting yang memerlukan perhatian dan perbaikan.

Pertama, efektivitas metode pendidikan dan pelatihan di Lemhannas RI masih rendah. Metode yang digunakan belum mampu secara maksimal meningkatkan kemampuan dan kompetensi para peserta didik, yang berdampak pada kualitas output yang dihasilkan oleh institusi.

Kedua, tata kelola pemerintahan di Lemhannas RI belum optimal. Struktur organisasi dan mekanisme kerja yang ada saat ini belum sepenuhnya mendukung efisiensi dan efektivitas operasional, sehingga beberapa fungsi dan tugas belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga, ketersediaan sumber daya anggaran belum memadai untuk mendukung semua program dan kegiatan yang direncanakan. Terbatasnya anggaran menyebabkan beberapa inisiatif strategis tidak dapat dijalankan secara maksimal, yang pada gilirannya menghambat pencapaian tujuan-tujuan institusional.

Keempat, kemampuan Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam memperkuat ketahanan nasional belum optimal. Koordinasi dan sinergi antarunit masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam upaya penguatan ketahanan nasional.

Kelima, pengelolaan keuangan di Lemhannas RI belum sepenuhnya akuntabel. Masih terdapat beberapa kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan yang perlu diperbaiki untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Dengan adanya kelemahan-kelemahan sebagaimana tercantum pada Tabel 2 di bawah ini, Lemhannas RI perlu melakukan berbagai langkah perbaikan dan peningkatan kapasitas agar dapat mengatasi tantangan-tantangan internal dan terus berperan sebagai institusi yang strategis dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

Tabel 2

Weaknesses

No	Variabel	NU	BF	NUxBF
1.	Masih kurang efektifnya metode pendidikan dan pelatihan.	5	30	150
2.	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Lemhannas RI	3	18	54



No	Variabel	NU	BF	NUxBF
3.	Belum memadainya dukungan sumber daya anggaran untuk semua program dan kegiatan.	1	10	10
4.	Belum optimalnya kemampuan Pusat dan UPT dalam memperkuat Ketahanan Nasional.	4	25	100
5.	Masih rendahnya akuntabilitas dalam Pengelolaan keuangan Lemhannas RI.	2	17	34
	Jumlah		100	348

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa dalam dinamika eksternal, Lemhannas RI memiliki peluang sebesar 367 poin, yang melebihi kekuatan internal sebesar 350 poin. Peluang-peluang ini mencerminkan berbagai faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan oleh Lemhannas RI untuk lebih memperkuat perannya dalam konteks nasional dan global.

Pertama, meningkatnya kebutuhan akan pemimpin yang cakap dalam menghadapi tantangan nasional dan global memberikan peluang besar bagi Lemhannas RI untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional. Dengan adanya tuntutan yang semakin kompleks dari berbagai sektor, Lemhannas RI dapat menjadi pusat pengembangan kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika global.

Kedua, meningkatnya peran strategis Lemhannas RI untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan nasional dan penguatan ketahanan nasional merupakan peluang yang signifikan. Lemhannas RI memiliki kesempatan untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas dan mendalam terhadap ketahanan nasional Indonesia.

Ketiga, adanya peluang untuk memperluas jaringan dan kolaborasi dengan lembaga internasional memberikan kesempatan bagi Lemhannas RI untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya melalui pertukaran pengetahuan dan *best practices*. Kerjasama internasional ini dapat membuka akses terhadap sumber daya dan teknologi baru yang dapat meningkatkan efektivitas program-program yang dijalankan.

Keempat, kemajuan teknologi memberikan peluang besar bagi Lemhannas RI untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, Lemhannas RI dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan efisien, serta menjangkau lebih banyak peserta didik secara luas.

Kelima, meningkatnya dukungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan memberikan peluang bagi Lemhannas RI untuk lebih mengoptimalkan program-program edukasi dan publikasi. Dengan adanya dukungan ini, Lemhannas RI dapat lebih efektif dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat rasa cinta tanah air di kalangan masyarakat luas.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang sebagaimana tercantum pada Tabel 3 di bawah ini, Lemhannas RI dapat terus memperkuat posisinya sebagai institusi yang strategis dan berpengaruh dalam pembangunan nasional dan ketahanan nasional Indonesia.



Tabel 3
Opportunities

No	Variabel	NU	BF	NUxBF
1.	Meningkatnya kebutuhan akan pemimpin yang cakap dalam menghadapi tantangan nasional dan global.	3	20	60
2.	Meningkatnya peran strategis Lemhannas untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan nasional dan penguatan ketahanan nasional.	5	35	175
3.	Terbukanya peluang untuk memperluas jaringan dan kolaborasi dengan lembaga internasional.	1	8	8
4.	Tersedianya kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.	2	12	24
5.	Meningkatnya dukungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan.	4	25	100
	Jumlah		100	367

Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa dalam dinamika eksternal, Lemhannas RI menghadapi ancaman sebesar 346 poin, yang hampir sejajar dengan kelemahan internal sebesar 348 poin. Ancaman-ancaman ini mencerminkan berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi peran dan fungsi Lemhannas RI secara signifikan.

Pertama, dinamika geopolitik global yang cepat berubah dapat berdampak pada peran dan fungsi Lemhannas RI. Perubahan yang tidak terduga dalam konstelasi politik internasional dapat mempengaruhi stabilitas regional dan nasional, sehingga menuntut Lemhannas RI untuk selalu siap menghadapi situasi yang dinamis dan kompleks.

Kedua, kompleksitas isu ketahanan nasional yang semakin beragam membutuhkan kapasitas Lemhannas RI yang lebih kuat. Isu-isu seperti terorisme, bencana alam, keamanan siber, dan lainnya memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang menuntut peningkatan kapasitas dan kapabilitas Lemhannas RI secara berkelanjutan.

Ketiga, perubahan teknologi dan inovasi yang pesat dapat menghambat efektivitas program pendidikan dan pelatihan Lemhannas RI. Ketidakmampuan untuk mengikuti perkembangan teknologi dapat membuat metode dan materi pendidikan menjadi usang, sehingga mengurangi efektivitas program-program yang dijalankan.

Keempat, krisis ekonomi yang menyebabkan keterbatasan anggaran pemerintah dapat berdampak pada pendanaan Lemhannas RI. Pengurangan anggaran dapat membatasi ruang gerak Lemhannas RI dalam melaksanakan program-program strategis dan operasional, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan institusional.

Kelima, menurunnya minat dan perhatian publik terhadap nilai-nilai kebangsaan menjadi ancaman yang serius. Kurangnya apresiasi dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya



nilai-nilai kebangsaan dapat melemahkan upaya Lemhannas RI dalam memperkuat rasa cinta tanah air dan solidaritas nasional.

Dengan adanya ancaman-ancaman sebagaimana tercantum pada Tabel 4 di bawah ini, Lemhannas RI perlu mengembangkan strategi yang adaptif dan proaktif untuk mengatasi tantangan eksternal dan memitigasi dampak negatifnya. Ini termasuk memperkuat kerjasama internasional, meningkatkan kapasitas internal, serta terus berinovasi dalam metode pendidikan dan pelatihan untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Tabel 4

Threats

No	Variabel	NU	BF	NUxBF
1.	Dinamika geopolitik global yang cepat berubah dapat berdampak pada peran dan fungsi Lemhannas RI.	4	24	96
2.	Kompleksitas isu ketahanan nasional yang semakin beragam membutuhkan kapasitas Lemhannas RI yang lebih kuat.	3	20	60
3.	Disrupsi teknologi dan inovasi yang pesat dapat menghambat efektivitas program pendidikan dan pelatihan Lemhannas RI.	5	30	150
4.	Krisis ekonomi yang menyebabkan Keterbatasan anggaran pemerintah dapat berdampak pada pendanaan Lemhannas.	2	14	28
5.	Menurunnya minat dan perhatian publik terhadap nilai-nilai kebangsaan.	1	12	12
	Jumlah		100	346

1.2.4. Scenario Planning Lemhannas RI 2029

Scenario Planning Lemhannas RI 2029 dirancang dengan mengidentifikasi dua *driving forces* utama yang saling melengkapi, yaitu Program Bina Ketahanan Nasional sebagai sumbu vertikal dan Program Dukungan Manajemen sebagai sumbu horizontal. Kombinasi dari kedua dimensi ini menghasilkan empat kwadran skenario yang menggambarkan kondisi Lemhannas RI pada tahun 2029.

Keempat kwadran tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kwadran I: Ketahanan Nasional Tangguh mencerminkan optimalnya Program Bina Ketahanan Nasional dan Dukungan Manajemen, memperkuat Lemhannas RI yang berdaya saing. Dengan kinerja puncak, Lemhannas RI berkontribusi pada Ketahanan Nasional yang kokoh, mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 secara efektif dan berkelanjutan.



- 2) Kwadran II: Ketahanan Nasional Cukup Tangguh mencerminkan stabilitas hasil efektivitas Program Bina Ketahanan Nasional, meski dukungan manajemen masih terbatas. Lemhannas RI mencatat banyak kemajuan, namun belum sepenuhnya mewujudkan visi-misinya. Upaya strategis tetap diperlukan agar Ketahanan Nasional semakin kuat dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
- 3) Kwadran III: Ketahanan Nasional Kurang Tangguh mencerminkan rupuhnya Ketahanan Nasional akibat kendala dalam program strategis dan manajemen pendukung yang lemah. Lemhannas RI gagal mencapai visi-misinya, menyebabkan gangguan serius pada Ketahanan Nasional. Diperlukan langkah korektif untuk mengembalikan stabilitas dan memastikan keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
- 4) Kwadran IV: Ketahanan Nasional Wawan mencerminkan kondisi terburuk ketika program strategis dan manajemen pendukung gagal total. *Mismanagement* di Lemhannas RI melemahkan Ketahanan Nasional secara drastis, menghambat stabilitas negara. Akibatnya, Visi Indonesia Emas 2045 tidak terwujud, menuntut langkah korektif dan pemulihan segera.

Penjelasan lebih lanjut mengenai gambaran setiap kwadran dan strategi mitigasi risiko dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Gambar 2

Scenario Planning Lemhannas RI 2029



Berdasarkan perhitungan analisis SWOT yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil Kwadran I (S-O) sebesar poin 717, Kwadran II (S-T) sebesar poin 696, Kwadran III (W-O) sebesar 715 poin, dan Kwadran IV (W-T) sebesar poin 694, maka posisi Lemhannas RI berada pada Kwadran I dengan penjelasan sebagai berikut.



Kwadran I Ketahanan Nasional Tangguh

Pada tahun 2029, Lemhannas RI mencapai Kwadran I Ketahanan Nasional Tangguh, didorong oleh konsistensi dalam Program Bina Ketahanan Nasional dan Program Dukungan Manajemen. Dengan kapasitas yang kuat untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional, Lemhannas aktif dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui program edukasi dan publikasi yang efektif dan menyeluruh.

Lemhannas RI mampu melakukan kajian strategis berkelas dunia yang mendalam dan komprehensif, memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan nasional yang relevan dan berkelanjutan. Jaringan dan kerjasama internasional yang luas dengan lembaga sejenis dan mitra internasional semakin memperkuat posisi Lemhannas di kancah global, membuka peluang untuk kolaborasi yang lebih produktif.

SDM di Lemhannas RI berkualitas tinggi dan berdaya saing, hasil dari pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Meningkatnya kebutuhan akan pemimpin yang cakap dalam menghadapi tantangan nasional dan global menempatkan Lemhannas RI sebagai institusi kunci dalam pengembangan kepemimpinan yang tangguh.

Peran strategis Lemhannas RI semakin diakui, berkontribusi secara signifikan dalam perumusan kebijakan nasional dan penguatan ketahanan nasional. Kemajuan teknologi dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, memastikan bahwa Lemhannas RI tetap berada di garis depan inovasi dan adaptasi.

Dukungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan juga meningkat, berkat upaya edukasi yang konsisten dan meluas. Dengan jaringan dan kerjasama internasional yang kuat, Lemhannas RI siap memanfaatkan setiap peluang untuk memperkuat ketahanan nasional.

Kesuksesan Lemhannas RI dalam mempertahankan konsistensi program dan manajemen menunjukkan bahwa ketahanan nasional dapat dicapai melalui strategi yang kokoh dan berkelanjutan. Lemhannas RI siap menjawab tantangan masa depan dengan kepemimpinan yang kuat dan inovasi yang berkelanjutan.

Untuk lebih memperkokoh Ketahanan Nasional, maka Sasaran Strategis yang disarankan adalah sebagaimana yang tercantum pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5

Kwadran I Tannas Tangguh

No.	Variabel S-O	Sasaran Strategis
1.	Memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional	Perbarui kurikulum, fasilitas, dan infrastruktur Lemhannas RI untuk dukung program kepemimpinan nasional
2.	Aktif dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui edukasi dan publikasi.	Perbaiki modul, materi dan kerjasama yang efektif dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan.



No.	Variabel S-O	Sasaran Strategis
3.	Mampu melakukan kajian strategis berkelas dunia yang mendalam dan komprehensif.	Tingkatan pengkajian yang mendalam dan komprehensif terkait isu-isu strategis nasional dan internasional.
4.	Memiliki jaringan dan kerjasama internasional yang luas dengan lembaga sejenis dan mitra internasional.	Tingkatkan jaringan dan kerjasama internasional yang luas dengan lembaga sejenis dan mitra internasional.
5.	Memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.	Perkuat SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.
6.	Meningkatnya kebutuhan akan pemimpin yang cakap dalam menghadapi tantangan nasional dan global.	Perkuat infrastruktur dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mencetak pemimpin tangguh menghadapi dinamika global.
7.	Meningkatnya peran strategis Lemhannas untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan nasional dan penguatan ketahanan nasional.	Optimalkan sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI dukung peran strategis rumuskan kebijakan nasional dan kuatkan ketahanan nasional.
8.	Adanya peluang untuk memperluas jaringan dan kolaborasi dengan lembaga internasional.	Perluas jaringan dan kolaborasi dengan lembaga internasional.
9.	Adanya kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.	Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.
10.	Meningkatnya dukungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan.	Tingkatkan sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk edukasi publik tentang nilai-nilai kebangsaan.

Kwadran II Ketahanan Nasional Cukup Tangguh

Apabila Lemhannas RI masuk ke Kwadran II (S-T), maka pada tahun 2029 kondisi Ketahanan Nasional Cukup Tangguh di mana terdapat konsistensi dalam Program Bina Ketahanan Nasional tetapi menghadapi ketidakpastian dalam Program Dukungan Manajemen. Lemhannas RI tetap memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan, meskipun tidak selalu didukung oleh manajemen yang konsisten.

Lemhannas RI aktif dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui program edukasi dan publikasi yang terus berjalan dengan baik. Kemampuan untuk melakukan kajian strategis berkelas dunia yang mendalam dan komprehensif tetap menjadi kekuatan utama Lemhannas RI, memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan nasional.



Dengan jaringan dan kerjasama internasional yang luas dengan lembaga sejenis dan mitra internasional, Lemhannas RI tetap mampu membuka peluang untuk kolaborasi dan pertukaran pengetahuan. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing terus dikembangkan melalui pelatihan yang berkelanjutan, memastikan kesiapan menghadapi tantangan global.

Namun, dinamika geopolitik global yang cepat berubah dan kompleksitas isu ketahanan nasional yang semakin beragam menuntut kapasitas Lemhannas RI yang lebih kuat. Perubahan teknologi dan inovasi yang pesat kadang menghambat efektivitas program pendidikan dan pelatihan, memerlukan adaptasi cepat dari Lemhannas RI.

Krisis ekonomi yang menyebabkan keterbatasan anggaran pemerintah juga berdampak pada pendanaan Lemhannas, menantang keberlanjutan beberapa program. Selain itu, menurunnya minat dan perhatian publik terhadap nilai-nilai kebangsaan menjadi isu yang perlu segera diatasi.

Dalam menghadapi tantangan ini, Lemhannas RI harus terus menjaga konsistensi dalam Program Bina Ketahanan Nasional dan meningkatkan dukungan manajemen yang lebih baik. Dengan langkah-langkah strategis ini, Lemhannas RI dapat terus memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan nasional dan memastikan bahwa Indonesia tetap tangguh menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Untuk bertransformasi dari Kwadran II (Cukup Tangguh) ke Kwadran I (Tangguh), maka Sasaran Strategis yang disarankan adalah sebagaimana yang tercantum pada Tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6

Kwadran II Tannas Cukup Tangguh

No.	Variabel S-T	Sasaran Strategis
1.	Memiliki kapasitas untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional	Perbarui kurikulum, fasilitas, dan infrastruktur Lemhannas RI untuk dukung program kepemimpinan nasional
2.	Aktif dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui edukasi dan publikasi.	Perbaiki modul, materi dan kerjasama yang efektif dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan.
3.	Mampu melakukan kajian strategis berkelas dunia yang mendalam dan komprehensif.	Tingkatan pengkajian yang mendalam dan komprehensif terkait isu-isu strategis nasional dan internasional.
4.	Memiliki jaringan dan kerjasama internasional yang luas dengan lembaga sejenis dan mitra internasional.	Tingkatkan jaringan dan kerjasama internasional yang luas dengan lembaga sejenis dan mitra internasional.
5.	Memiliki SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.	Perkuat SDM yang berkualitas dan berdaya saing melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.



No.	Variabel S-T	Sasaran Strategis
6.	Dinamika geopolitik global yang cepat berubah dapat berdampak pada peran dan fungsi Lemhannas RI.	Adaptasi peran dan fungsi Lemhannas RI menghadapi dinamika geopolitik global yang cepat berubah.
7.	Kompleksitas isu ketahanan nasional yang semakin beragam membutuhkan kapasitas Lemhannas RI yang lebih kuat.	Tingkatkan kapasitas Lemhannas RI menghadapi kompleksitas isu ketahanan nasional yang beragam.
8.	Perubahan teknologi dan inovasi yang pesat dapat menghambat efektivitas program pendidikan dan pelatihan Lemhannas RI.	Integrasikan teknologi dan inovasi dalam program pendidikan dan pelatihan Lemhannas RI.
9.	Krisis ekonomi yang menyebabkan Keterbatasan anggaran pemerintah dapat berdampak pada pendanaan Lemhannas.	Optimalkan pendanaan Lemhannas RI dengan strategi diversifikasi dan efisiensi anggaran.
10.	Menurunnya minat dan perhatian publik terhadap nilai-nilai kebangsaan.	Promosikan nilai-nilai kebangsaan melalui media kreatif dan inovatif untuk meningkatkan minat publik.

Kwadran III Ketahanan Nasional Kurang Tangguh

Apabila Lemhannas RI terperosok ke Kwadran III (W-O), maka pada tahun 2029 kondisi Ketahanan Nasional Kurang Tangguh, di mana Lemhannas RI menghadapi tantangan serius yang mempengaruhi efektivitas dan stabilitas lembaga ini. Meskipun Program Dukungan Manajemen berjalan konsisten, ketidakkonsistenan dalam Program Bina Ketahanan Nasional telah menyebabkan rendahnya efektivitas metode pendidikan dan pelatihan, menghambat upaya peningkatan kualitas kepemimpinan nasional.

Tata kelola pemerintahan Lemhannas RI belum optimal, yang diperparah dengan ketersediaan sumber daya anggaran yang belum memadai untuk mendukung semua program dan kegiatan. Kemampuan Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam memperkuat ketahanan nasional juga belum optimal, sehingga lembaga ini kesulitan memberikan kontribusi maksimal dalam penguatan ketahanan nasional.

Pengelolaan keuangan yang belum akuntabel menambah kompleksitas masalah internal, menurunkan kepercayaan stakeholder dan publik terhadap Lemhannas RI. Meskipun demikian, meningkatnya kebutuhan akan pemimpin yang cakap dalam menghadapi tantangan nasional dan global tetap menjadi dorongan bagi Lemhannas RI untuk terus berperan strategis dalam perumusan kebijakan nasional.

Peluang untuk memperluas jaringan dan kolaborasi dengan lembaga internasional masih ada, memberikan kesempatan bagi Lemhannas RI untuk belajar dan beradaptasi dengan praktik terbaik global. Kemajuan teknologi menawarkan cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, meskipun penerapannya memerlukan adaptasi yang cepat dan efektif.



Dukungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan semakin meningkat, memberikan landasan kuat bagi program-program edukasi dan publikasi Lemhannas RI. Untuk mengatasi tantangan ini, Lemhannas RI perlu meningkatkan konsistensi dalam Program Bina Ketahanan Nasional dan memperbaiki tata kelola serta pengelolaan keuangan.

Dengan langkah-langkah ini, Lemhannas RI dapat memperkuat ketahanan nasional, memastikan lembaga ini tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan. Untuk bertransformasi dari Kwadran III (Kurang Tangguh) ke Kwadran I (Tangguh), maka Sasaran Strategis yang disarankan adalah sebagaimana yang tercantum pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7
Kwadran III Tannas Kurang Tangguh

No.	Variabel W-O	Sasaran Strategis
1.	Rendahnya efektivitas metode pendidikan dan pelatihan.	Tingkatkan efektivitas metode pendidikan dan pelatihan yang inovatif.
2.	Tatakelola pemerintahan Lemhannas RI belum optimal	Tingkatkan Indeks RB, AKIP, dan efektivitas kerjasama Lemhannas RI.
3.	Ketersediaan sumber daya anggaran belum memadai untuk semua program dan kegiatan.	Tingkatkan sumber daya anggaran untuk semua program dan kegiatan.
4.	Belum optimalnya kemampuan Pusat dan UPT dalam memperkuat Ketahanan Nasional.	Tingkatkan kemampuan Pusat dan UPT dalam memperkuat Ketahanan Nasional
5.	Pengelolaan keuangan Lemhannas RI belum akuntabel.	Tingkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Lemhannas RI.
6.	Meningkatnya kebutuhan akan pemimpin yang cakap dalam menghadapi tantangan nasional dan global.	Perkuat infrastruktur dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mencetak pemimpin tangguh menghadapi dinamika global.
7.	Meningkatnya peran strategis Lemhannas untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan nasional dan penguatan ketahanan nasional.	Optimalkan sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI dukung peran strategis rumuskan kebijakan nasional dan kuatkan ketahanan nasional.
8.	Adanya peluang untuk memperluas jaringan dan kolaborasi dengan lembaga internasional.	Perluas jaringan dan kolaborasi dengan lembaga internasional.
9.	Adanya kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.	Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan.



No.	Variabel W-O	Sasaran Strategis
10.	Meningkatnya dukungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan.	Tingkatkan sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk edukasi publik tentang nilai-nilai kebangsaan.

Kwadran IV Ketahanan Nasional Rawan

Apabila Lemhannas RI terperosok ke Kwadran IV (W-T), maka pada tahun 2029, Lemhannas RI berada dalam kondisi kritis di mana Ketahanan Nasional Rawan. Program Bina Ketahanan Nasional yang tidak konsisten telah mengakibatkan rendahnya efektivitas metode pendidikan dan pelatihan. Ketidakkonsistenan dalam Program Dukungan Manajemen juga memperburuk situasi, membuat tatakelola pemerintahan Lemhannas RI belum optimal.

Ketersediaan sumber daya anggaran yang tidak memadai semakin memperparah kondisi, menghambat pelaksanaan semua program dan kegiatan yang esensial. Kemampuan Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam memperkuat ketahanan nasional belum mencapai tingkat yang diharapkan, menyebabkan lemahnya respons terhadap berbagai tantangan.

Pengelolaan keuangan yang tidak akuntabel memperburuk kepercayaan stakeholder dan masyarakat terhadap Lemhannas RI. Dinamika geopolitik global yang cepat berubah juga berdampak signifikan pada peran dan fungsi Lemhannas, menuntut kapasitas yang lebih kuat untuk menangani kompleksitas isu ketahanan nasional yang semakin beragam.

Perubahan teknologi dan inovasi yang pesat, alih-alih membantu, justru menghambat efektivitas program pendidikan dan pelatihan Lemhannas RI. Krisis ekonomi yang menyebabkan keterbatasan anggaran pemerintah semakin menekan pendanaan Lemhannas, mengancam kelangsungan program dan kegiatan strategis. Menurunnya minat dan perhatian publik terhadap nilai-nilai kebangsaan menambah tantangan serius yang harus diatasi.

Untuk menghindari kehancuran total, Lemhannas RI harus segera mereformasi tatakelola dan pengelolaan keuangan, serta mengembangkan strategi inovatif untuk mengatasi ketidakkonsistenan dalam program. Upaya meningkatkan kesadaran dan dukungan publik terhadap nilai-nilai kebangsaan juga harus diprioritaskan. Hanya dengan langkah-langkah ini, Lemhannas RI dapat berupaya memulihkan perannya dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia.

Untuk bertransformasi dari Kwadran IV (Rawan) ke Kwadran I (Tangguh), maka Sasaran Strategis yang disarankan adalah sebagaimana yang tercantum pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8

Kwadran IV Tannas Rawan

No.	Variabel W-T	Sasaran Strategis
1.	Rendahnya efektivitas metode pendidikan dan pelatihan.	Tingkatkan efektivitas metode pendidikan dan pelatihan yang inovatif.



No.	Variabel W-T	Sasaran Strategis
2.	Tatakelola pemerintahan Lemhannas RI belum optimal	Tingkatkan Indeks RB, AKIP, dan efektivitas kerjasama Lemhannas RI.
3.	Ketersediaan sumber daya anggaran belum memadai untuk semua program dan kegiatan.	Tingkatkan sumber daya anggaran untuk semua program dan kegiatan.
4.	Belum optimalnya kemampuan Pusat dan UPT dalam memperkuat Ketahanan Nasional.	Tingkatkan kemampuan Pusat dan UPT dalam memperkuat Ketahanan Nasional
5.	Pengelolaan keuangan Lemhannas RI belum akuntabel.	Tingkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Lemhannas RI.
6.	Dinamika geopolitik global yang cepat berubah dapat berdampak pada peran dan fungsi Lemhannas RI.	Adaptasi peran dan fungsi Lemhannas RI menghadapi dinamika geopolitik global yang cepat berubah.
7.	Kompleksitas isu ketahanan nasional yang semakin beragam membutuhkan kapasitas Lemhannas RI yang lebih kuat.	Tingkatkan kapasitas Lemhannas RI menghadapi kompleksitas isu ketahanan nasional yang beragam.
8.	Perubahan teknologi dan inovasi yang pesat dapat menghambat efektivitas program pendidikan dan pelatihan Lemhannas RI.	Integrasikan teknologi dan inovasi dalam program pendidikan dan pelatihan Lemhannas RI.
9.	Krisis ekonomi yang menyebabkan Keterbatasan anggaran pemerintah dapat berdampak pada pendanaan Lemhannas.	Optimalkan pendanaan Lemhannas RI dengan strategi diversifikasi dan efisiensi anggaran.
10.	Menurunnya minat dan perhatian publik terhadap nilai-nilai kebangsaan.	Promosikan nilai-nilai kebangsaan melalui media kreatif dan inovatif untuk meningkatkan minat publik.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS





Bab II

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

2.1. Visi

Selaras dengan visi besar Presiden Republik Indonesia sebagaimana yang tecantum pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yaitu:

“Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, visi Lemhannas RI mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden sehingga visi Lemhannas RI 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya Ketahanan Nasional yang Tangguh dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan tekad untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, dengan fondasi yang kokoh dalam Ketahanan Nasional. Sebagai institusi strategis yang bertugas memperkuat kepemimpinan nasional, nilai-nilai kebangsaan, dan kajian strategis, Lemhannas RI memiliki peran sentral dalam mendukung tercapainya tujuan ini.

Pada akhir periode perencanaan 2025–2029, Lemhannas RI diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kredibilitas, dengan kontribusi nyata dalam penguatan ketahanan nasional. Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan, seperti dinamika geopolitik global, transformasi digital, dan dampak perubahan iklim. Di tengah tantangan ini, Lemhannas RI memiliki target untuk menjadi pusat unggulan dalam pengembangan pimpinan tingkat nasional yang berwawasan strategis, kajian strategik bidang ketahanan nasional, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Secara konkret, keadaan yang ingin dicapai adalah:

- 1) Peningkatan kualitas pemimpin tingkat nasional melalui program pendidikan kepemimpinan tingkat nasional yang inovatif dan relevan dengan tantangan global.
- 2) Terciptanya rekomendasi kebijakan yang strategis berbasis kajian strategik yang mampu menjadi rujukan pemerintah dalam pengambilan keputusan.
- 3) Memperkuat nilai-nilai kebangsaan berbasis 4 Konsensus Dasar Bangsa di tengah masyarakat Indonesia yang semakin plural dan dinamis.
- 4) Menjadikan Indeks Ketahanan Nasional sebagai alat ukur yang diakui secara nasional maupun internasional dan menjadi rujukan Kepemimpinan Nasional serta sertifikasi profesi Ketahanan Nasional.
- 5) Didukung oleh manajemen dan SDM yang profesional, akuntabel dan transparan.

Dalam lima tahun mendatang, Lemhannas RI berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan konsistensi kinerjanya. Fokus utama adalah menghasilkan Indeks Ketahanan



Nasional yang Tangguh dengan meningkatkan kualitas layanan di tiga pilar utama, yaitu pendidikan kepemimpinan nasional, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan kajian strategis.

Program pendidikan akan dirancang untuk menghasilkan pemimpin dengan wawasan kebangsaan yang kuat dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan global. Nilai-nilai kebangsaan akan terus diperkuat melalui program yang menargetkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Sementara itu, kajian strategis akan diarahkan pada isu-isu prioritas nasional, seperti ketahanan ekonomi, politik, keamanan, dan sosial budaya serta isu-isu Regional dan Global.

Di sisi kelembagaan, Lemhannas RI akan mengadopsi pendekatan digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional.

Sebagai lembaga strategis, Lemhannas RI memiliki tiga peran utama. Pertama, sebagai pusat pendidikan dan pelatihan bagi calon pemimpin nasional yang siap menghadapi tantangan global dan memajukan bangsa. Kedua, Lemhannas RI berfungsi sebagai pusat kajian strategis, Lemhannas RI menjadi sumber utama analisis dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam bidang ketahanan nasional. Ketiga, sebagai penjaga nilai-nilai kebangsaan untuk memperkuat identitas nasional di tengah ancaman disintegrasi.

Melalui pendekatan yang kolaboratif dan inovatif, Lemhannas RI terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa meninggalkan akar nilai kebangsaan. Lemhannas RI juga berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Dalam periode 2025–2029, Lemhannas RI tidak hanya menjadi pilar ketahanan nasional, tetapi juga motor penggerak transformasi menuju Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing global. Dengan kerja keras dan sinergi semua pihak, visi Mewujudkan Ketahanan Nasional Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 akan semakin nyata terwujud.

2.2. Misi

Misi Lemhannas RI adalah:

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan Pimpinan Nasional sebagai Pendidikan Puncak Kepemimpinan Nasional yang Berintegritas, Berkarakter Kebangsaan, Kredibel, dan Berkelas Dunia;
- 2) Menyelenggarakan Kajian Strategis di bidang Ketahanan Nasional baik yang bersifat nasional, regional maupun global;
- 3) Menyelenggarakan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dalam memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam mendukung Ketahanan Nasional;
- 4) Menyelenggarakan Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Kepemimpinan Nasional, serta menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi Pengajar Ketahanan Nasional;
- 5) Meningkatkan Kualitas dan Kredibilitas Lembaga di bidang Ketahanan Nasional dengan dukungan Manajemen dan SDM yang Profesional;



Misi ini mengarahkan lembaga untuk terus meningkatkan perannya sebagai pilar strategis dalam mendukung penguatan kepemimpinan nasional, kajian strategis, dan nilai-nilai kebangsaan. Dalam lima pilar utama misinya, Lemhannas RI menegaskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Maju.

Untuk mencapai visi besar tersebut, Lemhannas RI akan mengimplementasikan berbagai upaya strategis yang berfokus pada lima pilar utama:

- 1) Lemhannas RI akan merancang sistem pendidikan pemimpinan yang kredibel dan berkelas dunia. Program ini akan mengintegrasikan perspektif lokal, nasional, dan global sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang tidak hanya memiliki wawasan kebangsaan yang kuat tetapi juga mampu bersaing di kancah internasional. Kurikulum akan terus diperbarui untuk mencakup tantangan dunia modern, seperti transformasi digital, geopolitik global, dan perubahan iklim.
- 2) Lemhannas RI berkomitmen untuk menjadi pusat kajian strategis yang menghasilkan analisis mendalam dan berbasis data. Fokus kajian akan meliputi berbagai aspek ketahanan nasional, seperti ketahanan ekonomi, politik, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan pendekatan multidisiplin, hasil kajian Lemhannas RI akan menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan strategis.
- 3) Sebagai penjaga ideologi bangsa, Lemhannas RI akan memperkokoh nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Program-program pemantapan kebangsaan akan diarahkan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk generasi muda, guna menghadapi ancaman ideologi transnasional yang dapat melemahkan persatuan bangsa.
- 4) Lemhannas RI akan terus mengembangkan dan menyempurnakan Indeks Ketahanan Nasional sebagai alat ukur kredibel untuk menilai ketahanan suatu wilayah. Indeks ini akan memberikan gambaran komprehensif kepada pemerintah terkait kondisi ketahanan nasional, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang efektif.
- 5) Lemhannas RI akan menjadi pusat rujukan dalam pengembangan kompetensi kepemimpinan nasional. Melalui pelatihan, konsultasi, dan pendampingan, Lemhannas RI akan membantu menciptakan pemimpin-pemimpin yang mampu merancang strategi yang adaptif dan berdaya saing global.

Tugas dan fungsi Lemhannas RI bersifat unik dibandingkan dengan kementerian/lembaga lain. Sebagai lembaga yang fokus pada penguatan ketahanan nasional, Lemhannas RI memainkan peran strategis dalam:

- a. Mengintegrasikan pendidikan kepemimpinan dengan wawasan kebangsaan;
- b. Menjadi penghubung antara kajian akademis dan implementasi kebijakan;
- c. Memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika ideologi global;
- d. Menyediakan alat ukur objektif melalui Indeks Ketahanan Nasional.

Melalui pendekatan yang khas dan adaptif, Lemhannas RI tidak hanya berkontribusi pada stabilitas nasional tetapi juga menjadi katalisator dalam mempersiapkan Indonesia untuk meraih visi Indonesia Emas 2045. Dengan kolaborasi yang sinergis bersama berbagai pihak, Lemhannas RI akan terus menjadi lembaga strategis yang mendukung terwujudnya Indonesia Maju.



2.3. Tujuan

Lemhannas RI memiliki tujuan strategis yang terintegrasi dalam upaya mewujudkan visi besar Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Tujuan ini dirancang untuk menjawab tantangan jangka menengah, yakni periode 2025–2029, dengan fokus pada pengembangan kepemimpinan, kajian strategis berbasis ketahanan nasional, dan penguatan nilai kebangsaan. Semua upaya ini dilakukan untuk memastikan Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan siap menghadapi dinamika global. Oleh karena itu, Lemhannas RI memiliki tujuan ***Mewujudkan Ketahanan Nasional berbasis hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional yang didukung oleh Lembaga yang kredibel dan berkelas dunia*** dengan indikator tujuan Lemhannas RI adalah ***Indeks Ketahanan Nasional***.

Tabel 9
Tujuan dan Indikator Tujuan Lemhannas RI

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Mewujudkan Ketahanan Nasional berbasis hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional yang didukung oleh Lembaga yang kredibel dan berkelas dunia	Indeks Ketahanan Nasional	2,9	3,05	3,2	3,35	3,5	Nilai

Gambar 3
Klasifikasi Indeks Ketahanan Nasional





Pada periode jangka menengah 2025–2029, Lemhannas RI ingin memastikan bahwa tujuan tersebut tercapai secara konsisten dan berkelanjutan. Dalam rangka penjabaran visi dan misi, Lemhannas RI memanfaatkan seluruh kemampuan yang dimiliki, baik dari sisi SDM, teknologi, maupun jejaring kerja sama nasional dan internasional. Dengan demikian, Lemhannas RI akan tetap menjadi institusi yang kredibel dan berkelas dunia, yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan nasional guna mendukung Indonesia yang maju dan berdaulat.

2.4. Sasaran Strategis

Lemhannas RI memiliki sasaran strategis yang terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional sesuai RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, dengan fokus pada penguatan kepemimpinan nasional, nilai-nilai kebangsaan, dan ketahanan nasional. Sasaran ini tidak hanya mencerminkan hasil dari berbagai program yang dilaksanakan, tetapi juga menjadi tolok ukur pencapaian tujuan utama Lemhannas RI dalam menghadapi tantangan nasional dan global.

Sasaran Strategis Lemhannas RI adalah:

- 1) Terwujudnya pendidikan puncak dalam penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan kepemimpinan nasional.
- 2) Terwujudnya pengkajian strategik yang bersifat nasional, regional, dan internasional.
- 3) Terwujudnya pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
- 4) Terwujudnya pelaksanaan pengukuran ketahanan nasional dan pengukuran kepemimpinan nasional.
- 5) Terwujudnya tatakelola pemerintahan Lemhannas RI yang profesional, efektif dan efisien.

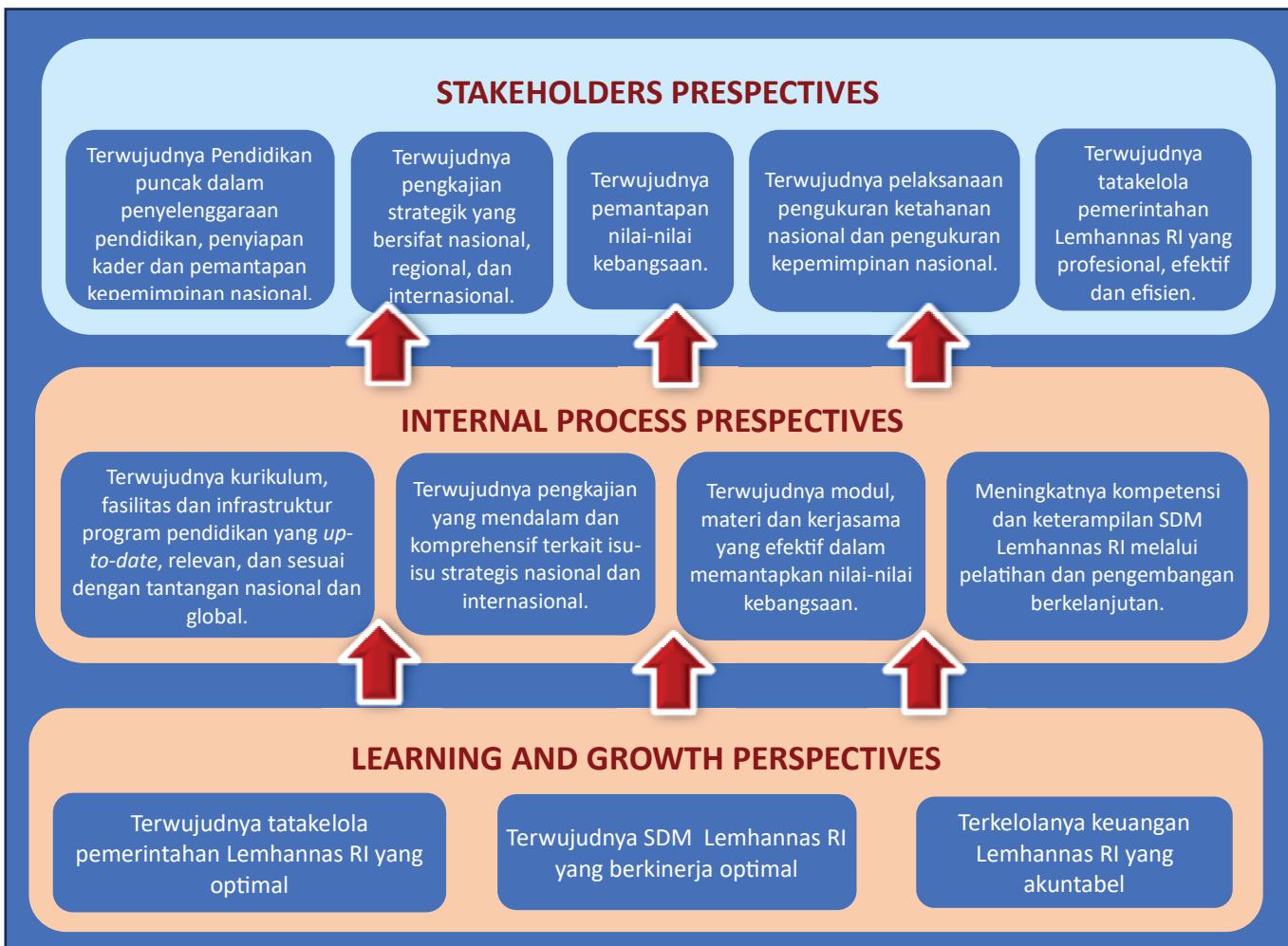
Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai Lemhannas RI dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Lemhannas RI. Guna mencapai sasaran strategis tersebut, telah dirumuskan juga beberapa strategi pendukung Lemhannas RI yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kurikulum, fasilitas dan infrastruktur program pendidikan yang *up-to-date*, relevan, dan sesuai dengan tantangan nasional dan global.
- 2) Terwujudnya pengkajian yang mendalam dan komprehensif terkait isu-isu strategis nasional dan internasional.
- 3) Terwujudnya modul, materi dan kerjasama yang efektif dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan.
- 4) Meningkatnya kompetensi dan keterampilan SDM Lemhannas RI melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.
- 5) Terwujudnya tatakelola pemerintahan Lemhannas RI yang optimal.
- 6) Terwujudnya SDM Lemhannas RI yang berkinerja optimal.
- 7) Terkelolanya keuangan Lemhannas RI yang akuntabel



Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Lemhannas RI akan dapat mencapai sasaran strategis ini sebagaimana tergambar pada Peta Strategi Lemhannas RI berikut:

Gambar 4
Peta Strategi Lemhannas RI



Berdasarkan perspektif Balanced Scorecard tersebut di atas, Sasaran Strategis Lemhannas RI dirumuskan menjadi perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspectives*) sebagai sasaran strategis utama Lemhannas RI. Untuk mencapai perspektif pemangku kepentingan tersebut, diperlukan dukungan dari perspektif proses internal (*internal process perspectives*), serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspectives*). Sasaran ini mencerminkan prioritas strategis yang mendukung visi dan misi Lemhannas RI.

Untuk memastikan implementasi yang efektif, setiap sasaran strategis diturunkan menjadi indikator kinerja spesifik dan terukur. Indikator ini mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif yang digunakan sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis. Penjabaran indikator tersebut dijelaskan secara rinci dalam Tabel 10, yang memuat rincian indikator untuk setiap perspektif, sehingga memberikan panduan yang jelas untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja organisasi secara berkesinambungan.



Tabel 10
Sasaran Strategis dan Indikator Lemhannas RI

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholders	SS 1	Terwujudnya Pendidikan Puncak dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penyiapan Kader dan Pemantapan Kepemimpinan Nasional.	IKSS 1.1	Indeks Kompetensi Kepemimpinan Nasional
	SS 2	Terwujudnya Pengkajian Strategik yang bersifat Nasional, Regional, dan Internasional.	IKSS 2.1	Indeks Rekomendasi Kajian Strategis (IRK)
	SS 3	Terwujudnya Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.	IKSS 3.1	Indeks Aktualisasi Nilai-nilai Kebangsaan
	SS 4	Terwujudnya pelaksanaan Pengukuran Ketahanan Nasional dan Pengukuran Kepemimpinan Nasional.	IKSS 4.1	Jumlah Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang memanfaatkan IKN setiap tahun
			IKSS 4.2	Termanfaatkannya hasil pengukuran kepemimpinan nasional oleh pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah.
	SS 5	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Lemhannas RI yang Profesional, Efektif dan Efisien.	IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi

Tabel 11
Sasaran Strategis Pendukung dan Rencana Aksi Lemhannas RI

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	RENCANA AKSI
Internal Process	Terwujudnya kurikulum, fasilitas dan infrastruktur program pendidikan yang <i>up-to-date</i> , relevan, dan sesuai dengan tantangan nasional dan global.	Frekuensi review dan revisi kurikulum.
		Tingkat relevansi materi.
		Kepuasan peserta terhadap isi kurikulum.
	Terwujudnya pengkajian yang	Jumlah pengkajian yang dilakukan,



PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	RENCANA AKSI
	mendalam dan komprehensif terkait isu-isu strategis nasional dan internasional.	kualitas dan relevansi hasil pengkajian.
		Tingkat implementasi hasil pengkajian dalam kebijakan.
		Pengaruh kajian pada kebijakan nasional.
	Terwujudnya modul, materi dan kerjasama yang efektif dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan.	Jumlah modul yang dikembangkan.
		Evaluasi kualitas materi.
		Tingkat penerapan nilai-nilai kebangsaan oleh peserta.
	Meningkatnya kompetensi dan keterampilan SDM Lemhannas RI melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.	Jumlah dan kualitas program pelatihan.
		Peningkatan kompetensi SDM.
		Kepuasan karyawan terhadap program pengembangan.
Learning and Growth	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Lemhannas RI yang optimal.	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) General Lemhannas RI.
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lemhannas RI.
		Persentase kerjasama yang efektif.
	Terwujudnya SDM Lemhannas RI yang berkinerja optimal.	Indeks Profesionalitas ASN Lemhannas RI.
		Persentase SDM Lemhannas RI yang memenuhi standar kompetensi.
		Pengukuran kinerja individu secara berkala.
	Terkelolanya keuangan Lemhannas RI yang akuntabel.	Opini BPK atas Laporan Keuangan Lemhannas RI.
		Nilai kinerja anggaran Lemhannas RI.
		Tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan.

1. Stakeholders Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Pendidikan Puncak dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penyiapan Kader dan Pemantapan Kepemimpinan Nasional.

Dalam mencapai sasaran ini, indikator utama yang digunakan adalah Indeks Kompetensi Kepemimpinan Nasional.



Peningkatan kompetensi dan kemampuan strategis peserta merupakan tujuan utama dari setiap program pendidikan di Lemhannas RI. Indikator ini diukur melalui evaluasi sebelum dan sesudah program, yang mencakup pengetahuan teoritis, keterampilan praktis, dan kemampuan dalam membuat keputusan strategis. Peningkatan yang signifikan menunjukkan bahwa program berhasil memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin nasional yang efektif.

Tabel 12
Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA					SATUAN
	2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Pendidikan Puncak dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penyiapan Kader dan Pemantapan Kepemimpinan Nasional						
Indeks Kompetensi Kepemimpinan Nasional	85	85,5	86	86,5	87	Nilai

Pada sasaran ini juga diperlukan upaya menyusun manajemen risiko guna mengantisipasi, mengendalikan, dan meminimalisir potensi kerugian dalam setiap kegiatan sehingga Lemhannas RI dapat menjaga stabilitas, meningkatkan efisiensi, serta memastikan keberlanjutan program. Indikasi risiko yang mungkin terjadi adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan tidak secara tatap muka penuh karena keterbatasan anggaran. Proses pengajaran secara daring menyebabkan penyampaian materi yang kurang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian kurikulum dan silabus pengajaran yang dinamis oleh Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional sebagai Penanggung Jawab.

Tabel 13
Manajemen Risiko Sasaran Strategis-1

NOMENKLATUR INDIKASI RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB
Proses Pembelajaran yang kurang optimal karena dilaksanakan secara dalam jaringan (<i>Online</i>) sebagai akibat dari keterbatasan anggaran.	Melakukan Penyesuaian atau penyusunan kurikulum dan silabus dengan mempertimbangkan metode pembelajaran secara dalam jaringan (<i>Online</i>).	Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional.

b. Sasaran Strategis-2: Terwujudnya Pengkajian Strategik yang bersifat Nasional, Regional, dan Internasional.



Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, indikator utama yang digunakan adalah Indeks Rekomendasi Kajian Strategis (IRK).

Indeks ini mengukur kualitas dan relevansi rekomendasi hasil kajian strategis terhadap kebutuhan kebijakan nasional. Indikator ini mencerminkan tingkat keterpakaian/utilisasi hasil kajian oleh stakeholders dalam proses penyusunan kebijakan/pengambilan keputusan (*decision making process*). Indikator ini menunjukkan sejauh mana hasil kajian Lemhannas RI diterima dan diadopsi oleh pembuat kebijakan. Implementasi yang tinggi mencerminkan bahwa pengkajian yang dilakukan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan berguna dalam penyusunan kebijakan publik yang strategis.

Tabel 14
Sasaran Strategis 2 dan Indikator Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA					SATUAN
	2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Pengkajian Strategik yang Bersifat Nasional, Regional, dan Internasional						
Indeks Rekomendasi Kajian Strategis (IRK)	86	87	88	89	90	Nilai

Pada sasaran ini juga diperlukan upaya menyusun manajemen risiko guna mengantisipasi, mengendalikan, dan meminimalisir potensi kerugian dalam setiap kegiatan sehingga Lemhannas RI dapat menjaga stabilitas, meningkatkan efisiensi, serta memastikan keberlanjutan program. Indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam melaksanakan kajian adalah pemilihan metode yang kurang tepat, data tidak valid, kurang representatif dan sulit diakses sehingga hasil kajian yang kurang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan rumusan kajian yang jelas dan terdefinisi dengan baik oleh Kedeputian Pengkajian Strategik sebagai Penanggung Jawab.

Tabel 15
Manajemen Risiko Sasaran Strategis-2

NOMENKLATUR INDIKASI RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB
Pemilihan metode yang kurang tepat, data tidak valid, kurang representatif dan sulit diakses sehingga hasil kajian yang kurang optimal.	Perencanaan rumusan kajian yang jelas dan terdefinisi dengan baik.	Kedeputian Pengkajian Strategik.



c. Sasaran Strategis-3: Terwujudnya Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.

Untuk mencapai sasaran ini, indikator utama yang digunakan adalah Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan.

Peningkatan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan diukur melalui evaluasi yang menilai perubahan dalam pengetahuan dan sikap masyarakat mengenai nilai-nilai seperti persatuan, kesatuan, toleransi, dan gotong royong. Peningkatan yang signifikan menunjukkan bahwa program-program yang dilakukan berhasil mendidik dan memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan. Juga dilakukan pengukuran sikap nasionalisme dari keberhasilan program. Sikap nasionalisme diukur melalui berbagai instrumen seperti survei sikap, wawancara, dan observasi partisipatif, yang menilai rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap identitas nasional, dan komitmen untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Sikap nasionalisme yang kuat menunjukkan bahwa program pemantapan nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI berhasil membangkitkan dan memperkuat rasa kebangsaan di hati masyarakat.

Tabel 16
Sasaran Strategis 3 dan Indikator Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA					SATUAN
	2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan						
Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	Nilai

Pada sasaran ini juga diperlukan upaya menyusun manajemen risiko guna mengantisipasi, mengendalikan, dan meminimalisir potensi risiko dalam setiap kegiatan sehingga Lemhannas RI dapat menjaga stabilitas, meningkatkan efisiensi, serta memastikan keberlanjutan program. Indikasi risiko yang mungkin terjadi adalah proses kegiatan yang dilaksanakan tidak secara tatap muka penuh karena keterbatasan anggaran. Pelatihan secara daring menyebabkan penyampaian materi yang kurang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan penyesuaian metode pengajaran yang dinamis oleh Kedeputian Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan sebagai Penanggung Jawab.

Tabel 17
Manajemen Risiko Sasaran Strategis-3

NOMENKLATUR INDIKASI RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB
Proses Pelatihan yang kurang optimal karena dilaksanakan secara dalam jaringan (<i>Online</i>) sebagai	Melakukan Penyesuaian atau penyusunan modul dengan mempertimbangkan metode pembelajaran	Kedeputian Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.



akibat dari keterbatasan anggaran.	secara dalam jaringan (Online).	
------------------------------------	---------------------------------	--

d. Sasaran Strategis-4: Terwujudnya pelaksanaan Pengukuran Ketahanan Nasional dan Pengukuran Kepemimpinan Nasional.

Untuk mencapai sasaran ini, terdapat dua indikator utama:

- 1) Jumlah Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang memanfaatkan IKN setiap tahun.
- 2) Termanfaatkannya hasil pengukuran kepemimpinan nasional oleh pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah.

Pertama, akurasi data pengukuran ketahanan nasional merupakan indikator penting untuk menilai kualitas pengukuran yang dilakukan. Akurasi data ini diukur melalui validitas dan reliabilitas informasi yang dikumpulkan selama pengukuran. Data yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk menghasilkan analisis yang tepat dan rekomendasi yang efektif dalam memperkuat ketahanan nasional sehingga meningkatkan persentase Kementerian/Lembaga/Daerah yang memanfaatkan Indeks Ketahanan Nasional.

Kedua, termanfaatkannya Indeks Kepemimpinan Nasional menjadi instrumen strategis bagi Presiden serta Kementerian/Lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Indeks ini berfungsi sebagai tolok ukur objektif untuk menilai kualitas, efektivitas, dan adaptasi kepemimpinan nasional dalam menghadapi dinamika global maupun tantangan internal bangsa. Pemanfaatan data ini memungkinkan pengambil keputusan untuk mengidentifikasi kekuatan yang sudah dimiliki, sekaligus memahami area yang masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan lebih tepat sasaran, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan visi jangka panjang pembangunan nasional.

Tabel 18

Sasaran Strategis 4 dan Indikator Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA					SATUAN
	2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya pelaksanaan Pengukuran Ketahanan Nasional dan Pengukuran Kepemimpinan Nasional						
Persentase Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang memanfaatkan IKN setiap tahun	20	40	50	75	95	%
Termanfaatkannya hasil pengukuran kepemimpinan nasional	0	0	0	0	1	Rekomendasi



oleh pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah							
---	--	--	--	--	--	--	--

Pada sasaran ini juga diperlukan upaya menyusun manajemen risiko guna mengantisipasi, mengendalikan, dan meminimalisir potensi kerugian dalam setiap kegiatan sehingga Lemhannas RI dapat menjaga stabilitas, meningkatkan efisiensi, serta memastikan keberlanjutan program. Indikasi risiko yang mungkin terjadi dalam melaksanakan pengukuran adalah data yang kurang valid dan up date, kurang representatif dan sulit diakses. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan metode pengumpulan data yang efisien dan efektif oleh Pusat Laboratorium sebagai Penanggung Jawab.

Tabel 19
Manajemen Risiko Sasaran Strategis-4

NOMENKLATUR INDIKASI RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB
Data yang kurang valid dan <i>up date</i> , kurang representatif dan sulit diakses.	Perencanaan metode pengumpulan data yang efisien dan efektif.	Pusat Laboratorium.

e. Sasaran Strategis-5: Terwujudnya tatakelola pemerintahan Lemhannas RI yang Profesional, Efektif dan Efisien.

Untuk mencapai sasaran ini, indikator utamanya adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian/Lembaga (K/L) maupun Pemerintah Daerah. Reformasi birokrasi sendiri merupakan upaya sistematis, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Terdapat beberapa indeks yang menjadi bagian dari Indeks Reformasi Birokrasi yaitu:

- 1) Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN): Tingkat keselarasan, kesesuaian, dan keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional
- 2) Keterbukaan Informasi Publik (KIP): Tingkat transparansi dalam pengelolaan informasi.
- 3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP): Efektivitas sistem kontrol internal dalam manajemen risiko.
- 4) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Digitalisasi layanan dan tata kelola pemerintahan.



- 5) Indonesia GovTech (INA GovTech): Penerapan teknologi dalam pelayanan publik.
- 6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) & Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP): Evaluasi efektivitas pencapaian program dan penggunaan anggaran.
- 7) Indeks Pengelolaan Aset: Efisiensi dalam pengelolaan aset negara.
- 8) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA): Efektivitas penggunaan anggaran.
- 9) Indeks Tata Kelola Pengadaan: Efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang/jasa.
- 10) Opini Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI menunjukkan tingkat kepatuhan Lemhannas RI terhadap standar akuntansi dan keuangan negara, yang dievaluasi oleh BPK. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi indikator tata kelola keuangan yang baik.
- 11) Indeks Statistik Nasional BPS mencerminkan kualitas dan akurasi data yang dikelola Lemhannas RI berdasarkan standar BPS, mencakup konsistensi data dalam mendukung kebijakan nasional, akurasi pengolahan dan pelaporan statistik.
- 12) Indeks Integritas Nasional KPK mengukur tingkat integritas dalam tata kelola pemerintahan Lemhannas RI berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi anti-korupsi, pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan, serta penerapan budaya kerja yang bebas dari korupsi dan suap.
- 13) Dan masih banyak lagi.

Tabel 20
Sasaran Strategis 5 dan Indikator Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET KINERJA					SATUAN
	2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lemhannas RI yang Profesional, Efektif dan Efisien						
Indeks Reformasi Birokrasi	75	76	77	78	79	Nilai

Pada sasaran ini juga diperlukan upaya menyusun manajemen risiko guna mengantisipasi, mengendalikan, dan meminimalisir potensi kerugian dalam setiap kegiatan sehingga Lemhannas RI dapat menjaga stabilitas, meningkatkan efisiensi, serta memastikan keberlanjutan program. Indikasi risiko yang mungkin terjadi adalah tujuan dan strategi reformasi birokrasi tidak dirumuskan secara jelas atau tidak selaras dengan kebijakan nasional sehingga dapat menyebabkan arah pelaksanaan menjadi tidak fokus dan berdampak pada rendahnya capaian Indeks RB Lemhannas RI. Oleh karena itu, dibutuhkan Road Map RB Lemhannas RI yang dilakukan secara Bersama-



sama oleh Inspektorat, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Kerja Sama dan Hukum, Biro Perencanaan, Biro Telematika dan Biro Umum.

Tabel 21
Manajemen Risiko Sasaran Strategis-5

NOMENKLATUR INDIKASI RISIKO	PERLAKUAN RISIKO	PENANGGUNG JAWAB
Tujuan dan strategi reformasi birokrasi tidak dirumuskan secara jelas atau tidak selaras dengan kebijakan nasional sehingga dapat menyebabkan arah pelaksanaan menjadi tidak fokus dan berdampak pada rendahnya capaian Indeks RB Lemhannas RI.	Menyusun Road Map RB Lemhannas RI.	1. Inspektorat; 2. Biro Hubungan Masyarakat; 3. Biro Kerja Sama dan Hukum; 4. Biro Perencanaan; 5. Biro Telematika; dan 6. Biro Umum.

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya kurikulum, fasilitas dan infrastruktur program pendidikan yang *up-to-date*, relevan, dan sesuai dengan tantangan nasional dan global.

Dalam mencapai sasaran strategis ini, terdapat rencana aksi: frekuensi review dan revisi kurikulum, tingkat relevansi materi, serta kepuasan peserta terhadap isi kurikulum.

Pertama, frekuensi review dan revisi kurikulum mencerminkan keseriusan Lemhannas RI dalam menjaga agar program pendidikan selalu terkini dan relevan. Kurikulum yang sering direview dan direvisi menunjukkan bahwa lembaga secara proaktif mengikuti perkembangan terbaru dan beradaptasi dengan dinamika yang terjadi di tingkat nasional dan global. Hal ini penting untuk memastikan bahwa peserta didik menerima pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan saat ini.

Kedua, tingkat relevansi materi menjadi indikator penting lainnya. Relevansi materi diukur melalui survei dan evaluasi yang melibatkan peserta didik serta ahli di bidang terkait. Materi yang relevan memastikan bahwa apa yang diajarkan dalam program pendidikan memiliki kaitan langsung dengan realitas dan tantangan yang dihadapi di lapangan. Tingkat relevansi yang tinggi menunjukkan bahwa kurikulum mampu menjawab kebutuhan praktis dan strategis yang diperlukan oleh para pemimpin masa depan.

Ketiga, kepuasan peserta terhadap isi kurikulum mencerminkan efektivitas dan kualitas program pendidikan. Kepuasan ini diukur melalui umpan balik dari peserta yang mencakup aspek seperti kejelasan materi, kesesuaian dengan kebutuhan peserta, dan kemampuan kurikulum dalam meningkatkan kompetensi mereka. Kepuasan yang tinggi menunjukkan bahwa kurikulum yang diterapkan berhasil memenuhi harapan



peserta dan memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perkembangan profesional mereka.

b. Sasaran Strategis-2: Terwujudnya pengkajian yang mendalam dan komprehensif terkait isu-isu strategis nasional dan internasional.

Untuk mencapai sasaran strategis ini, terdapat tiga rencana aksi: jumlah pengkajian yang dilakukan, kualitas dan relevansi hasil pengkajian, tingkat implementasi hasil pengkajian dalam kebijakan, serta pengaruh kajian pada kebijakan nasional.

Pertama, jumlah pengkajian yang dilakukan, serta kualitas dan relevansi hasil pengkajian, mencerminkan keseriusan Lemhannas RI dalam menyelidiki berbagai isu strategis yang penting. Banyaknya pengkajian yang dilakukan menunjukkan kemampuan lembaga dalam menangani berbagai topik, sementara kualitas dan relevansi pengkajian memastikan bahwa hasil yang diperoleh memiliki nilai akademis dan praktis yang tinggi. Ini penting untuk memastikan bahwa pengkajian memberikan wawasan yang mendalam dan berguna bagi pembuat kebijakan.

Kedua, tingkat implementasi hasil pengkajian dalam kebijakan menunjukkan efektivitas dan penerimaan hasil kajian oleh para pembuat kebijakan. Implementasi yang tinggi menandakan bahwa hasil pengkajian tidak hanya teoretis, tetapi juga aplikatif dan dapat diadopsi dalam kebijakan nyata yang berdampak pada masyarakat. Ini mencerminkan bahwa pengkajian yang dilakukan benar-benar relevan dan berguna dalam konteks praktis.

Ketiga, pengaruh kajian pada kebijakan nasional merupakan indikator kunci lainnya. Pengaruh ini diukur dari sejauh mana hasil pengkajian Lemhannas RI membentuk atau mempengaruhi kebijakan nasional. Indikator ini menunjukkan dampak jangka panjang dari pengkajian yang dilakukan, memastikan bahwa hasil kajian memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk arah kebijakan negara. Pengaruh yang besar menunjukkan bahwa pengkajian yang dilakukan oleh Lemhannas RI dihargai dan dianggap penting oleh para pengambil keputusan di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, rencana aksi ini bersama-sama memastikan bahwa Lemhannas RI tidak hanya melakukan pengkajian yang mendalam dan komprehensif, tetapi juga memastikan bahwa hasil kajian tersebut memiliki dampak nyata dalam konteks kebijakan nasional dan internasional.

c. Sasaran Strategis-3: Terwujudnya modul, materi dan kerja sama yang efektif dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan.

Untuk mencapai sasaran strategis ini, terdapat tiga rencana aksi: jumlah modul yang dikembangkan, evaluasi kualitas materi, serta tingkat penerapan nilai-nilai kebangsaan oleh peserta.

Pertama, jumlah modul yang dikembangkan mencerminkan produktivitas dan komitmen Lemhannas RI dalam menyediakan bahan ajar yang komprehensif dan beragam. Pengembangan modul yang banyak menunjukkan bahwa lembaga ini aktif dalam merespons kebutuhan akan pendidikan nilai-nilai kebangsaan. Modul-modul tersebut dirancang untuk mencakup berbagai aspek kebangsaan, seperti sejarah, budaya, dan prinsip-prinsip dasar negara, yang semuanya penting untuk memperkuat identitas dan solidaritas nasional.



Kedua, evaluasi kualitas materi merupakan indikator kunci untuk menilai efektivitas bahan ajar yang disediakan. Kualitas materi diukur melalui umpan balik dari peserta dan evaluasi dari para ahli di bidang pendidikan kebangsaan. Materi yang berkualitas tinggi akan mampu menyampaikan pesan dengan jelas, menarik, dan mendalam, sehingga peserta dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan dengan baik. Evaluasi positif menunjukkan bahwa materi tersebut efektif dalam mendidik dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Ketiga, tingkat penerapan nilai-nilai kebangsaan oleh peserta menjadi indikator akhir dari keberhasilan program. Penerapan ini diukur melalui observasi dan survei yang menilai perubahan perilaku dan sikap peserta setelah mengikuti program. Tingkat penerapan yang tinggi menunjukkan bahwa peserta tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan bahwa program pendidikan Lemhannas RI berhasil membentuk individu yang memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan siap menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

d. Sasaran Strategis-4: Meningkatnya kompetensi dan keterampilan SDM Lemhannas RI melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan.

Fokus utama sasaran strategis ini adalah pada tiga rencana aksi: jumlah dan kualitas program pelatihan, peningkatan kompetensi SDM, dan kepuasan karyawan terhadap program pengembangan.

Pertama, jumlah dan kualitas program pelatihan mencerminkan upaya Lemhannas RI dalam menyediakan beragam pelatihan yang relevan dan berkualitas tinggi bagi SDM-nya. Program-program ini dirancang untuk mencakup berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas strategis lembaga.

Kedua, peningkatan kompetensi SDM diukur melalui evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan serta penerapan keterampilan yang diperoleh dalam konteks kerja sehari-hari. Peningkatan ini mencakup aspek pengetahuan teknis, keterampilan manajerial, dan kemampuan kepemimpinan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan kompleks dunia modern.

Ketiga, kepuasan karyawan terhadap program pengembangan menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas dan relevansi program yang disediakan. Kepuasan ini diukur melalui umpan balik langsung dari karyawan yang mencakup aspek seperti kejelasan tujuan program, kualitas materi pelatihan, serta dampak positif yang dirasakan dalam pengembangan karier dan kesejahteraan pribadi mereka.

Secara keseluruhan, rencana aksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa Lemhannas RI memiliki SDM yang berkualitas tinggi dan siap menghadapi tantangan masa depan melalui investasi yang berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan.

3. Learning and Growth Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya tatakelola pemerintahan Lemhannas RI yang optimal.

Fokus utama sasaran strategis ini adalah pada tiga rencana aksi: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Lemhannas RI, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lemhannas RI, serta persentase kerjasama yang efektif.



Pertama, Indeks Reformasi Birokrasi (RB) General Lemhannas RI mencerminkan tingkat kemajuan lembaga dalam menerapkan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Peningkatan RB menunjukkan komitmen Lemhannas RI dalam memperbaiki tata kelola internal dan responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Kedua, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Lemhannas RI menilai sejauh mana lembaga memenuhi standar akuntabilitas dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan strategis. Tingginya nilai AKIP mencerminkan kualitas pengelolaan dan pencapaian kinerja yang efektif di Lemhannas RI.

Ketiga, persentase kerjasama yang efektif mengukur seberapa baik Lemhannas RI bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang efektif memastikan bahwa lembaga dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian dari berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari kegiatan dan program yang dilaksanakan.

Dengan mengintegrasikan ketiga rencana aksi ini, Lemhannas RI dapat mengukur dan meningkatkan tatakelola pemerintahannya sehingga dapat mencapai tingkat kinerja yang optimal dalam memenuhi mandatnya sebagai lembaga strategis dalam pembangunan dan pertahanan nasional.

b. Sasaran Strategis-2: Terwujudnya SDM Lemhannas RI yang berkinerja optimal.

Fokus utama sasaran strategis ini adalah pada tiga rencana aksi: Indeks Profesionalitas ASN Lemhannas RI, persentase SDM Lemhannas RI yang memenuhi standar kompetensi, serta pengukuran kinerja individu secara berkala.

Pertama, Indeks Profesionalitas ASN Lemhannas RI menilai tingkat profesionalisme dan integritas dari anggota ASN (Aparatur Sipil Negara) di Lemhannas RI. Indeks ini mencakup aspek seperti etika kerja, kepatuhan terhadap peraturan, dan pelayanan publik, yang penting untuk menjaga reputasi dan efektivitas lembaga.

Kedua, persentase SDM Lemhannas RI yang memenuhi standar kompetensi mengukur sejauh mana personel memiliki kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani tugas-tugas strategis Lemhannas RI. Standar kompetensi yang tinggi memastikan bahwa SDM dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi.

Ketiga, pengukuran kinerja individu secara berkala menjadi indikator kunci lainnya dalam menilai kualitas dan produktivitas SDM. Pengukuran ini dilakukan secara periodik untuk mengevaluasi pencapaian target, kemajuan dalam pengembangan keterampilan, dan kontribusi individu terhadap keberhasilan program dan inisiatif lembaga. Pengukuran yang sistematis dan objektif membantu identifikasi kekuatan dan area pengembangan untuk mendukung pertumbuhan karier dan peningkatan kinerja secara keseluruhan.

Dengan mengintegrasikan ketiga rencana aksi ini, Lemhannas RI dapat memastikan bahwa SDM-nya tidak hanya memiliki kompetensi yang diperlukan, tetapi juga menjaga standar profesionalisme yang tinggi dan terus meningkatkan kinerja individu untuk mendukung misi dan visi lembaga secara efektif.



c. Sasaran Strategis-3: Terkelolanya keuangan Lemhannas RI yang akuntabel.

Fokus utama sasaran strategis ini adalah pada tiga rencana aksi: Opini BPK atas Laporan Keuangan Lemhannas RI, nilai kinerja anggaran Lemhannas RI, dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan.

Pertama, Opini BPK atas Laporan Keuangan Lemhannas RI merupakan indikator utama yang menunjukkan sejauh mana laporan keuangan lembaga ini dapat diandalkan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Opini yang positif dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa proses pelaporan keuangan dilakukan dengan tepat dan transparan, memenuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.

Kedua, nilai kinerja anggaran Lemhannas RI mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan. Evaluasi kinerja anggaran meliputi aspek penggunaan dana yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi, serta kontrol yang kuat terhadap pengeluaran dan pendapatan yang dikelola oleh lembaga.

Ketiga, tingkat kepatuhan terhadap regulasi keuangan mengukur sejauh mana Lemhannas RI patuh terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Kepatuhan ini mencakup aspek pelaporan waktu, penggunaan dana sesuai peruntukan, dan transparansi dalam proses keuangan, yang semua itu penting untuk menjaga integritas dan reputasi lembaga di mata publik dan pemerintah.

Dengan mengintegrasikan ketiga rencana aksi ini, Lemhannas RI dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan mereka tidak hanya akuntabel dan efisien, tetapi juga memenuhi standar yang tinggi dalam pengawasan dan transparansi, sehingga mendukung misi dan tujuan strategis lembaga dengan baik.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Lemhannas RI periode 2025-2029 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagaimana Gambar 5 berikut:



Gambar 5

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Lemhannas RI 2025-2029





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN





Bab III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional merupakan bagian penting dari RPJMN yang secara langsung berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi Lemhannas RI. Kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan yang relevan dengan mandat Lemhannas RI sebagai lembaga strategis yang bertugas mengawal ketahanan nasional, membangun kader pemimpin bangsa, dan melakukan kajian strategis.

RPJMN 2025-2029 dan Renstra Lemhannas RI saling berkaitan dalam kerangka penyusunan perencanaan pembangunan nasional dan institusional. Renstra Lemhannas RI mencakup visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Lemhannas RI. Dokumen ini disusun dengan berpedoman pada RPJMN 2025-2029, yang berfungsi sebagai panduan utama dan bersifat indikatif dalam menentukan arah pembangunan jangka menengah.

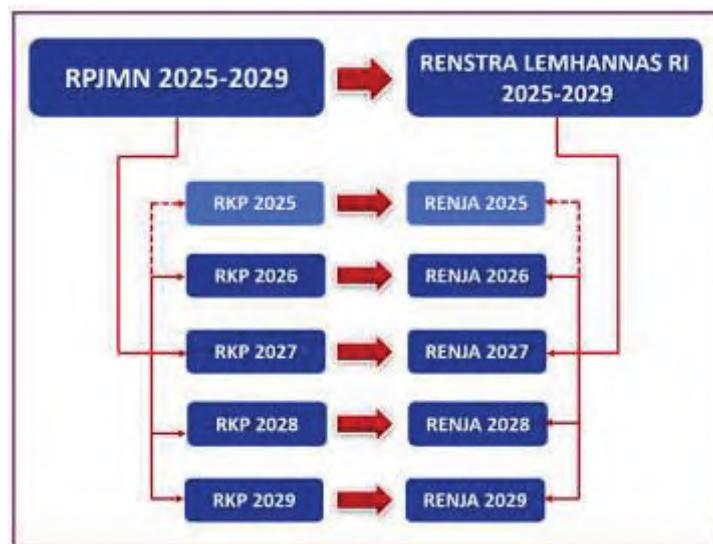
Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebagai penjabaran tahunan dari RPJMN, berisi prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan lintas sektor. RKP juga memuat kerangka regulasi dan pendanaan indikatif, yang memberikan landasan operasional bagi kementerian dan lembaga, termasuk Lemhannas RI, dalam merancang dan melaksanakan program tahunannya.

Rencana Kerja (Renja) Lemhannas RI disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Renstra Lemhannas RI. Renja ini mengacu pada prioritas pembangunan nasional dalam RKP serta pagu indikatif yang telah ditentukan. Renja Lemhannas RI merangkum kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang relevan dengan visi dan misi lembaga, memastikan kesinambungan antara arah strategis nasional dan peran institusional Lemhannas RI.

Namun, tahun 2025 menjadi tahun transisi khusus karena RPJMN 2025-2029 belum dijabarkan secara penuh ke dalam RKP dan Renja 2025. Dalam konteks ini, perencanaan tahun 2025 berdasarkan pertimbangan capaian dan kelanjutan prioritas dari RPJMN sebelumnya (2020-2024). Keterkaitan antara RPJMN 2025-2029 dengan Renstra Lemhannas RI dapat dilihat pada Gambar 6 berikut.



Gambar 6
Keterkaitan RPJMN dengan Renstra Lemhannas RI



Visi RPJMN 2025-2029 mengacu pada visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”** Visi ini mencerminkan semangat kolektif seluruh anak bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan dengan tekad yang sama. Dengan memanfaatkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, visi ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045 dan merealisasikan cita-cita Indonesia Emas 2045.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Asta Cita sebagai misi Presiden dituangkan dalam Prioritas Nasional (PN) yang menjadi bagian dari RPJMN 2025-2029, sebagaimana yang dijelaskan dalam Gambar 7 berikut.

Gambar 7
Asta Cita dan Prioritas Nasional



Sumber: Bappenas, 2025



Asta Cita sebagai delapan misi Presiden tersebut meliputi:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

RPJMN 2025-2029 dirancang dengan kerangka pikir *Trisula Pembangunan*, yang merupakan integrasi antara arah pembangunan jangka panjang (RPJPN) dan program-program prioritas Presiden. Trisula mencakup tiga elemen utama, yaitu 1) Pertumbuhan Tinggi Berkelaanjutan, 2) Penurunan Kemiskinan, dan 3) Penguatan SDM Berkualitas, sebagaimana yang dijelaskan dalam Gambar 8 berikut.

Gambar 8
Tiga Elemen Trisula



Sumber: Bappenas, 2025

Sebagai bagian dari Asta Cita, Prioritas Nasional (PN) 1 memiliki fokus memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. RPJMN 2025-2029 mengamanatkan bahwa



Lemhannas RI memiliki peran penting dalam mendukung prioritas ini melalui program pendidikan kepemimpinan nasional dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Tujuan PN 1 adalah mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Hal ini mencakup penguatan nilai-nilai kebangsaan, peningkatan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, serta optimalisasi peran masyarakat dalam pembangunan.

Dengan fokus Lemhannas RI pada indikator utama Indeks Ketahanan Nasional, RPJMN 2025-2029 memberikan arah yang jelas bagi Lemhannas RI untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan berdaulat. Visi besar ini hanya dapat dicapai dengan kerja sama seluruh elemen bangsa dan pelaksanaan kebijakan yang konsisten sesuai prioritas nasional yang telah ditetapkan, sebagaimana Gambar 9 berikut.

Gambar 9

Prioritas Nasional 1



Sumber: Bappenas, 2025

Penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional merupakan inti dari upaya Lemhannas untuk menciptakan Indonesia yang tangguh, harmonis, dan sejahtera. Melalui peningkatan kualitas kepemimpinan, pengembangan wawasan kebangsaan, dan pelaksanaan program seperti Gerakan Nasional Kita Bersaudara, Lemhannas RI berkomitmen untuk menjadi motor penggerak pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Kebijakan dan strategi Lemhannas RI mencakup berbagai program dan kegiatan prioritas, yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, dan kualitas kepemimpinan.

Sebagai kontributor, koordinator, dan pengampu indikator PN1-PP1-KP3 (Prioritas Nasional 1 – Program Prioritas 1 – Kegiatan Prioritas 3), Lemhannas RI memainkan peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. RPJMN 2025-2029 mengamanatkan indikator **Performa Pimpinan Tingkat Pusat dan Daerah dalam membina Ketahanan Nasional** kepada Lemhannas RI. Peran ini diwujudkan melalui upaya Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) dan Training of Trainer Nilai-nilai Kebangsaan guna



memperkokoh ideologi Pancasila, memperkuat demokrasi, memperluas wawasan kebangsaan, dan meningkatkan ketahanan nasional. Dengan pendekatan holistik, Lemhannas RI bertindak sebagai motor penggerak sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan program strategis tersebut.

Dalam konteks RPJMN 2025-2029, kedudukan Lemhannas RI pada Prioritas Nasional 1 menunjukkan komitmen lembaga ini sebagai garda terdepan dalam memperkokoh landasan ideologis, sosial, dan politik bangsa. Melalui berbagai program pendidikan, kajian strategis, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan, Lemhannas RI berkontribusi nyata pada terciptanya pemimpin berkualitas di tingkat pusat hingga daerah. Pemimpin-pemimpin ini diharapkan mampu menjawab tantangan nasional dan global dengan integritas, kompetensi, serta visi kebangsaan yang kuat.

Sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 10 berikut, Lemhannas RI menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan tetap menjadi fondasi kokoh bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Gambar 10

Kedudukan Lemhannas RI dalam Prioritas Nasional 1 RPJMN 2025-2029



Sumber: Bappenas, 2025

Prioritas Nasional 1

Lemhannas RI memiliki peran penting sebagai kontributor dalam Prioritas Nasional 1 (PN 1) untuk memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Peran ini sesuai dengan tugas pokok Lemhannas RI dalam membangun ketahanan nasional melalui penguatan wawasan kebangsaan, internalisasi nilai-nilai Pancasila, dan kajian strategis. Sasaran utama dari kontribusi ini adalah terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap HAM. Sebagai bagian dari struktur koordinasi, Lemhannas RI mendukung Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) sebagai koordinator utama PN 1.



Lemhannas RI menjalankan berbagai strategi untuk memastikan penguatan nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM dapat tercapai. Strategi ini diwujudkan melalui pendidikan kepemimpinan nasional, penguatan nilai-nilai kebangsaan, kajian strategis, dan pengukuran indeks ketahanan nasional.

Dalam hal pendidikan, Lemhannas RI menyelenggarakan program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) dan program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N). Program ini dirancang untuk membentuk pemimpin nasional dari berbagai sektor yang memiliki wawasan kebangsaan, pemahaman mendalam tentang ideologi Pancasila, dan komitmen terhadap demokrasi serta HAM. Peserta pendidikan ini tidak hanya berasal dari kalangan pemerintah, tetapi juga tokoh masyarakat, akademisi, dan pemimpin organisasi, sehingga menciptakan pemimpin yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

Penguatan nilai-nilai kebangsaan juga menjadi fokus utama Lemhannas RI. Berbagai kegiatan sosialisasi, seminar, dan lokakarya diadakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Hal ini dilakukan dengan pendekatan yang inklusif, melibatkan kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang untuk memastikan pesan-pesan kebangsaan dapat tersampaikan dengan efektif.

Sebagai lembaga kajian strategis, Lemhannas RI juga aktif melakukan analisis terkait isu-isu yang dapat memengaruhi implementasi nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan HAM. Kajian ini memberikan rekomendasi yang relevan kepada pemerintah dalam menghadapi tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan pelanggaran HAM. Pendekatan berbasis data yang dilakukan Lemhannas RI memastikan bahwa rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (SPKN) yang dikembangkan oleh Lemhannas RI menjadi instrumen penting untuk memetakan kondisi ketahanan nasional, termasuk aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. Hasil pengukuran ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang kebijakan strategis yang bertujuan memperkokoh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai bagian dari koordinasi PN 1, Lemhannas RI bersinergi dengan Kemenko Polkam serta lembaga-lembaga terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kolaborasi ini dilakukan melalui penyelarasan program, forum diskusi strategis, serta pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi PN 1.

Melalui peran strategis ini, Lemhannas RI menjadi salah satu pilar utama dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Dengan kontribusi yang terus ditingkatkan, Lemhannas RI mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang harmonis, demokratis, dan menghormati HAM sebagai fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Program Prioritas 1

Lemhannas RI memiliki peran strategis sebagai koordinator dalam Program Prioritas 1 (PP 1), yakni penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional. Tugas ini sejalan dengan mandat Lemhannas RI sebagai lembaga strategis yang berfungsi membangun ketahanan nasional melalui pendidikan, kajian, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Sasaran utama dari program ini adalah terwujudnya penguatan Pancasila, wawasan kebangsaan, dan



ketahanan nasional dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai koordinator, Lemhannas RI memastikan terjalinnya sinergi antara kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam merumuskan dan melaksanakan program penguatan nilai-nilai kebangsaan. Upaya ini bertujuan untuk menghadapi berbagai tantangan, seperti ancaman ideologi transnasional, krisis kepercayaan terhadap sistem demokrasi, dan meningkatnya potensi disintegrasi sosial di tengah perubahan global yang dinamis.

Lemhannas RI menempatkan ideologi Pancasila sebagai landasan utama dalam pembangunan bangsa. Program-program yang dirancang fokus pada internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat luas, termasuk generasi muda. Edukasi dilakukan melalui pendekatan formal maupun informal, seperti seminar, lokakarya, dan dialog kebangsaan. Lemhannas RI juga menggandeng berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan media massa, untuk memastikan bahwa Pancasila tetap relevan dan menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia.

Melalui berbagai pelatihan kepemimpinan nasional, Lemhannas RI mencetak pemimpin yang memahami nilai-nilai Pancasila secara mendalam dan mampu mengaplikasikannya dalam kebijakan publik. Para pemimpin ini diharapkan menjadi *role model* dalam memperkuat komitmen ideologis bangsa di tengah tantangan globalisasi.

Wawasan kebangsaan menjadi elemen penting dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman Indonesia. Lemhannas RI melalui program pendidikan, seperti Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), memberikan pembekalan mendalam mengenai sejarah kebangsaan, dinamika sosial-politik, dan tantangan strategis nasional.

Program ini melibatkan tokoh-tokoh strategis dari berbagai sektor, termasuk birokrasi, TNI/Polri, akademisi, hingga masyarakat sipil. Dengan pendekatan lintas sektoral ini, wawasan kebangsaan diharapkan dapat menyebar ke seluruh lapisan masyarakat, menciptakan kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai koordinator ketahanan nasional, Lemhannas RI menggunakan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (SPKN) untuk memetakan kondisi bangsa. Instrumen ini menilai berbagai aspek, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, untuk mengidentifikasi potensi ancaman serta langkah mitigasinya. Data dari SPKN menjadi landasan dalam perumusan kebijakan yang terintegrasi guna menjaga stabilitas nasional.

Dalam pelaksanaan PP 1, Lemhannas RI bekerja sama dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kolaborasi ini juga melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat untuk memastikan bahwa program penguatan nilai-nilai kebangsaan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Melalui peran sebagai koordinator Program Prioritas 1, Lemhannas RI menjadi pilar utama dalam menjaga eksistensi dan relevansi nilai-nilai kebangsaan. Dengan pendekatan strategis, kolaboratif, dan berkelanjutan, Lemhannas RI tidak hanya memperkuat fondasi ideologi bangsa, tetapi juga membangun ketahanan nasional yang tangguh di tengah dinamika global. Upaya ini mendukung terwujudnya Indonesia sebagai bangsa yang kuat, bersatu, dan bermartabat.



Kegiatan Prioritas 3

Lemhannas RI memegang peran vital sebagai pengampu Kegiatan Prioritas 3, yaitu peningkatan kualitas pemimpin di tingkat pusat hingga daerah. Tugas ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk memastikan terciptanya kepemimpinan yang mampu menghadapi kompleksitas tantangan nasional dan global. Sasaran utama dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pemimpin di semua tingkatan, yang mampu membawa bangsa Indonesia menuju kemajuan dan kemandirian dalam berbagai sektor.

Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik di tingkat nasional maupun internasional, yang membutuhkan pemimpin dengan kompetensi unggul, wawasan strategis, dan integritas yang kuat. Pemimpin di tingkat pusat dan daerah memainkan peran penting dalam menentukan arah pembangunan, pengambilan kebijakan, dan pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas kepemimpinan menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai institusi strategis, Lemhannas RI menjalankan berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang dirancang khusus untuk membekali pemimpin di tingkat pusat dan daerah dengan keterampilan yang relevan. P4N dan P3N merupakan dua program unggulan Lemhannas RI yang fokus pada peningkatan kapasitas pemimpin di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, TNI/Polri, swasta, partai politik, Lembaga Pendidikan/keagamaan, sosial budaya/kepemudaan/profesi.

Program-program ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang isu-isu strategis nasional, tantangan geopolitik, serta pengelolaan sumber daya secara efektif. Peserta didorong untuk mengembangkan kemampuan analisis, berpikir strategis, dan mengambil keputusan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Prioritas 3, Lemhannas RI mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup penguatan tiga aspek utama: kompetensi teknis, kepemimpinan nasional, dan moralitas. Kompetensi teknis mencakup penguasaan manajemen pemerintahan, kebijakan publik, dan pengelolaan konflik. Kepemimpinan nasional ditekankan pada kemampuan memimpin perubahan, membangun kolaborasi lintas sektor, dan menciptakan inovasi. Sementara itu, moralitas ditekankan pada penguatan integritas dan etika kepemimpinan.

Selain itu, Lemhannas RI juga memanfaatkan teknologi informasi dan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Hal ini mencakup pelatihan penggunaan data dalam merumuskan kebijakan yang efektif serta penerapan sistem pengukuran ketahanan nasional sebagai alat evaluasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Lemhannas RI bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas kepemimpinan tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga menyentuh pemimpin di tingkat daerah, termasuk di wilayah terpencil. Sinergi ini diwujudkan melalui program pelatihan bersama, seminar nasional, dan pertukaran pengalaman antar pemimpin daerah.

Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan terwujud pemimpin-pemimpin yang memiliki visi kebangsaan, kemampuan strategis, dan komitmen untuk melayani masyarakat. Pemimpin yang dihasilkan Lemhannas RI diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, memperkuat persatuan, dan menciptakan solusi inovatif bagi berbagai permasalahan bangsa.



Sebagai pengampu Kegiatan Prioritas 3, Lemhannas RI memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan pemimpin berkualitas yang menjadi penggerak utama kemajuan Indonesia. Dengan program pendidikan dan pelatihan yang terintegrasi, Lemhannas RI memastikan bahwa setiap pemimpin di tingkat pusat maupun daerah memiliki kapasitas, karakter, dan visi yang dibutuhkan untuk memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik.

Proyek Prioritas 1

Proyek Prioritas 1 menempatkan Lemhannas RI sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan pendidikan pengkaderan pemimpin di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Dalam perannya sebagai institusi strategis, Lemhannas RI memiliki mandat untuk mempersiapkan para pemimpin bangsa yang tangguh, berintegritas, dan visioner guna menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Proyek ini menjadi langkah strategis untuk membangun kualitas kepemimpinan yang tidak hanya memahami kompleksitas persoalan nasional tetapi juga mampu menawarkan solusi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan.

Sebagai *leading sector*, Lemhannas RI memiliki tanggung jawab besar untuk merancang dan menyelenggarakan program pendidikan pengkaderan pemimpin yang komprehensif dan berkelanjutan. Program ini dirancang untuk melibatkan pemimpin dari berbagai sektor, baik di pemerintahan, swasta, TNI/Polri, maupun organisasi masyarakat. Dengan pendekatan lintas sektor ini, diharapkan tercipta jejaring kepemimpinan yang solid dan inklusif, sehingga mampu memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan nasional.

Kurikulum pendidikan di Lemhannas RI dirancang secara khusus untuk membekali para peserta dengan berbagai kemampuan strategis. Fokus utama meliputi penguatan wawasan kebangsaan, pemahaman geopolitik global, manajemen krisis, serta pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, program ini juga menekankan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi fondasi kepemimpinan yang baik. Melalui pendekatan holistik ini, para pemimpin tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi dinamika di tingkat nasional tetapi juga tantangan di tingkat internasional.

Dalam pelaksanaannya, Lemhannas RI mengadopsi metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif, seperti studi kasus, simulasi krisis, dan diskusi kelompok terarah. Selain itu, Lemhannas RI juga melibatkan para ahli, praktisi, dan pemimpin senior sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dan wawasan kepada peserta. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya perspektif peserta tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka dalam mengambil peran strategis.

Sebagai bagian dari Proyek Prioritas 1, Lemhannas RI juga berperan dalam mengembangkan jejaring alumni yang kuat dan berkelanjutan. Alumni Lemhannas RI yang telah tersebar di berbagai posisi strategis diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan mereka masing-masing. Melalui jejaring ini, Lemhannas RI dapat terus memantau kontribusi dan perkembangan para pemimpin yang telah mengikuti program pendidikan, serta memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan lanjutan dan konsultasi strategis.

Hasil akhir yang diharapkan dari proyek ini adalah terciptanya pemimpin-pemimpin berkualitas yang mampu menjawab tantangan pembangunan, menjaga persatuan, dan memperkuat kedaulatan bangsa. Lemhannas RI, sebagai *leading sector*, diharapkan menjadi pusat unggulan yang melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik bagi Indonesia. Dengan kepemimpinan yang kuat, diharapkan bangsa Indonesia akan semakin kokoh dalam menjaga



persatuan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Proyek ini bukan hanya investasi untuk masa depan tetapi juga fondasi penting dalam membangun bangsa yang tangguh, berdaulat, dan berdaya saing di tingkat global.

Proyek Prioritas 2

Proyek Prioritas 2 menempatkan Lemhannas RI sebagai *leading sector* dalam penyelenggaraan *Training of Trainers* (ToT) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas pelatih di berbagai sektor untuk menjadi agen pembaharu yang mampu menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan secara efektif. Melalui inisiatif ini, Lemhannas RI berperan strategis dalam memastikan bahwa nilai-nilai luhur bangsa terus ditanamkan dan diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebagai *leading sector*, Lemhannas RI merancang program ToT yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Program ini ditujukan bagi individu yang memiliki pengaruh luas di masyarakat, seperti pendidik, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, serta pemimpin organisasi pemuda. Peserta yang mengikuti ToT ini diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan Lemhannas RI dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di lingkungan mereka masing-masing.

Kurikulum ToT dirancang untuk mencakup berbagai aspek fundamental dan aplikatif. Pada tahap awal, peserta diberikan pemahaman mendalam tentang esensi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, termasuk sejarah, nilai-nilai, dan relevansinya dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, wawasan kebangsaan dikembangkan melalui penguatan kesadaran tentang pentingnya persatuan dalam keberagaman, pengelolaan dinamika sosial, serta peran strategis Indonesia dalam geopolitik global.

Dalam tahap implementasi, peserta ToT dibekali dengan metode dan teknik pelatihan yang inovatif. Pendekatan interaktif, seperti simulasi, diskusi kelompok, dan *role-playing*, digunakan untuk membangun keterampilan komunikasi dan penyampaian materi secara efektif. Hal ini bertujuan memastikan bahwa peserta tidak hanya memahami substansi materi, tetapi juga mampu menyampaikan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan cara yang inspiratif dan relevan bagi berbagai kalangan.

Proyek ini juga mengedepankan pendekatan evaluasi berkelanjutan untuk memantau efektivitas program. Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta ToT diwajibkan melaporkan kegiatan dan dampak dari upaya mereka dalam membina ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Evaluasi ini tidak hanya bertujuan untuk menilai keberhasilan program, tetapi juga untuk memberikan umpan balik guna penyempurnaan kurikulum dan metode pelatihan di masa depan.

Sebagai bagian integral dari proyek ini, Lemhannas RI juga membangun jejaring kolaborasi dengan berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan institusi pendidikan. Kolaborasi ini bertujuan memperluas jangkauan pelatihan serta memastikan sinergi dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di seluruh wilayah Indonesia.

Hasil yang diharapkan dari Proyek Prioritas 2 adalah terciptanya jaringan pelatih yang kompeten dan berintegritas yang mampu menguatkan karakter kebangsaan di berbagai lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan posisi Lemhannas RI sebagai *leading sector*, proyek ini tidak hanya menjadi upaya strategis dalam menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga



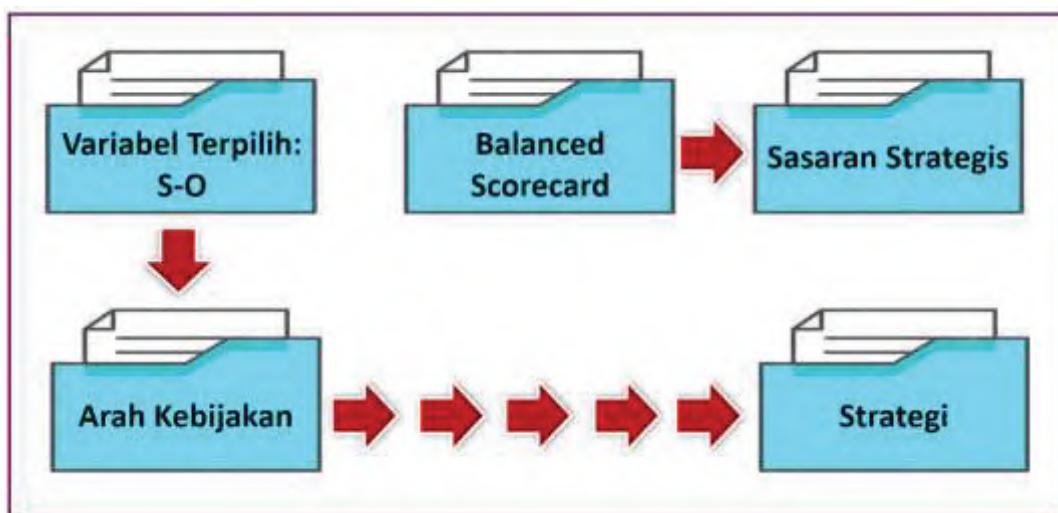
menjadi landasan penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Lemhannas RI

Arah kebijakan dan strategi Lemhannas RI adalah landasan bagi program dan kegiatan yang dirancang untuk memecahkan permasalahan nasional dalam jangka menengah. Fokusnya adalah pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ditetapkan oleh Lemhannas RI, sejalan dengan tugas dan fungsi lembaga ini sebagai *think tank* nasional dalam bidang ketahanan nasional, wawasan kebangsaan, dan ideologi Pancasila. Kebijakan dan strategi tersebut dirancang agar selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang tertuang dalam RPJMN, serta berkontribusi terhadap prioritas pembangunan nasional yang relevan.

Arah kebijakan dan strategi Lemhannas RI merupakan upaya sistematis untuk memecahkan masalah nasional yang berdampak signifikan terhadap ketahanan bangsa. Melalui program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek strategis, Lemhannas RI memastikan bahwa visi dan misi lembaga ini selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.

Gambar 11
Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi



Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi Lemhannas RI didasarkan pada analisis SWOT di Bab I, dengan strategi utama memanfaatkan Kekuatan (*Strengths*) dan Peluang (*Opportunities*) untuk mewujudkan visi-misi Lemhannas RI. Dari variabel S-O terpilih, ditetapkan Arah Kebijakan yang menjadi dasar penyusunan Strategi Lemhannas RI. Selanjutnya, melalui pendekatan *Balanced Scorecard* diperoleh Sasaran Strategis yang terukur dan terintegrasi. Pendekatan ini memastikan strategi dan sasaran Lemhannas RI selaras dengan kebutuhan nasional, mendukung penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan ketahanan nasional secara efektif dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Lemhannas RI yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional.



- 2) Peningkatan pemenuhan kebutuhan akan pemimpin yang cakap dalam menghadapi tantangan nasional dan global.
- 3) Peningkatan kemampuan untuk melakukan kajian strategis berkelas dunia yang mendalam dan komprehensif.
- 4) Penguatan aktivitas dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui edukasi dan publikasi.
- 5) Peningkatan dukungan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan.
- 6) Peningkatan peran strategis Lemhannas RI dalam berkontribusi dalam perumusan kebijakan nasional dan penguatan ketahanan nasional.
- 7) Peningkatan kemampuan untuk melaksanakan pengukuran ketahanan nasional.
- 8) Peningkatan kemampuan untuk melaksanakan pengukuran kepemimpinan nasional.
- 9) Peningkatan kemampuan manajemen dan SDM yang profesional, akuntabel dan transparan.
- 10) Peningkatan kemampuan tatakelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien.

Sepuluh arah kebijakan Lemhannas RI pada periode 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 12 berikut.

Gambar 12
Arah Kebijakan Lemhannas RI 2025-2029



Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Lemhannas RI melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan Strategi sebagai berikut:



- 1) Peningkatan kualitas kurikulum, fasilitas, dan infrastruktur Lemhannas RI untuk mendukung program kepemimpinan nasional.
- 2) Penguatan kapasitas infrastruktur dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mencetak pemimpin yang tangguh menghadapi dinamika global.
- 3) Penguatan pengembangan modul, materi, dan kerjasama yang efektif dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan.
- 4) Peningkatan pengembangan sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk edukasi publik tentang nilai-nilai kebangsaan.
- 5) Peningkatan pengkajian yang mendalam dan komprehensif terkait isu-isu strategis nasional dan internasional.
- 6) Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mendukung peran strategis dalam merumuskan kebijakan nasional dan menguatkan ketahanan nasional.
- 7) Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mendukung peran strategis dalam melaksanakan pengukuran ketahanan nasional
- 8) Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mendukung peran strategis dalam melaksanakan pengukuran kepemimpinan nasional
- 9) Pendidikan dan latihan SDM untuk lebih profesional, akuntabel dan transparan.
- 10) Pendidikan dan latihan SDM tentang tatakelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

Sepuluh Strategi Lemhannas RI pada periode 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 13 berikut.

Gambar 13
Strategi Lemhannas RI 2025-2029





Visi Lemhannas RI yang selaras dengan visi Presiden, yaitu "Mewujudkan Ketahanan Nasional Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini mencerminkan komitmen Lemhannas RI dalam memperkuat ketahanan nasional di tengah dinamika global dan domestik yang semakin kompleks.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Lemhannas RI menjabarkannya ke dalam 5 Misi, 1 Tujuan, 5 Sasaran Strategis, 10 Kebijakan, dan 10 Strategi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22
Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi
Lemhannas RI 2025-2029

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Menyelenggarakan Pendidikan Kepemimpinan Nasional sebagai Pendidikan Puncak yang berintegritas, berkarakter Kebangsaan, Kredibel, dan berkelas Dunia;	Mewujudkan Ketahanan Nasional berbasis hasil Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional yang didukung oleh Lembaga yang kredibel dan berkelas dunia.	Terwujudnya Pendidikan puncak dalam penyelenggaraan pendidikan, penyiapan kader dan pemantapan kepemimpinan nasional;	Peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional.	Peningkatan kualitas kurikulum, fasilitas, dan infrastruktur Lemhannas RI untuk mendukung program kepemimpinan nasional.
				Peningkatan pemenuhan kebutuhan akan pemimpin yang cakap dalam menghadapi tantangan nasional dan global.	Penguatan kapasitas infrastruktur dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mencetak pemimpin yang tangguh menghadapi dinamika global.
2	Menyelenggarakan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) dalam mendukung Ketahanan nasional;		Terwujudnya pengkajian strategik yang bersifat nasional, regional, dan internasional;	Peningkatan kemampuan untuk melakukan kajian strategis berkelas dunia yang mendalam dan komprehensif.	Peningkatan pengkajian yang mendalam dan komprehensif terkait isu-isu strategis nasional dan internasional.
				Peningkatan peran strategis Lemhannas dalam berkontribusi dalam perumusan kebijakan nasional dan penguatan ketahanan nasional.	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mendukung peran strategis dalam merumuskan kebijakan nasional dan menguatkan ketahanan nasional.
3	Menyelenggarakan kajian strategis di bidang Ketahanan Nasional baik yang bersifat nasional, regional maupun global;		Terwujudnya pemantapan nilai-nilai kebangsaan;	Penguatan aktivitas dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan melalui edukasi dan publikasi.	Penguatan pengembangan modul, materi, dan kerjasama yang efektif dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan.
				Peningkatan dukungan dan kesadaran	Peningkatan pengembangan sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
				masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan.	untuk edukasi publik tentang nilai-nilai kebangsaan.
4	Menyelenggarakan pengukuran Indeks Ketahanan Nasional dan Kepemimpinan Nasional;		Terwujudnya pelaksanaan pengukuran ketahanan nasional dan pengukuran kepemimpinan nasional;	Peningkatan kemampuan untuk melaksanakan pengukuran ketahanan nasional	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mendukung peran strategis dalam melaksanakan pengukuran ketahanan nasional
				Peningkatan kemampuan untuk melaksanakan pengukuran kepemimpinan nasional	Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mendukung peran strategis dalam melaksanakan pengukuran kepemimpinan nasional
5	Meningkatkan Kualitas dan Kredibilitas Lembaga di bidang Ketahanan Nasional dengan dukungan Manajemen dan SDM yang Profesional.		Terwujudnya tatakelola pemerintahan Lemhannas RI yang profesional, efektif dan efisien.	Peningkatan kemampuan manajemen dan SDM yang profesional, akuntabel dan transparan.	Pendidikan dan latihan SDM untuk lebih profesional, akuntabel dan transparan.
				Peningkatan kemampuan tatakelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien	Pendidikan dan latihan SDM tentang tatakelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

3.3. Penjabaran Strategi Lemhannas RI

Lemhannas RI menetapkan strategi jangka menengah 2025-2029 untuk memperkuat perannya dalam mencetak pemimpin nasional yang tangguh, memperkuat ketahanan nasional, dan memberikan kontribusi strategis dalam perumusan kebijakan nasional. Strategi ini diawali dengan peningkatan kualitas kurikulum, fasilitas, dan infrastruktur pendidikan, guna memastikan program kepemimpinan nasional yang adaptif terhadap tantangan global dan perkembangan teknologi.

Sejalan dengan itu, Lemhannas RI berkomitmen memperkuat kapasitas infrastruktur dan kelembagaan, sehingga mampu mencetak pemimpin yang memiliki daya tahan terhadap dinamika geopolitik serta transformasi sosial-ekonomi. Untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan, Lemhannas RI akan mengembangkan modul dan materi pembelajaran yang inovatif serta memperluas kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain itu, edukasi publik mengenai nilai-nilai kebangsaan akan diperkuat melalui pengembangan sarana, prasarana, serta kelembagaan yang lebih inklusif dan interaktif. Di bidang kajian strategis, Lemhannas RI akan meningkatkan kajian yang mendalam dan



komprehensif terhadap isu-isu nasional dan global, sehingga hasil kajian dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan publik yang berbasis bukti.

Dalam mendukung peran strategis Lemhannas RI, strategi berikutnya adalah peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan yang mendukung proses perumusan kebijakan nasional serta penguatan ketahanan nasional. Lemhannas RI juga akan mengembangkan mekanisme pengukuran ketahanan nasional dan kepemimpinan nasional, sebagai alat evaluasi strategis untuk memahami tingkat kesiapan bangsa dalam menghadapi tantangan multidimensional.

Di sisi lain, pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, akuntabel, dan transparan menjadi prioritas utama, baik dalam aspek kepemimpinan maupun tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, Lemhannas RI akan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM yang berorientasi pada peningkatan kapasitas birokrasi yang profesional, efektif, dan efisien, guna memastikan tata kelola organisasi yang modern dan berdaya saing tinggi.

Melalui strategi ini, Lemhannas RI bertekad untuk terus beradaptasi dengan perubahan zaman, memperkuat ketahanan nasional, serta menjadi institusi yang mampu mencetak pemimpin visioner yang siap menghadapi tantangan masa depan.

1) Peningkatan kualitas kurikulum, fasilitas, dan infrastruktur Lemhannas RI untuk mendukung program kepemimpinan nasional.

Lemhannas RI berkomitmen meningkatkan kualitas kurikulum, fasilitas, dan infrastruktur guna mendukung program kepemimpinan nasional yang adaptif terhadap dinamika global. Kurikulum akan diperbarui secara berkala agar selaras dengan perkembangan geopolitik, ekonomi, sosial, dan teknologi, memastikan lulusan memiliki wawasan strategis dan kepemimpinan visioner.

Penguatan fasilitas pendidikan dilakukan dengan menyediakan teknologi pembelajaran modern, laboratorium strategis, serta ruang diskusi interaktif yang mendukung metode pembelajaran berbasis studi kasus, simulasi kebijakan, dan *scenario planning*. Infrastruktur pendukung juga akan ditingkatkan, termasuk digitalisasi sistem pembelajaran dan akses terhadap literatur serta data strategis berbasis teknologi informasi.

Selain itu, Lemhannas RI akan memperluas jejaring kerja sama dengan lembaga akademik, institusi riset, serta mitra internasional untuk memperkaya perspektif global dalam program kepemimpinan. Program pelatihan dan pembinaan bagi pengajar serta mentor juga akan diperkuat agar mampu menyampaikan materi secara efektif.

Melalui strategi ini, Lemhannas RI menargetkan lahirnya pemimpin nasional yang memiliki kapasitas intelektual, ketahanan karakter, dan kesiapan strategis dalam menghadapi tantangan bangsa serta mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh.

2) Penguatan kapasitas infrastruktur dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mencetak pemimpin yang tangguh menghadapi dinamika global.

Lemhannas RI berkomitmen memperkuat kapasitas infrastruktur dan kelembagaan guna mencetak pemimpin yang tangguh dalam menghadapi dinamika global. Infrastruktur fisik dan digital akan dikembangkan untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi,



termasuk penguatan sistem informasi strategis, pusat data kebijakan, serta digitalisasi arsip dan sumber daya akademik.

Selain itu, kelembagaan Lemhannas RI akan diperkuat melalui penyempurnaan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi jejaring kerja sama dengan institusi nasional dan internasional. Reformasi birokrasi akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi manajemen kelembagaan, termasuk dalam aspek administrasi, pengelolaan sumber daya, dan mekanisme pengambilan keputusan strategis.

Penguatan kapasitas kelembagaan juga mencakup sinergi dengan berbagai lembaga kebijakan, universitas, serta organisasi internasional, guna memperkaya wawasan kepemimpinan berbasis pengalaman global. Dengan pendekatan ini, Lemhannas RI dapat menciptakan lingkungan akademik yang inovatif, berorientasi pada solusi, serta siap merespons tantangan nasional dan internasional.

Melalui strategi ini, Lemhannas RI menargetkan pemimpin yang memiliki visi strategis, ketahanan intelektual, serta kesiapan menghadapi kompleksitas geopolitik guna memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi perubahan global.

3) Peningkatan pengkajian yang mendalam dan komprehensif terkait isu-isu strategis nasional dan internasional.

Lemhannas RI berkomitmen meningkatkan pengkajian yang mendalam dan komprehensif terhadap isu-isu strategis nasional dan internasional guna memperkuat ketahanan nasional. Untuk itu, Lemhannas akan mengembangkan metode kajian yang berbasis data, analisis strategis, dan pendekatan multidisipliner agar hasil kajian lebih akurat, objektif, serta aplikatif dalam perumusan kebijakan.

Selain itu, Lemhannas RI akan memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga riset, universitas, think tank, serta organisasi internasional guna memperkaya perspektif dalam memahami dinamika geopolitik, ekonomi global, pertahanan, dan keamanan. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inovatif dan sesuai dengan tantangan zaman.

Pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan juga akan ditingkatkan dalam analisis data, pemetaan tren global, serta simulasi skenario kebijakan. Dengan pendekatan ini, Lemhannas RI dapat lebih proaktif dalam mengidentifikasi potensi ancaman maupun peluang strategis bagi Indonesia.

Melalui strategi ini, Lemhannas RI menargetkan penguatan peran sebagai lembaga kajian yang memberikan masukan strategis bagi pemerintah dan pemangku kepentingan, guna mewujudkan kepemimpinan nasional yang tangguh serta kebijakan yang adaptif dalam menghadapi perubahan global.

4) Penguatan pengembangan modul, materi, dan kerjasama yang efektif dalam memantapkan nilai-nilai kebangsaan.

Lemhannas RI berkomitmen memperkuat pengembangan modul, materi, dan kerja sama guna memantapkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan pemimpin nasional dan masyarakat luas. Modul dan materi pembelajaran akan terus diperbarui agar relevan dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, serta tantangan kebangsaan di era globalisasi. Pengembangan ini



mencakup pendekatan multidisipliner, integrasi kajian strategis, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Selain itu, Lemhannas RI akan memperluas kerja sama dengan institusi akademik, lembaga riset, kementerian/lembaga, serta organisasi masyarakat untuk memperkaya perspektif dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan. Kolaborasi dengan mitra internasional juga akan ditingkatkan guna memperkenalkan praktik terbaik dalam membangun nasionalisme dan ketahanan nasional.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran, Lemhannas RI akan mengembangkan metode inovatif, seperti studi kasus, simulasi kebijakan, serta program pendidikan berbasis pengalaman langsung. Kurikulum akan dirancang agar peserta tidak hanya memahami nilai-nilai kebangsaan secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis.

Melalui strategi ini, Lemhannas RI menargetkan terciptanya pemimpin yang memiliki komitmen kuat terhadap persatuan, keadilan, serta ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan global dan domestik.

5) Peningkatan pengembangan sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk edukasi publik tentang nilai-nilai kebangsaan.

Lemhannas RI berkomitmen meningkatkan pengembangan sarana, prasarana, dan kelembagaan guna memperkuat edukasi publik tentang nilai-nilai kebangsaan. Upaya ini dilakukan melalui modernisasi fasilitas edukasi, seperti pusat kajian kebangsaan, ruang multimedia interaktif, serta digitalisasi materi pembelajaran yang dapat diakses luas oleh masyarakat.

Selain itu, Lemhannas RI akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, termasuk platform e-learning, webinar, dan media sosial, untuk menyebarluaskan wawasan kebangsaan secara lebih efektif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Program edukasi publik juga akan diperluas melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media massa, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya persatuan dan ketahanan nasional.

Dalam aspek kelembagaan, Lemhannas RI akan memperkuat sinergi dengan berbagai pihak untuk menciptakan program edukasi yang lebih inklusif dan partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga turut serta dalam penguatan nilai kebangsaan.

Melalui strategi ini, Lemhannas RI menargetkan terwujudnya masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya kebangsaan, memiliki komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, serta mampu berkontribusi dalam menjaga persatuan dan ketahanan nasional di tengah perubahan global.

6) Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mendukung peran strategis dalam merumuskan kebijakan nasional dan menguatkan ketahanan nasional.

Lemhannas RI berkomitmen meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan guna mendukung peran strategis dalam perumusan kebijakan nasional serta penguatan ketahanan nasional. Langkah ini dilakukan dengan modernisasi infrastruktur, seperti



pusat kajian strategis, laboratorium kebijakan, serta sistem informasi yang terintegrasi untuk mempercepat pengolahan dan analisis data strategis.

Dalam aspek kelembagaan, Lemhannas RI akan memperkuat koordinasi dan sinergi dengan kementerian/lembaga, akademisi, serta mitra internasional guna memastikan bahwa setiap rekomendasi kebijakan memiliki dasar ilmiah yang kuat dan relevan dengan dinamika global. Pengembangan kapasitas kelembagaan ini juga mencakup peningkatan efektivitas tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kajian dan perumusan kebijakan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan akan diperluas untuk mendukung pemodelan skenario, simulasi kebijakan, serta pemantauan tren geopolitik dan ekonomi secara *real-time*. Dengan demikian, Lemhannas RI dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih cepat, akurat, dan responsif terhadap tantangan nasional maupun global.

Melalui strategi ini, Lemhannas RI menargetkan terwujudnya kebijakan nasional yang berbasis kajian mendalam serta ketahanan nasional yang lebih adaptif dan tangguh dalam menghadapi dinamika global.

7) Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mendukung peran strategis dalam melaksanakan pengukuran ketahanan nasional.

Lemhannas RI berfokus pada peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan untuk mendukung peran strategis dalam melaksanakan pengukuran ketahanan nasional. Salah satu langkah utama adalah modernisasi fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses pengumpulan, analisis, serta evaluasi data ketahanan nasional. Penguatan sistem informasi yang terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi canggih dan platform digital, memungkinkan Lemhannas RI untuk melakukan analisis secara lebih cepat, akurat, dan komprehensif.

Selain itu, pengembangan kapasitas kelembagaan juga menjadi fokus utama. Lemhannas akan memperkuat koordinasi antara unit-unit internal, serta menjalin sinergi yang lebih baik dengan kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, dan mitra internasional, guna mengoptimalkan proses pengukuran ketahanan nasional. Hal ini mencakup peningkatan keterampilan dan kompetensi SDM, baik dalam bidang analisis data, pengembangan indikator, maupun evaluasi kebijakan.

Lemhannas RI juga akan memperkenalkan metodologi pengukuran yang lebih inovatif dan berbasis bukti, untuk memastikan bahwa pengukuran ketahanan nasional tidak hanya mengukur aspek-aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga dimensi sosial, budaya, serta politik. Dengan strategi ini, Lemhannas RI bertujuan menghasilkan pengukuran ketahanan yang lebih akurat dan relevan, sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna memperkuat ketahanan nasional Indonesia.

8) Peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan Lemhannas RI untuk mendukung peran strategis dalam melaksanakan pengukuran kepemimpinan nasional.

Lemhannas RI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sarana, prasarana, dan kelembagaan guna mendukung peran strategis dalam melaksanakan pengukuran kepemimpinan nasional. Langkah utama yang diambil adalah modernisasi fasilitas pendidikan dan pelatihan, termasuk ruang kelas, laboratorium kepemimpinan, dan sistem



teknologi informasi yang mendukung pengukuran berbasis data. Pengembangan sistem ini memungkinkan Lemhannas RI untuk melakukan evaluasi kepemimpinan dengan lebih akurat dan objektif, serta menyediakan data yang relevan untuk pengambilan keputusan strategis.

Peningkatan kualitas kelembagaan juga menjadi fokus utama, di mana Lemhannas RI akan memperkuat koordinasi antar unit kerja dan meningkatkan kolaborasi dengan lembaga pemerintah, akademisi, serta sektor swasta. Dengan cara ini, proses pengukuran kepemimpinan nasional dapat berjalan lebih efektif dan mencakup berbagai dimensi kepemimpinan yang relevan dalam konteks global.

Selain itu, Lemhannas RI akan terus mengembangkan metodologi pengukuran kepemimpinan yang berbasis bukti, yang tidak hanya mencakup aspek teknis dan kognitif, tetapi juga karakter dan integritas pemimpin. Strategi ini bertujuan agar pengukuran kepemimpinan nasional dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kualitas dan kesiapan pemimpin dalam menghadapi tantangan di tingkat nasional maupun internasional.

9) Pendidikan dan latihan SDM untuk lebih profesional, akuntabel dan transparan.

Lemhannas RI memiliki strategi yang fokus pada pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek operasionalnya. Strategi ini melibatkan perbaikan kurikulum yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, mencakup berbagai bidang seperti kepemimpinan, analisis kebijakan, dan manajemen publik. Pelatihan yang diberikan bertujuan untuk mempersiapkan SDM yang mampu beradaptasi dengan dinamika global serta memenuhi standar kualitas yang tinggi.

Selain itu, Lemhannas RI akan memperkuat metode pelatihan berbasis teknologi, seperti e-learning dan simulasi berbasis digital, untuk mempermudah akses pelatihan secara lebih luas dan efisien. Hal ini juga mendukung prinsip transparansi dalam pembelajaran, di mana peserta dapat mengakses materi dan evaluasi secara terbuka.

Peningkatan kualitas pengawasan internal juga menjadi bagian dari strategi ini. Lemhannas RI akan menerapkan mekanisme evaluasi dan monitoring yang ketat terhadap seluruh program pelatihan untuk memastikan bahwa pelatihan tersebut berjalan sesuai standar yang ditetapkan, serta memberikan hasil yang terukur. Dengan demikian, Lemhannas RI bertujuan agar SDM yang terlatih dapat bekerja dengan lebih profesional, akuntabel, dan transparan dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola yang lebih baik.

10) Pendidikan dan latihan SDM tentang tatakelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien.

Lemhannas RI memiliki strategi yang terfokus pada pendidikan dan pelatihan SDM untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam tatakelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien. Program ini dirancang untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang tidak hanya kompeten dalam menjalankan tugas administrasi, tetapi juga memiliki kemampuan kepemimpinan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.



Strategi ini meliputi penguatan kurikulum yang mencakup materi seputar tata kelola pemerintahan, manajemen birokrasi, serta peraturan dan kebijakan terkini. Selain itu, metode pelatihan yang digunakan akan lebih mengutamakan pendekatan praktis melalui simulasi dan studi kasus yang relevan dengan dinamika pemerintahan saat ini. Dengan pendekatan ini, peserta pelatihan akan dibekali dengan keterampilan untuk mengelola organisasi pemerintah secara lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Lemhannas RI juga memperkenalkan evaluasi berkala dan pengawasan terhadap implementasi pelatihan, memastikan bahwa setiap materi yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelatihan ini bertujuan agar SDM yang terlatih dapat memperbaiki kinerja institusi pemerintah secara menyeluruh, menjadikan birokrasi lebih responsif, efisien, dan efektif dalam melayani publik serta mengelola sumber daya negara.

3.4. Road Map Strategi Lemhannas RI 2025-2029

Road Map Strategi Lemhannas RI 2025-2029 bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Renstra berjalan efektif dan terarah. Fokus perencanaan tahunan ditetapkan untuk memperkuat komitmen seluruh elemen organisasi.

Pada Tahun 2025, fokus pada penguatan fondasi dan kapasitas, termasuk peningkatan infrastruktur dan kualitas kurikulum. Tahun 2026 akan memperkuat program dan kegiatan strategis dengan meningkatkan kualitas pendidikan kepemimpinan dan kajian strategis. Di Tahun 2027, Lemhannas akan mengimplementasikan kebijakan dan program inovatif, guna mendukung peran strategisnya. Tahun 2028 berfokus pada konsolidasi dan penguatan hasil yang telah dicapai, memastikan keberlanjutan program. Akhirnya, di Tahun 2029, Lemhannas akan menekankan pada pemantapan dan keberlanjutan, menjamin pencapaian visi dan misi yang sudah terintegrasi dengan kebijakan nasional. Dengan perencanaan tahunan yang jelas, diharapkan Lemhannas dapat terus berkontribusi pada pengembangan kepemimpinan dan ketahanan nasional. Fokus Lemhannas RI 2025-2029 dijelaskan dalam Gambar 14 di bawah ini.

Gambar 14

Road Map Strategi Lemhannas RI 2025-2029





- 1. Tahun 2025: Penguatan Fondasi dan Kapasitas.** Pada tahun 2025, Lemhannas RI akan fokus pada penguatan fondasi dan kapasitas organisasi. Langkah pertama adalah modernisasi infrastruktur dan teknologi untuk mendukung operasional yang lebih efisien. Selain itu, akan diadakan program pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, baik staf maupun pemimpin. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi juga menjadi prioritas guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Kemitraan strategis dengan institusi nasional dan internasional akan dibangun untuk memperkuat kapasitas dan jaringan kerja Lemhannas RI.
- 2. Tahun 2026: Penguatan Program dan Kegiatan Strategis.** Pada tahun 2026, fokus akan dialihkan pada optimalisasi program pendidikan dengan evaluasi dan peningkatan kurikulum untuk pemimpin nasional. Pengembangan studi strategis akan ditingkatkan dengan melakukan kajian mendalam dan publikasi studi yang dapat digunakan sebagai referensi kebijakan nasional. Sistem pengukuran ketahanan nasional akan diperbaiki dengan peningkatan metodologi dan alat ukur di tingkat pusat dan daerah. Lemhannas RI juga akan mengimplementasikan standar pelayanan yang lebih tinggi di semua unit kerja untuk meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan.
- 3. Tahun 2027: Implementasi Kebijakan dan Program Inovatif.** Tahun 2027 akan menjadi tahun implementasi kebijakan dan program inovatif yang dihasilkan dari studi strategis. Kebijakan publik yang inovatif akan diterapkan untuk mendukung ketahanan nasional. Program khusus untuk pengembangan kapasitas pemimpin nasional dalam menghadapi tantangan global dan domestik akan dilaksanakan. Evaluasi komprehensif terhadap implementasi kebijakan dan program akan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan strategis. Selain itu, mekanisme pengawasan dan pengendalian akan diperkuat untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
- 4. Tahun 2028: Konsolidasi dan Penguatan Hasil.** Pada tahun 2028, Lemhannas RI akan mengonsolidasikan hasil-hasil yang telah dicapai dan mempersiapkan langkah-langkah untuk memperkuat capaian tersebut. Efektivitas organisasi akan ditingkatkan melalui optimalisasi struktur dan proses bisnis. Jaringan kerja dengan institusi nasional dan internasional akan diperluas dan diperdalam untuk memperkuat posisi Lemhannas RI. Inovasi teknologi akan terus diadopsi untuk mendukung kegiatan operasional dan strategis.
- 5. Tahun 2029: Pemantapan dan Keberlanjutan.** Tahun 2029 akan difokuskan pada pemantapan program-program yang telah diimplementasikan, memastikan semua berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Strategi keberlanjutan akan dirancang untuk memastikan program dan kebijakan dapat diteruskan dan dikembangkan di masa depan. Penyusunan Renstra Lemhannas RI 2030-2034 akan dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap Renstra 2025-2029 dan analisis kebutuhan masa depan. Peningkatan ketahanan nasional sebagai hasil dari implementasi strategi selama lima tahun akan diukur dan dipastikan.

Dengan fokus perencanaan tahunan yang jelas ini, diharapkan Lemhannas RI dapat mencapai tujuan strategisnya dengan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam penguatan ketahanan nasional.



3.5. Kerangka Regulasi

Keunikan Lemhannas RI terletak pada posisi kelembagaannya yang memiliki cakupan multidimensi, baik dari aspek sipil maupun militer. Lemhannas RI tunduk pada berbagai regulasi yang mencerminkan karakter uniknya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sebagai lembaga yang menyiapkan kader pemimpin nasional dan merumuskan kebijakan strategis di bidang ketahanan nasional, Lemhannas RI berperan sebagai *melting pot* bagi sipil dan militer. Keberadaannya mendorong integrasi serta sinergi ASN, TNI, dan Polri dalam memperkuat ketahanan nasional yang tangguh dan berkelanjutan.

Dengan tunduk pada tiga payung hukum tersebut, Lemhannas RI menjadi wadah yang unik bagi pengembangan kepemimpinan nasional lintas sektor. Struktur ini memungkinkan koordinasi yang lebih efektif dalam membangun wawasan kebangsaan, memperkuat nasionalisme, serta meningkatkan pemahaman strategis bagi para pemimpin masa depan, baik dari unsur pemerintahan, militer, maupun kepolisian.

Tabel 23

Beberapa Regulasi terkait Kelembagaan Lemhannas RI

No	ASN	TNI	POLRI
1.	UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN	UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri
2.	PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	Perpres No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI	Perpres No. 42 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Anggota Polri
3.	Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	Perpres No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI	Perpres No. 90 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Perpres No. 52 Tahun 2010 tentang SOTK Polri
4.	Permen PANRB No. 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai ASN	Peraturan Panglima TNI No. 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI No. 61 Tahun 2018 tentang Penugasan dan Pembinaan Karier Prajurit dalam Jabatan di Luar Struktur TNI.	Peraturan Polri No. 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Polri No. 4 Tahun 2017 tentang Penugasan Anggota Kepolisian Negara RI di Luar Struktur Organisasi.
5.	Permenpan RB No. 42 Tahun 2021 tentang		



No	ASN	TNI	POLRI
	Jabatan Fungsional Widyaiswara.		
6.	Permenpan RB No. 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti.		

Namun demikian, peraturan perundang-undangan tentang ASN, TNI, dan Polri yang berhubungan dengan kelembagaan Lemhannas RI belum sepenuhnya menggambarkan posisi strategis Lemhannas RI sebagai pusat rujukan dalam bidang ketahanan nasional dan kepemimpinan nasional.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menyiapkan pemimpin nasional serta memberikan rekomendasi kebijakan strategis bagi ketahanan nasional, Lemhannas RI memiliki peran yang kompleks dan multidimensi. Namun, regulasi yang ada masih cenderung menempatkan Lemhannas RI dalam konteks administratif tanpa menegaskan peran fundamentalnya sebagai lembaga pemikir (*think tank*) yang berorientasi pada penguatan wawasan kebangsaan, geopolitik, dan kepemimpinan nasional.

Ketidaaan regulasi yang secara spesifik mengatur peran Lemhannas RI dalam pembangunan kepemimpinan nasional berpotensi menghambat efektivitasnya dalam menjalankan tugas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif guna memastikan bahwa Lemhannas RI dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pusat pengkajian strategis, pendidikan kepemimpinan nasional, dan referensi utama dalam pembentukan kebijakan ketahanan nasional.

Selama ini perkembangan kelembagaan Lemhannas RI tergambar dalam sejarah regulasi pada Tabel 24 berikut.

Tabel 24
Sejarah Regulasi Perkembangan Kelembagaan Lemhannas

No	Regulasi	Tentang
1.	Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 1964	Pembentukan Lembaga Pertahanan Nasional
2.	Peraturan Presiden No. 4 Tahun 1965	Perubahan Beberapa Pasal dari Peraturan Presiden No. 37 Tahun 1964
3.	Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1967	Pemindahan Pengendalian Lembaga Pertahanan Nasional dari Presiden Kepada Menteri Bidang Pertahanan Keamanan
4.	Keputusan Presiden No. 60 Tahun 1983	Pokok-Pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
5.	Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1994	Lembaga Ketahanan Nasional



No	Regulasi	Tentang
6.	Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2001	Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
7.	Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001	Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
8.	Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2002	Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
9.	Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2003	Perubahan atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2002
10.	Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004	Perubahan atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003
11.	Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005	Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004
12.	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005	Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
13.	Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
14.	Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2016	Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia



Untuk mendukung pelaksanaan Renstra Lemhannas RI 2025-2029 dan mengimplementasikan amanat RPJMN 2025-2029 secara efektif, diperlukan perumusan kerangka regulasi yang kuat dan relevan. Kerangka regulasi ini akan memastikan bahwa Lemhannas RI memiliki landasan hukum yang kokoh dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mampu merespons dinamika perubahan strategis, baik di tingkat nasional maupun global.

Regulasi yang diperkuat harus mencakup peran Lemhannas RI sebagai pusat rujukan dalam bidang ketahanan nasional, kepemimpinan nasional, dan pemikiran geopolitik. Selain itu, aspek sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya perlu mendapatkan perhatian, sehingga Lemhannas RI dapat berkontribusi optimal dalam pembentukan kebijakan strategis nasional.

Review dan pembaruan regulasi secara berkala sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi terkini, termasuk perkembangan teknologi, dinamika politik global, serta tantangan ekonomi dan sosial yang berdampak pada ketahanan nasional. Dengan demikian, Lemhannas RI dapat semakin adaptif, inovatif, dan proaktif dalam menjalankan misinya sebagai lembaga yang menyiapkan kepemimpinan nasional dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia di era perubahan yang semakin kompleks. Berikut adalah kerangka regulasi yang dibutuhkan Lemhannas RI 2025-2029.

1. Undang-undang

Penyusunan Undang-undang tentang Ketahanan Nasional bertujuan menjadikan Ketahanan Nasional sebagai Kebijakan Nasional, memberikan landasan hukum yang kuat bagi Lemhannas RI. Undang-undang ini memperkuat peran Lemhannas RI dalam pembangunan nasional, memungkinkan lembaga ini melaksanakan program dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan nasional. Dengan dasar hukum yang jelas, Lemhannas RI dapat lebih efektif dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan upaya ketahanan nasional, memastikan stabilitas dan keamanan negara dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.

2. Peraturan Pemerintah

Penyusunan peraturan pemerintah yang mendetail untuk mengimplementasikan ketentuan dalam undang-undang terkait Lemhannas RI akan mencakup berbagai aspek operasional dan administratif. Peraturan ini bertujuan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI berjalan efektif dan efisien. Dengan peraturan ini, setiap program dan kebijakan strategis Lemhannas RI dapat diimplementasikan secara optimal, mendukung peningkatan ketahanan nasional. Selain itu, peraturan ini akan memberikan panduan yang jelas bagi setiap kegiatan Lemhannas RI, menjamin koordinasi yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tindakan yang diambil oleh lembaga ini..

3. Peraturan Presiden

Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan bertujuan memperkuat integritas dan karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Peraturan ini akan menetapkan pedoman dan kerangka kerja untuk program-program yang mendukung pemahaman dan penerapan nilai-nilai kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan dialog kebangsaan dapat dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis. Hal ini memastikan bahwa setiap warga



negara memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

4. Peraturan Lemhannas RI

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat prinsip bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Peraturan Menteri atau peraturan lembaga (seperti Peraturan Kepala Badan, Peraturan Kepala Lembaga, dll.) merupakan peraturan yang berada pada tingkat di bawah undang-undang dan peraturan pemerintah. Agar peraturan tingkat menteri atau lembaga dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum, ia harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah.

Untuk menterjemahkan dan mengatur lebih lanjut isi dari Undang-undang, PP dan Perpres, sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan, maka perlu diatur dalam Undang-undang, dan/atau PP dan/atau Perpres, bahwa Lemhannas RI diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Lembaga (Lemhannas RI) dan Peraturan Gubernur Lemhannas RI yang dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum.

Peraturan Lemhannas harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Artinya, pembentukan peraturan tersebut harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan di atasnya. Misalnya, jika suatu undang-undang memberikan kewenangan kepada Gubernur Lemhannas untuk mengatur lebih lanjut tentang suatu hal, maka Gubernur Lemhannas RI dapat menerbitkan Peraturan Lemhannas RI untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Peraturan Lemhannas RI tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden. Jika terjadi pertentangan, peraturan yang lebih rendah dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui proses judicial review. Peraturan Lemhannas RI berfungsi sebagai instrumen untuk melaksanakan ketentuan yang lebih umum yang diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Dengan kata lain, peraturan ini bersifat lebih teknis dan operasional, mengatur hal-hal yang lebih detail untuk memastikan pelaksanaan peraturan yang lebih tinggi. Peraturan Lemhannas RI ini, terkait dengan pengaturan perundang-undangan pada kementerian/lembaga lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setara, sehingga dibutuhkan harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya. Peraturan Lemhannas RI merupakan turunan dari aturan di atasnya yang bersifat operasional dan kekhususan kewenangan untuk Lemhannas RI setidak-tidaknya meliputi:

- 1) Peraturan Lemhannas RI tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Lemhannas RI;
- 2) Peraturan Lemhannas RI tentang Kedudukan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Lemhannas RI;



- 3) Peraturan Lemhannas RI tentang Tunjangan Struktural bagi Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Lemhannas RI;
- 4) Peraturan Lemhannas RI tentang Tunjangan Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia di lingkungan Lemhannas RI;
- 5) Peraturan Lemhannas RI tentang Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebagai Tenaga Profesional di Lemhannas RI;
- 6) Peraturan Lemhannas RI tentang Hak Keuangan, Tunjangan dan Fasilitas bagi Tenaga Profesional di Lemhannas RI;
- 7) Peraturan Lemhannas RI tentang Rencana Strategis Lemhannas RI 2025-2029;
- 8) Peraturan Lemhannas RI tentang Indeks Ketahanan Nasional;
- 9) Peraturan Lemhannas RI tentang Standar Kompetensi dan Indeks Kepemimpinan Nasional;
- 10) Peraturan Lemhannas RI tentang Indeks Wawasan Kebangsaan ;
- 11) Peraturan Lemhannas RI tentang Pendidikan dan Pelatihan bagi Pemimpin Nasional di Lemhannas RI;
- 12) Peraturan Lemhannas RI tentang Pelatihan dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan di Lemhannas RI;
- 13) Peraturan Lemhannas RI tentang Pengkajian di Lemhannas RI;
- 14) Peraturan Lemhannas RI tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Ketahanan Nasional;
- 15) Peraturan Lemhannas RI tentang Jabatan Fungsional Pembina Ketahanan Nasional;
- 16) Peraturan Lemhannas RI tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI;
- 17) Peraturan Lemhannas RI tentang Badan Layanan Umum Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional;
- 18) Peraturan Lemhannas RI tentang Tata Kelola dan Manajemen Lemhannas RI di Ibu Kota Nusantara dan Daerah Khusus Jakarta;
- 19) Peraturan Lemhannas RI tentang Kedudukan dan Pemberdayaan Alumni Lemhannas RI;
- 20) Peraturan Lemhannas RI tentang Pemanfaatan Dana Tanggung Jawab Sosial Korporasi dan Dana Riset Pihak Ketiga;
- 21) Peraturan Lemhannas RI tentang Pengelolaan Dana Hasil Penerimaan Bukan Pajak;
- 22) Peraturan Lemhannas RI tentang Hubungan Tata Cara Kerja dan Proses Bisnis Lemhannas RI;
- 23) Peraturan Lemhannas RI tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blower;
- 24) Peraturan Lemhannas RI tentang Pembangunan Integritas dan Lingkungan Kerja yang Bebas dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme;
- 25) Peraturan Lemhannas RI tentang Standar Pelayanan Minimal;



26) Peraturan Lemhannas RI tentang Kode Etik Profesi dan Peraturan Disiplin di Lingkungan Lemhannas RI.

5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI

Penyusunan serangkaian Peraturan Gubernur Lemhannas RI yang spesifik untuk mengatur berbagai aspek strategis dan operasional Lemhannas RI. Peraturan Gubernur Lemhannas RI merupakan turunan dari aturan di atasnya yang bersifat teknis dan berlaku umum dilingkungan Lemhannas RI, setidak-tidaknya meliputi:

- 1) Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Operasionalisasi, Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis Lemhannas RI 2025-2029
- 2) Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Pengisian Jabatan pada Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI
- 3) Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Road Map Strategi Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional 2025-2029
- 4) Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Road Map Strategi Deputi Bidang Pengkajian Strategik 2025-2029
- 5) Peraturan Gubernur tentang Road Map Strategi Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan 2025-2029
- 6) Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Unit Pelayanan Teknis dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lemhannas RI
- 7) Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Tata Cara Kerja Luar Jaringan dan Dalam Jaringan
- 8) Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Hari dan Jam Kerja
- 9) Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Hubungan Tata Cara Kerja dan Proses Bisnis Lemhannas RI
- 10) Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Peraturan Disiplin di lingkungan Lemhannas RI

Dengan adanya kerangka regulasi yang komprehensif ini, Lemhannas RI akan memiliki landasan hukum yang kuat dan relevan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis dalam rangka mencapai visi dan misi lembaga, serta berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional.

3.6. Kerangka Kelembagaan

3.6.1. Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Lemhannas RI 2025-2029 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.



Kerangka kelembagaan Lemhannas RI 2025-2029 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan Sumber Daya Manusia. Dengan struktur, tata laksana, dan sumber daya manusia yang efektif, Lemhannas RI dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, serta terus berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambar 15
Kerangka Kelembagaan Lemhannas RI 2025-2029



Sesuai arahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Lemhannas RI mempunyai tugas membantu Presiden dalam:

- a. menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta mempunyai cakrawala pandang yang universal;
- b. menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden, guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. menyelenggarakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Lemhannas RI menyelenggarakan fungsi:

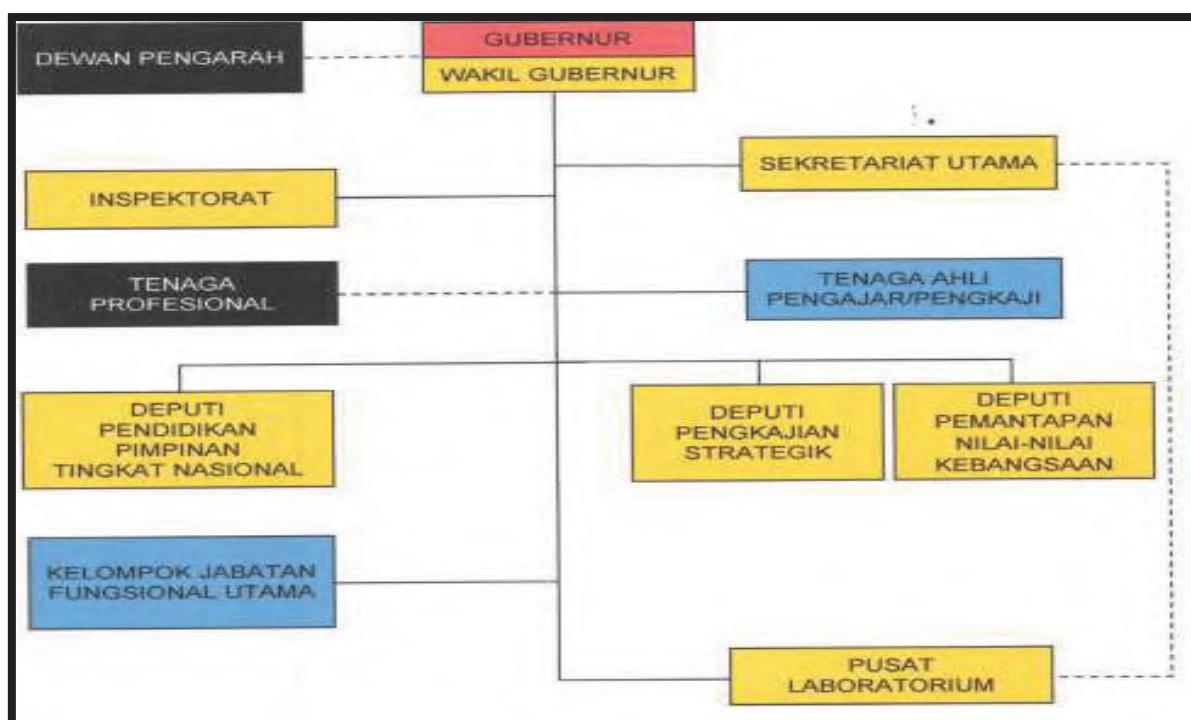
- a. penyelenggaraan pendidikan, penyiapan dan pemantapan pimpinan tingkat nasional;
- b. pengkajian permasalahan strategik nasional, regional, dan internasional di bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan internasional;
- c. pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan sistem nasional serta pembudayaan nilai-nilai kebangsaan;



- d. evaluasi dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan;
- e. pelaksanaan pengukuran ketahanan nasional seluruh wilayah Indonesia;
- f. pelaksanaan pelatihan dan pengkajian bidang kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa;
- g. pelaksanaan kerja sama pendidikan pascasarjana di bidang ketahanan nasional dengan lembaga pendidikan nasional dan/atau internasional, kerja sama pengkajian strategik serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan institusi di dalam dan di luar negeri;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI;
- i. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Lemhannas RI; dan
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Lemhannas RI.

Gambar 16

Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Lemhannas RI saat ini



3.6.2. Rencana Pengembangan Struktur Organisasi

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana arahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, maka setelah melalui evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada, melalui tahapan rasionalisasi, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja, maka kedepannya akan dilakukan perubahan struktur organisasi di Lemhannas RI.



Rencana perubahan Struktur Organisasi yang dibutuhkan Lemhannas RI 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Gubernur dan Wakil Gubernur

Posisi Gubernur dan Wakil Gubernur tetap menjadi pucuk pimpinan tertinggi di Lemhannas RI, bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga, serta mengarahkan kebijakan strategis yang dijalankan oleh seluruh unit di bawahnya.

Dewan Pengarah

Dewan Pengarah berperan penting dalam memberikan arahan dan masukan strategis bagi pengembangan kebijakan dan program Lemhannas RI, memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan visi dan misi lembaga.

Sekretariat Utama

Sekretariat Utama bertugas mendukung pelaksanaan administrasi umum dan keuangan, serta memfasilitasi koordinasi antar unit kerja. Unit-unit di bawah Sekretariat Utama meliputi:

1. Biro Perencanaan: Bertanggung jawab atas perencanaan strategi lima tahun dan perencanaan tahunan, fasilitasi reformasi birokrasi, penataan terkait organisasi dan tata laksana, pemantauan dan evaluasi program kerja serta pengembangan program kerja Lemhannas RI.
2. Biro Umum: Menangani urusan administrasi umum, logistik, dan fasilitas pendukung.
3. Biro Hubungan Masyarakat: Menyelenggarakan urusan komunikasi publik, publikasi, hubungan antar lembaga dan media, pelayanan informasi publik, protokoler dan pelayanan perpustakaan.
4. Biro Kerja Sama dan Hukum: Mengelola kerja sama antar lembaga serta urusan hukum dan peraturan.
5. Biro Telematika: Mengelola sistem informasi dan teknologi komunikasi.
6. Biro Sumber Daya Manusia: Membina dan meningkatkan kompetensi pegawai dan memproyeksikan keberhasilan mereka dalam jabatan tertentu
7. Pusat Sertifikasi Kompetensi Profesi atau Keahlian Pembina Ketahanan Nasional: Mengembangkan dan mengelola sertifikasi kompetensi bagi para pembina ketahanan nasional.
8. Pusat Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional, Ketahanan Daerah, dan Kepemimpinan Nasional: Mengukur dan evaluasi ketahanan nasional dan daerah, serta kepemimpinan.
9. Pusat Data dan Informasi: Pusat Data Lemhannas RI
10. Unit Pelayanan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa: Menyediakan layanan teknis terkait pengadaan barang dan jasa.
11. Unit Pelayanan Teknis Kesehatan/Klinik: Menyediakan layanan kesehatan dan klinik.



Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Deputi ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan program pendidikan kepemimpinan tingkat nasional, dengan unit-unit sebagai berikut:

1. Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan: Mengembangkan program pendidikan dan kurikulum.
2. Direktorat Operasional Pendidikan: Mengelola operasional pelaksanaan pendidikan.
3. Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan: Membina dan mengembangkan peserta pendidikan.
4. Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan: Mengembangkan materi pendidikan dan sistem penilaian peserta.

Deputi Bidang Pengkajian Strategik

Deputi ini berfokus pada pengkajian strategis di berbagai bidang, dengan unit-unit sebagai berikut:

1. Direktorat Program Pengembangan Pengkajian: Mengembangkan program pengkajian strategis.
2. Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik: Mengkaji isu-isu terkait ideologi dan politik.
3. Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam: Mengkaji isu-isu ekonomi dan sumber daya alam.
4. Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi: Mengkaji isu-isu sosial budaya dan demografi.
5. Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi: Mengkaji isu-isu pertahanan, keamanan, dan geografi.

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

Deputi ini bertanggung jawab atas pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dengan unit-unit sebagai berikut:

1. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan: Mengembangkan rencana dan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
2. Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan: Melatih para pelatih pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
3. Direktorat Pembinaan dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan: Membina dan memantapkan nilai-nilai kebangsaan.
4. Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan: Mengelola sosialisasi dan media untuk pemantapan nilai-nilai kebangsaan.



Inspektorat Utama

Inspektorat Utama bertanggung jawab atas pengawasan dan audit internal, dengan dua unit utama:

1. Inspektorat 1: Melaksanakan pengawasan dan audit kinerja serta keuangan.
2. Inspektorat 2: Melaksanakan pengawasan dan audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi ini masih akan terus dibahas dan dikembangkan lebih lanjut sehingga diharapkan dapat mendukung Lemhannas RI dalam mencapai visi dan misinya dengan lebih efektif dan efisien, serta menjawab tantangan yang dihadapi dalam menjaga ketahanan nasional di masa depan.

Tata Laksana

Tata laksana Lemhannas RI mencakup penyelenggaraan pendidikan, pengkajian strategis, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, evaluasi dan pengembangan, pengukuran ketahanan nasional, kerja sama, koordinasi dan dukungan administrasi, serta pengawasan. Setiap bidang berfokus pada pengembangan kader nasional, analisis strategis, dan peningkatan ketahanan nasional, serta kerja sama dengan berbagai institusi.

Tata Laksana Internal

Dalam periode 2025-2029, hubungan kerja yang sinergis dan koordinatif di lingkungan Lemhannas RI akan menjadi landasan utama untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Kerja sama erat antara biro-biro dan pusat serta Unit Pelayanan Teknis di bawah Sekretariat Utama dengan Deputi Pendidikan Kepemimpinan Nasional, Deputi Pengkajian Strategis, dan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan memastikan terciptanya integrasi yang holistik dalam pelaksanaan program dan kegiatan Lemhannas RI.

Sekretariat Utama

Sekretariat Utama akan memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan dan mendukung operasional dan pembinaan seluruh unit kerja di Lemhannas RI. Melalui Biro Perencanaan, Sekretariat Utama akan menyusun rencana strategis dan program kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan masing-masing deputi. Biro ini juga akan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Biro Umum akan memastikan bahwa semua kebutuhan logistik dan administratif dipenuhi dengan efisiensi tinggi, mendukung kegiatan pendidikan, pengkajian, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Biro Hubungan Masyarakat berfungsi sebagai penghubung strategis antara Lemhannas dan publik dengan menyebarluaskan informasi secara efektif dan transparan guna membangun pemahaman, kepercayaan, serta reputasi positif lembaga di tingkat nasional dan internasional.

Biro Kerja Sama dan Hukum akan mengoordinasikan berbagai bentuk kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional, serta memastikan bahwa semua kegiatan Lemhannas RI berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka akan bekerja



erat dengan Biro Telematika untuk mendukung infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing deputi.

Kelompok Jabatan Fungsional akan memberikan kontribusi melalui keahlian khusus mereka dalam berbagai bidang, mendukung tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI dengan profesionalisme yang tinggi. Selain itu, Pusat Sertifikasi Kompetensi Profesi Keahlian Pembina Ketahanan Nasional akan memastikan bahwa setiap pembina ketahanan nasional memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Pusat Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional, Ketahanan Daerah dan Kepemimpinan Nasional akan melakukan pengukuran dan analisis untuk memberikan data yang akurat bagi peningkatan kebijakan ketahanan nasional. Mereka akan bekerja sama dengan Pusat Akreditasi Lembaga Penyelenggara Ketahanan Nasional selain Lemhannas RI untuk memastikan kualitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan ketahanan nasional.

Pusat Penjaminan Mutu Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketahanan Nasional akan menjamin bahwa setiap program dan kegiatan dilaksanakan dengan standar mutu yang tinggi. Sementara itu, Unit Pelayanan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa serta Unit Pelayanan Teknis Kesehatan/Klinik akan mendukung kebutuhan operasional dan kesejahteraan pegawai, sehingga mereka dapat bekerja dengan efisiensi dan kesehatan yang optimal.

Dengan komunikasi yang terbuka dan kolaborasi yang intensif, hubungan kerja yang sinergis dan koordinatif antara Sekretariat Utama dan ketiga deputi ini akan memastikan bahwa Lemhannas RI terus menjadi institusi yang unggul dalam membangun ketahanan nasional Indonesia.

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional akan memainkan peran penting dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin masa depan Indonesia. Kolaborasi dengan Sekretariat Utama Lemhannas RI akan memastikan bahwa setiap aspek administrasi dan logistik mendukung kelancaran pelaksanaan program pendidikan.

Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan akan bekerja sama erat dengan Biro Perencanaan dari Sekretariat Utama untuk menyusun kurikulum dan program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan strategis bangsa. Sinergi dengan Biro Kerja Sama dan Hukum untuk seleksi calon peserta Pendidikan dalam memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai dengan ketentuan serta menjalin kemitraan dengan Lembaga Pendidikan dan organisasi lain, baik didalam maupun diluar negeri.

Direktorat Operasional Pendidikan akan mengoordinasikan pelaksanaan program pendidikan secara efektif, bekerja sama dengan Direktorat Materi dan Penilaian Pendidikan untuk memastikan bahwa materi Pendidikan yang diberikan relevan dan terkini, serta sistem penilaian yang digunakan dapat mengukur capaian peserta didik secara obyektif. Sinergi dengan Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan untuk memastikan kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar serta Biro Hubungan Masyarakat untuk menyebarluaskan informasi terkait program-program pendidikan.



Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan akan berkolaborasi dengan Biro Umum untuk memastikan semua kebutuhan logistic dan fasilitas Pendidikan terpenuhi dengan baik. Kedua Direktorat ini akan bekerja sama dengan Biro Telematika untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran dan evaluasi.

Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penyusunan dan penyiapan perumusan bahan ajaran serta petunjuk teknis, merencanakan dan menyelenggarakan penilaian kegiatan utama, serta penilaian karya tulis peserta, merencanakan dan penyiapan pengumpulan serta pengolahan data dan administrasi peserta Pendidikan Lemhannas RI.

Dalam hubungan dengan Deputi Pengkajian Strategis, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional akan memanfaatkan hasil-hasil kajian strategis sebagai bahan pengembangan kurikulum dan materi pendidikan. Kerja sama ini akan memastikan bahwa program pendidikan yang disusun selaras dengan kebutuhan strategis bangsa dan dinamika global.

Kolaborasi dengan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan memastikan bahwa program pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek kepemimpinan teknis, tetapi juga pada pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Sinergi ini akan membantu menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila, cinta tanah air, dan komitmen terhadap NKRI kepada para peserta didik.

Dalam keseluruhan upaya ini, komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang intensif antara Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional dengan Sekretariat Utama Lemhannas RI, Deputi Pengkajian Strategis, dan Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif dan sinergis. Hal ini akan memastikan bahwa Lemhannas RI dapat melahirkan pemimpin-pemimpin masa depan yang tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan nasional maupun global.

Deputi Bidang Pengkajian Strategik

Deputi Bidang Pengkajian Strategik akan memainkan peran krusial dalam melakukan kajian mendalam terhadap berbagai isu strategis yang berdampak pada ketahanan nasional. Kerja sama erat dengan Sekretariat Utama Lemhannas RI akan memastikan bahwa semua aspek administratif dan logistik mendukung pelaksanaan kajian secara optimal.

Direktorat Program Pengembangan Pengkajian akan bekerja sama dengan Biro Perencanaan dari Sekretariat Utama untuk menyusun program kajian yang relevan dengan kebutuhan strategis bangsa. Sinergi dengan Biro Umum akan memastikan semua kebutuhan logistik dan fasilitas untuk kegiatan pengkajian terpenuhi dengan baik.

Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik akan berkolaborasi dengan Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam, Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi, dan Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi untuk melakukan kajian komprehensif yang mencakup berbagai aspek ketahanan nasional. Mereka akan bekerja sama dengan Biro Hubungan Masyarakat untuk menyebarluaskan hasil-hasil kajian kepada pemangku kepentingan yang relevan.

Kerja sama dengan Biro Kerja Sama dan Hukum akan memastikan bahwa setiap kajian strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang efektif. Selain itu, sinergi dengan Biro Telematika akan memanfaatkan



teknologi informasi untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, dan penyebaran hasil kajian.

Dalam hubungan dengan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Deputi Bidang Pengkajian Strategik akan memanfaatkan hasil-hasil kajian sebagai bahan pengembangan kurikulum dan materi pendidikan. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa program pendidikan yang disusun selaras dengan dinamika strategis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Kerja sama dengan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan memastikan bahwa hasil-hasil kajian dapat digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan di kalangan peserta didik dan masyarakat luas. Sinergi ini akan membantu menanamkan pemahaman yang mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bangsa, serta pentingnya menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Dalam keseluruhan upaya ini, komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang intensif antara Deputi Bidang Pengkajian Strategik dengan Sekretariat Utama Lemhannas RI, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, dan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan sinergis. Hal ini akan memastikan bahwa Lemhannas RI dapat terus menghasilkan kajian-kajian strategis yang berkualitas dan relevan untuk mendukung ketahanan nasional Indonesia.

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan memainkan peran kunci dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan yang esensial bagi ketahanan nasional. Hubungan kerja yang harmonis dengan Sekretariat Utama Lemhannas RI akan memastikan dukungan administratif dan logistik yang optimal untuk setiap program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan bekerja sama erat dengan Biro Perencanaan dari Sekretariat Utama untuk menyusun rencana strategis dan program kerja yang komprehensif. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa semua kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi dan misi Lemhannas RI serta mendukung peningkatan kesadaran dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan.

Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan berkoordinasi dengan Biro Umum untuk memastikan tersedianya fasilitas dan logistik yang dibutuhkan dalam setiap program pelatihan. Kerja sama ini akan menjamin bahwa pelatihan yang diberikan dapat berjalan lancar dan efektif.

Direktorat Pembinaan dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan berkolaborasi dengan Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan sosialisasi yang luas dan efektif. Sinergi dengan Biro Hubungan Masyarakat akan memastikan bahwa informasi terkait program dan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat tersampaikan dengan baik kepada seluruh pemangku kepentingan.

Dalam hubungan dengan Deputi Bidang Pengkajian Strategis, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan memanfaatkan hasil-hasil kajian strategis sebagai dasar pengembangan materi dan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Kolaborasi ini akan



memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan didasarkan pada data dan analisis yang akurat serta relevan dengan situasi dan kondisi terkini.

Kerja sama dengan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional akan memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan diintegrasikan dalam setiap kurikulum dan materi pendidikan kepemimpinan. Sinergi ini akan membantu menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada para peserta didik, sehingga mereka tidak hanya menjadi pemimpin yang kompeten, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

Komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang intensif antara Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan Sekretariat Utama Lemhannas RI, Deputi Bidang Pengkajian Strategis, dan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan sinergis. Hal ini akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia melalui pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Inspektorat Utama

Inspektorat Utama Lemhannas RI, terdiri dari Inspektorat Bidang 1 dan Inspektorat Bidang 2, akan memegang peran penting dalam mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan serta efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI. Mereka akan berkolaborasi dengan berbagai unit untuk mencapai tujuan bersama.

Komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang intensif antara Inspektorat Utama dengan Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Deputi Bidang Pengkajian Strategik, dan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan sinergis. Hal ini akan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilakukan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ketahanan nasional Indonesia melalui tata kelola yang baik dan berintegritas.

Inspektorat Utama akan bekerja sama dengan Sekretariat Utama Lemhannas RI dalam menyiapkan kebijakan pengawasan internal, menyusun kebijakan teknis operasional, dan mengembangkan sistem pengawasan internal. Melalui sinergi dengan Biro Perencanaan, Inspektorat Utama akan memastikan bahwa setiap rencana kerja dan kebijakan yang disusun sejalan dengan standar akuntabilitas dan transparansi yang tinggi.

Biro Umum akan mendukung Inspektorat Utama dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pengawasan. Biro Kerja Sama dan Hukum akan berkolaborasi dalam menyusun kebijakan yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan Biro Telematika akan menyediakan dukungan teknologi informasi untuk memfasilitasi proses pengawasan.

Inspektorat Utama akan berkoordinasi dengan Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional untuk memastikan bahwa pelaksanaan program pendidikan kepemimpinan nasional mematuhi standar dan prosedur yang ditetapkan. Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan, Direktorat Operasional Pendidikan, Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan, dan Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan akan mendapatkan asistensi, konsultasi, dan advokasi dari Inspektorat Utama terkait manajemen risiko dan tata kelola.

Hubungan kerja dengan Deputi Bidang Pengkajian Strategik akan fokus pada pengawasan atas pelaksanaan kajian strategis yang dilakukan oleh Direktorat Program Pengembangan



Pengkajian, Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik, Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam, Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi, dan Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi. Inspektorat Utama akan melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa setiap kajian dilakukan sesuai dengan metodologi yang tepat dan menghasilkan output yang berkualitas.

Kerja sama dengan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan melibatkan pengawasan terhadap program pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Direktorat Pembinaan dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Inspektorat Utama akan memastikan bahwa setiap kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Tata Laksana Eksternal

Dalam periode 2025-2029, hubungan kerja yang sinergis dan koordinatif antara Sekretariat Utama Lemhannas RI, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Deputi Bidang Pengkajian Strategik, dan Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dengan lembaga-lembaga di luar Lemhannas akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan strategis nasional. Kolaborasi yang erat dengan berbagai lembaga akan memastikan program dan kebijakan yang dihasilkan lebih efektif dan berdampak luas.

Hubungan kerja antara Lemhannas RI akan melibatkan koordinasi dalam penetapan kebijakan strategis nasional. Lemhannas akan memberikan masukan dan analisis strategis untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat tertinggi pemerintah. Sinergi ini akan memastikan bahwa program-program Lemhannas sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Presiden.

Lemhannas akan berkoordinasi erat dengan Bappenas dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, serta dengan Kementerian Keuangan dalam memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk program-program strategis. Kerja sama ini akan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Dengan Kementerian PAN RB, Lemhannas akan bekerja sama dalam peningkatan kapasitas aparatur negara melalui program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Sementara dengan Kementerian Dalam Negeri, kolaborasi akan difokuskan pada pemantapan nilai-nilai kebangsaan di tingkat pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Hubungan dengan BPK akan mencakup pengawasan dan audit atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di Lemhannas. Sinergi ini akan memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Kerja sama dengan Markas Besar TNI dan Markas Besar Polri akan melibatkan pengembangan program pendidikan kepemimpinan nasional dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi personel militer dan kepolisian. Kolaborasi ini akan memperkuat sinergi antara lembaga pertahanan dan keamanan dalam menjaga stabilitas nasional.



Lemhannas akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan dan meningkatkan ketahanan daerah. Program pelatihan dan sosialisasi akan dilaksanakan di berbagai daerah untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan kedutaan besar negara sahabat, Lemhannas akan menjalin hubungan kerja sama dalam bidang pendidikan, kajian, dan pengembangan kebijakan strategis. Pertukaran informasi dan best practices akan membantu Lemhannas dalam mengembangkan program yang lebih komprehensif dan relevan secara global.

Hubungan dengan perguruan tinggi akan mencakup kerja sama dalam penelitian, pengembangan kurikulum, dan program pendidikan kepemimpinan. Kolaborasi ini akan memastikan bahwa Lemhannas selalu up-to-date dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

Melalui hubungan kerja yang sinergis dan koordinatif dengan berbagai lembaga eksternal ini, Lemhannas RI akan mampu memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan visi serta misinya dengan lebih efektif. Kolaborasi yang terjalin akan memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dihasilkan memberikan dampak positif yang luas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sumber Daya Manusia

Dalam Renstra Lemhannas RI 2025-2029, yang sejalan dengan Kerangka Pikir RPJMN 2025-2029, salah satu prioritas utama dalam Program Presiden Trisula Pembangunan ke-3, yaitu SDM Berkualitas, adalah pengembangan kualitas SDM Lemhannas RI. Upaya pengembangan kualitas SDM ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Deputi Bidang Pengkajian Strategik, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, serta Inspektorat Utama.

Pengembangan kualitas SDM Lemhannas RI dalam Renstra 2025-2029 akan memastikan bahwa setiap unit di Lemhannas mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien. Dengan SDM yang kompeten dan profesional, Lemhannas RI akan lebih siap menghadapi tantangan dan dinamika nasional serta internasional, dan mampu memberikan kontribusi maksimal dalam mewujudkan visi dan misi Lemhannas RI sebagai lembaga yang terdepan dalam penguatan ketahanan nasional.

Sekretariat Utama Lemhannas RI akan fokus pada peningkatan kapasitas biro-biro dan pusat-pusat di bawahnya melalui program pelatihan yang intensif dan berkelanjutan. Biro Perencanaan akan didorong untuk mengembangkan keterampilan analisis strategis dan perencanaan berbasis data. Biro Umum dan Biro Telematika akan meningkatkan kemampuan dalam manajemen teknologi informasi dan administrasi umum untuk mendukung operasional yang lebih efisien. Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kerja Sama dan Hukum akan memperkuat kapasitas dalam komunikasi strategis dan kerja sama internasional. Pusat-pusat seperti Pusat Sertifikasi Kompetensi Profesi dan Pusat Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional akan fokus pada peningkatan keahlian spesifik yang relevan dengan tugas mereka.

Di bawah Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, pengembangan SDM akan difokuskan pada peningkatan kapasitas instruktur dan pengelola program pendidikan kepemimpinan. Direktorat Program dan Pengembangan Pendidikan akan mengembangkan kurikulum yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan kepemimpinan nasional masa depan.



Direktorat Operasional Pendidikan dan Direktorat Pembinaan Peserta Pendidikan akan memperkuat manajemen operasional dan pembinaan peserta melalui pelatihan berbasis kompetensi. Direktorat Materi dan Penilaian Peserta Pendidikan akan meningkatkan kemampuan dalam merancang materi pelatihan yang interaktif dan metode evaluasi yang efektif.

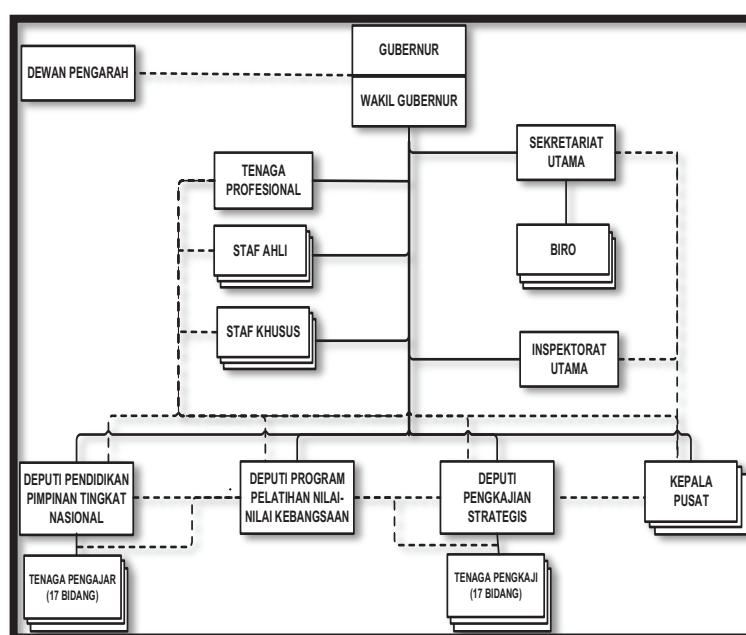
Pengembangan SDM di Deputi Bidang Pengkajian Strategik akan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas analisis di berbagai bidang strategis. Direktorat Program Pengembangan Pengkajian akan fokus pada metodologi kajian dan pengembangan program pengkajian yang inovatif. Direktorat Pengkajian Ideologi dan Politik, Direktorat Pengkajian Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam, Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi, dan Direktorat Pengkajian Pertahanan Keamanan dan Geografi akan memperkuat keahlian dalam analisis kebijakan, studi komparatif, dan pengembangan skenario strategis.

Untuk Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, pengembangan SDM akan difokuskan pada peningkatan keterampilan dalam menyampaikan dan mempromosikan nilai-nilai kebangsaan. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan mengembangkan program yang efektif dan inklusif. Direktorat Pelatihan Untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Direktorat Pembinaan dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan meningkatkan kapasitas para pelatih dan pembina melalui pelatihan intensif dan program mentoring. Direktorat Sosialisasi dan Media Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan mengoptimalkan penggunaan media untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan dengan cara yang kreatif dan inovatif.

Di Inspektorat Utama, pengembangan SDM akan diarahkan pada peningkatan kompetensi dalam pengawasan, audit, dan evaluasi. Inspektorat Bidang 1 dan Inspektorat Bidang 2 akan memperkuat kemampuan dalam melakukan audit kinerja, audit keuangan, dan audit kepatuhan. Program pelatihan akan mencakup peningkatan keahlian dalam manajemen risiko, analisis data, dan teknik-teknik pengawasan modern.

Gambar 17

Konsep Revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Lemhannas RI





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN





Bab IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lemhannas RI dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Lemhannas RI menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada Tabel 25 berikut:

Tabel 25

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Lemhannas RI 2025-2029

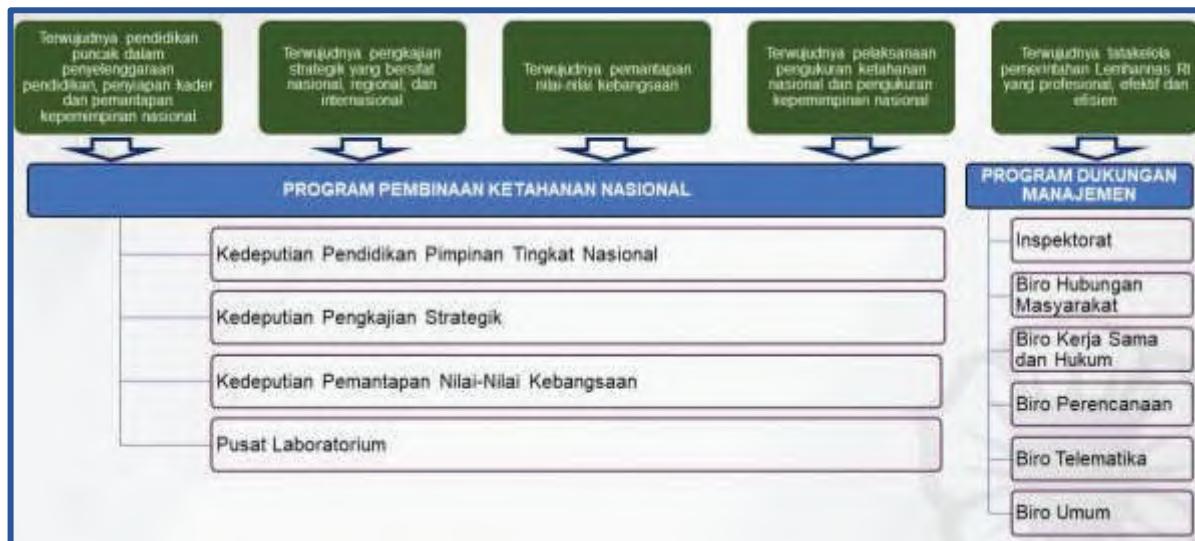
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Pendidikan Puncak dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penyiapan Kader dan Pemantapan Kepemimpinan Nasional.	Indeks Kompetensi Kepemimpinan Nasional	85	85,5	86	86,5	87
Terwujudnya Pengkajian Strategik yang bersifat Nasional, Regional, dan Internasional.	Indeks Rekomendasi Kajian Strategis (IRK)	86	87	88	89	90
Terwujudnya pemantapan nilai-nilai kebangsaan	Indeks Aktualisasi Nilai-Nilai Kebangsaan	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8
Terwujudnya pelaksanaan Pengukuran Ketahanan Nasional dan Pengukuran Kepemimpinan Nasional.	1. Jumlah Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/PD) yang memanfaatkan IKN setiap tahun.	20%	40%	50%	75%	95%
	2. Termanfaatkannya hasil pengukuran kepemimpinan nasional oleh pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan di daerah.	0	0	0	0	1
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Lemhannas RI yang profesional, efektif dan efisien.	Indeks Reformasi Birokrasi	75	76	77	78	79



Tabel 25 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Lemhannas RI tahun 2025-2029. Sasaran Strategis tersebut terbagi dalam dua Program yang ada di Lemhannas RI yaitu Program Pembinaan Ketahanan Nasional dan Program Dukungan Manajemen.

Gambar 18

Perjenjangan Sasaran Strategis pada Program di Lemhannas RI



Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1. Kegiatan dalam Program Pembinaan Ketahanan Nasional

Lemhannas RI memiliki peran sentral dalam melaksanakan program pembinaan ketahanan nasional melalui fungsi pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan serta pengukuran ketahanan dan kepemimpinan nasional. Sebagai lembaga strategis di bawah Presiden, Lemhannas RI bertugas menyiapkan kader pimpinan nasional yang memiliki integritas, wawasan kebangsaan, dan visi kenegaraan yang kuat. Melalui berbagai program pendidikan dan pengkajian strategis, Lemhannas RI mendorong terciptanya pemimpin yang mampu menghadapi tantangan global, menjaga kedaulatan, serta mewujudkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, Lemhannas RI tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan pemikiran kebangsaan, tetapi juga sebagai motor penggerak pembinaan ketahanan nasional secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, Lemhannas RI mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan kajian akademis serta pendekatan multidisiplin untuk memperkuat ketahanan nasional pada seluruh dimensi kehidupan. Program pembinaan ini mencakup penguatan ideologi Pancasila, wawasan nusantara, serta ketahanan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Selain itu, Lemhannas RI juga menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan mitra internasional melalui nota kesepahaman (MoU) untuk memperluas cakupan pembinaan dan memperkuat daya saing bangsa di tengah dinamika global.



Tabel 26

Sasaran dan Indikator Program Pembinaan Ketahanan Nasional Lemhannas RI 2025-2029

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Kualitas Pimpinan Tingkat Pusat dan Daerah dalam Membina Ketahanan Nasional.	Performa Pimpinan tingkat pusat dan daerah dalam membina ketahanan nasional*.	85,34-89,87	85,88-90,41	86,43-90,97	86,99-91,52	87,55-92,08	Nilai
Meningkatkan Kapabilitas Ketahanan Nasional bagi Pimpinan Nasional.	Kompetensi Pimpinan Nasional dalam membina Ketahanan Nasional.	85	85,5	86	86,5	87	Nilai
Performa Kajian Strategis yang Efektif dan Kredibel.	Indeks Program Kajian Strategis (IPKS).	86	87	88	89	90	Nilai
Terbentuknya Komponen Bangsa yang memahami dan mengimplementasikan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa	Peningkatan kesadaran dan pemahaman Nilai-Nilai kebangsaan.	84	85	86	87	88	Nilai
Terukurnya Indeks Ketahanan Nasional	1. Tersajinya Indeks Ketahanan Nasional pada Level Nasional dan Provinsi	39	39	39	39	39	Rekomendasi
	2. Pengembangan Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional yang Updated	1	1	1	1	1	Rekomendasi
Terwujudnya Basis Data Kompetensi Kepemimpinan Nasional yang Kredibel dan akuntabel.	Indeks Kualitas Data Kompetensi Kepemimpinan Nasional.	0	8	8,2	8,4	8,5	Nilai



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Terukurnya Indeks Kepemimpinan Nasional.	1. Tersusunnya Instrumen Pengukuran Kepemimpinan Nasional.	1	1	1	1	1	Dokumen
	2. Terselenggaranya pengukuran kepemimpinan nasional secara periodik dan berkelanjutan	1	1	1	1	1	Dokumen

*) Indikator Penugasan RPJMN 2025-2029 kepada Lemhannas RI

1. Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional

Kemampuan Lemhannas RI dalam menghasilkan calon pimpinan tingkat nasional selama periode 2020-2024 menunjukkan hasil yang masih terbatas. Berdasarkan data yang ada, selama lima tahun terakhir, Lemhannas RI hanya berhasil meluluskan 780 peserta dari Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) yang terdiri dari 8 angkatan. Selain itu, program lain yang juga dilaksanakan adalah Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) yang menghasilkan 140 peserta dari 2 angkatan. Sehingga total lulusan dari kedua program ini selama lima tahun terakhir mencapai 920 orang.

Meskipun angka ini sudah cukup signifikan, namun masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan strategis bangsa dalam mencetak pemimpin nasional yang berkualitas dan visioner. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kapasitas infrastruktur pendidikan yang belum optimal, kualitas kurikulum yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, keterbatasan anggaran serta metode pengajaran yang masih bisa ditingkatkan.

Tabel 27

Peserta Program Pendidikan Kepemimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI 2020-2024

NO	TAHUN	PPRA		PPSA		SATUAN
		ANGKATAN	JUMLAH	ANGKATAN	JUMLAH	
1.	2020	60	100	-	-	Orang
		61	100	-	-	Orang
2.	2021	62	80	23	60	Orang
3.	2022	63	100	-	-	Orang
		64	100	-	-	Orang
4.	2023	65	100	24	80	Orang
5.	2024	66	100	-	-	Orang



		67	100	-	-	Orang
	Jumlah		780		140	Orang

Dalam periode 2025-2029, Lemhannas RI telah merumuskan rencana strategis untuk mengatasi keterbatasan ini dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam menghasilkan lulusan yang lebih banyak dan berkualitas. Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) disempurnakan menjadi program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N), sedangkan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) disempurnakan menjadi program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N).

Target yang ditetapkan adalah untuk meningkatkan jumlah lulusan dari program P4N dan P3N menjadi dua kali lipat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dalam lima tahun ke depan, Lemhannas RI berencana meluluskan 1.100 peserta dari 10 angkatan P4N dan 800 peserta dari 10 angkatan P3N, sehingga total lulusan yang dihasilkan mencapai 1.900 orang. Sehingga dalam satu tahun, dilaksanakan 2 angkatan P4N masing-masing 110 peserta dalam satu angkatan, dan 2 angkatan P3N masing-masing 80 peserta dalam satu angkatan.

Sesuai dengan RPJMN 2025-2029, program P4N Lemhannas RI berkontribusi pada Asta Cita 1 dan Asta Cita 8. Program P4N juga berkontribusi pada indikator **Performa Pimpinan tingkat Pusat dan Daerah dalam membina Ketahanan Nasional** dimana Lemhannas RI sebagai pengampu indikator ini.

Tabel 28

Target Kinerja Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Terselenggaranya Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N)	Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N)	80	80,5	81	81,5	82	Nilai
Terselenggaranya Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N)	Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N)	80	80,5	81	81,5	82	Nilai
Terselenggaranya kegiatan perencanaan program Pendidikan	Terlaksananya kegiatan perencanaan program Pendidikan	11	11	11	11	11	Kegiatan



Untuk mencapai tujuan tersebut, Lemhannas RI akan melaksanakan sejumlah strategi utama. *Pertama*, peningkatan kapasitas infrastruktur pendidikan akan menjadi fokus utama. Fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya akan ditingkatkan untuk mendukung peningkatan jumlah peserta didik. Selain itu, teknologi pendidikan terkini akan diintegrasikan dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan.

Kedua, Lemhannas RI akan terus memperbarui kurikulum dan metode pengajaran agar tetap relevan dengan perkembangan dinamika nasional dan global. Kurikulum yang *up-to-date* serta metode pengajaran yang inovatif seperti *blended learning*, simulasi, dan studi kasus yang relevan akan diadopsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kurikulum dan silabus Pendidikan akan selalu dikaitkan dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI.

Ketiga, pengembangan kapasitas pengajar dan tenaga kependidikan juga akan menjadi prioritas. Program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan akan disediakan bagi para pengajar dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme mereka. Selain itu, kerjasama dengan institusi pendidikan terkemuka di dalam dan luar negeri akan diperkuat untuk pertukaran pengajar dan pengembangan kapasitas.

Keempat, proses rekrutmen dan seleksi peserta akan diperketat dan diperbaiki. Standar seleksi yang lebih tinggi akan diterapkan untuk memastikan hanya kandidat terbaik yang diterima dalam program P4N dan P3N. Selain itu, diversifikasi latar belakang peserta akan diupayakan agar lingkungan belajar menjadi lebih kaya dan beragam. Komposisi peserta dalam satu angkatan P4N dan P3N dilaksanakan secara proporsional terdiri dari unsur TNI-Polri dan dari unsur ASN (Kementerian/Lembaga dan Akademisi) maupun non ASN (swasta, partai politik, akademisi/keagamaan, sosial budaya/kepemudaan/profesi).

Kelima, pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman akan ditingkatkan. Program kunjungan lapangan akan diperbanyak untuk memberikan pengalaman praktis kepada peserta. Selain itu, program studi banding internasional akan diperluas untuk memperluas wawasan peserta tentang praktik kepemimpinan global.

Dengan implementasi strategi-strategi tersebut, Lemhannas RI yakin dapat mencapai target peningkatan jumlah lulusan yang lebih banyak dan berkualitas dalam periode 2025-2029. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mencetak lebih banyak calon pemimpin nasional yang siap menghadapi tantangan dan dinamika masa depan, berkontribusi terhadap Visi Indonesia Emas 2045.

2. Pengkajian Strategik Ketahanan Nasional

Dalam rangka menjalankan tugas pokoknya sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Lemhannas RI memiliki mandat strategis untuk melaksanakan pengkajian yang bersifat komprehensif, mendalam, serta visioner terkait isu-isu ketahanan nasional. Fungsi pengkajian strategik ini menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung upaya penyusunan kebijakan yang tepat, efektif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Dengan kedudukan tersebut, Lemhannas RI tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan nasional, tetapi juga sebagai pusat pemikiran strategis (*strategic think tank*) yang memberikan masukan objektif kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait melalui penyusunan naskah Kajian (*policy paper*),



rekомендasi (*policy brief*) dan naskah Lembayung untuk Komisi terkait di DPR RI, serta mitigasi risiko dampak perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang secara langsung memengaruhi ketahanan nasional.

Pengkajian strategik yang dilaksanakan oleh Lemhannas RI mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan, yang keseluruhannya dikaji dalam kerangka ketahanan nasional. Di samping itu, aspek geostrategis yang berkaitan erat dengan posisi Indonesia dalam pergauluan internasional juga menjadi perhatian penting, mengingat keterkaitan erat antara dinamika global dengan kepentingan nasional. Dengan pendekatan multidisiplin, integratif, dan berbasis data, Lemhannas RI senantiasa berupaya menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan konstruktif dengan analisis mendalam dan rekomendasi kebijakan yang berbasis prediksi masa depan (*foresight*) bagi pengambilan keputusan tingkat tinggi. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan yang bernilai strategis bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat daya saing bangsa, serta mengantisipasi berbagai tantangan dan peluang yang muncul di era globalisasi dan revolusi teknologi.

Tabel 29

Target Kinerja Pengkajian Strategik Ketahanan Nasional 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Kualitas Kajian Strategis Ketahanan Nasional Bidang Ideologi dan Politik	Indeks Kajian Bidang Ideologi dan Politik	86	87	88	89	90	Nilai
Meningkatnya Kualitas Kajian Strategis Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam	Indeks Kajian Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam	86	87	88	89	90	Nilai
Meningkatnya Kualitas Kajian Strategis Ketahanan Nasional Bidang Sosial Budaya dan Demografi	Indeks Kajian Bidang Sosial dan Budaya Demografi	86	87	88	89	90	Nilai
Meningkatnya Kualitas Kajian Strategis Ketahanan Nasional Bidang Pertahanan Keamanan dan Geografi	Indeks Kajian Bidang Pertahanan Keamanan dan Geografi	86	87	88	89	90	Nilai
Meningkatnya Indeks Perencanaan Kajian	Indeks Perencanaan Kajian	86	87	88	89	90	Nilai



Untuk mencapai tujuan tersebut, Lemhannas RI akan melaksanakan sejumlah strategi utama. *Pertama*, Lemhannas RI perlu senantiasa memperkuat kerangka konseptual dan metodologi kajian strategik yang digunakan. Hal ini dilakukan melalui pemutakhiran pendekatan ilmiah, pemanfaatan data yang valid dan terkini, serta penggunaan metode analisis multidisiplin yang integratif. Dengan demikian, hasil kajian yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, prediktif, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah.

Kedua, dalam menghadapi perkembangan era digital dan pemerintahan yang berbasis teknologi (*government technology*), perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi akan mempercepat proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data strategis sehingga hasil kajian dapat lebih akurat, komprehensif, dan relevan dengan dinamika lingkungan strategis yang terus berubah.

Ketiga, untuk memperoleh sudut pandang yang luas dan mendalam, Lemhannas RI perlu mengembangkan jejaring kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Kerja sama ini dapat dilakukan dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, *think tank* internasional, dan sektor swasta. Kolaborasi ini bertujuan memperkaya perspektif, meningkatkan kualitas hasil kajian, serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan geopolitik global.

Keempat, kualitas hasil kajian sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakannya. Oleh karena itu, Lemhannas RI perlu terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga pengkaji melalui pendidikan, pelatihan, *workshop* dan program pengembangan keahlian pengkajian strategis ketahanan nasional baik oleh internal Lemhannas maupun bekerja sama dengan institusi lain yang kredibel baik di dalam dan di luar negeri. Selain itu, dibutuhkan pula penanaman nilai integritas, independensi, serta wawasan kebangsaan yang kuat sehingga hasil kajian yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan nasional.

Kelima, agar hasil kajian dapat memberikan manfaat nyata, diperlukan strategi yang berfokus pada diseminasi dan pemanfaatannya. Lemhannas RI perlu memastikan bahwa hasil kajian disajikan dalam format yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh Presiden maupun Kementerian/Lembaga terkait. Selain itu, perlu dibangun mekanisme umpan balik untuk menilai sejauh mana rekomendasi yang diberikan diimplementasikan dalam kebijakan. Dengan demikian, hasil pengkajian tidak hanya menjadi dokumen akademis, tetapi juga instrumen strategis dalam mendukung pengambilan keputusan nasional berdasarkan Prioritas Presiden dan Wakil Presiden sehingga menjadi daya ungkit pada nilai Reformasi Birokrasi Tematik Lemhannas RI.

Keenam, didalam mengembangkan dan mempublikasikan ide-ide para pakar dan peneliti di bidang Ketahanan Nasional melalui jurnal Internasional Ketahanan Nasional yang terindeks *Scopus*, disamping itu Kedeputian Pengkajian Strategik juga mengembangkan dan membina suatu forum komunikasi Ketahanan Nasional (forkom Tannas) antara Lemhannas RI sebagai Pembina Ketahanan Nasional bekerja sama dengan Kementerian Dikti Saintek, Kementerian PAN RB dan forum rektor Universitas baik negeri dan swasta serta Kementerian/Lembaga terkait yang membidangi lahirnya program studi Ketahanan Nasional di berbagai Universitas di Indonesia.



Dengan implementasi strategi-strategi tersebut, Lemhannas RI dapat mencapai target peningkatan jumlah rekomendasi kebijakan yang lebih banyak dan berkualitas dalam periode 2025-2029. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang strategis bagi pengambil kebijakan dalam menghadapi tantangan dan dinamika masa depan dengan lebih baik.

3. Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan

Lemhannas RI memiliki peran strategis dalam menjaga dan memperkokoh ketahanan nasional. Salah satu tugas pokok yang diemban adalah melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Tugas ini dilaksanakan melalui proses internalisasi, aktualisasi, dan pembinaan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Pemantapan nilai-nilai kebangsaan tersebut dimaksudkan untuk menjaga konsistensi arah perjuangan bangsa, memperkuat integrasi nasional, serta membangun landasan moral, etika, dan ideologi yang kokoh di tengah dinamika perkembangan zaman.

Fungsi pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dijalankan Lemhannas RI dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, sosialisasi, dan berbagai program strategis lainnya yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Sasaran dari program tersebut mencakup seluruh komponen bangsa yang meliputi penyelenggara negara, aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, hingga generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa. Dengan pendekatan multidisiplin, komprehensif dan metode pembelajaran orang dewasa (andragogi), Lemhannas RI tidak hanya menyampaikan materi mengenai wawasan kebangsaan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, rasa memiliki, serta semangat bela negara yang kuat sehingga nilai-nilai kebangsaan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya masing-masing. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan kebangsaan yang semakin kompleks, baik berupa ancaman disintegrasi, penetrasi budaya asing, perkembangan teknologi informasi, maupun perubahan sosial dan politik global yang dapat memengaruhi kohesi bangsa.

Program ini secara langsung mendukung penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang merupakan Misi 1 Astacita dan Prioritas Nasional 1 RPJMN 2025-2029. Pentingnya wawasan kebangsaan dalam menjaga persatuan dalam keberagaman, mencegah konflik sosial, dan membangun identitas bangsa yang kuat telah diakui secara luas sebagai landasan utama ketahanan nasional. Kondisi saat ini menunjukkan urgensi yang mendesak untuk program ini. Data dan fakta mengindikasikan masih lemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan di kalangan masyarakat, ditandai dengan maraknya ujaran kebencian, serta adanya penurunan indeks ketahanan nasional pada gatra tertentu yang berhubungan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Penurunan ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna membalikkan tren negatif tersebut. Lemhannas telah melakukan evaluasi dampak program pemantapan nilai-nilai kebangsaan dan secara aktif mencari masukan dari alumni untuk perbaikan di masa mendatang, menunjukkan komitmen terhadap efektivitas program.

Dalam pelaksanaannya, Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI menekankan pentingnya konsistensi, inovasi, dan adaptabilitas agar nilai-nilai kebangsaan tetap relevan dengan perkembangan masyarakat. Metode kegiatan yang partisipatif,



penggunaan teknologi digital, serta pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan demikian, nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh komponen bangsa. Pada akhirnya, pelaksanaan tugas dan fungsi pemantapan nilai-nilai kebangsaan oleh Lemhannas RI diharapkan dapat melahirkan generasi bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas tinggi, memiliki wawasan kebangsaan yang utuh, serta mampu menjadi penggerak utama dalam memperkuat ketahanan nasional dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam periode 2025–2029, Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI akan melaksanakan beberapa kegiatan strategis dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa. Pada pembinaan dan pelaksanaan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, akan dihasilkan 5.151 orang agen perubahan dari seluruh lapisan masyarakat yang tersebar pada seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, akan dilaksanakan Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi kepala daerah yang terpilih serta Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Anggota DPRD Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Selanjutnya, Training of Trainer (ToT) Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan akan digelar dengan sasaran dari kalangan guru, dosen, widyaiswara, atau pengajar lainnya, khususnya yang mengampu mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, dan bidang lain yang relevan. Pada rentang waktu 2025–2029, ditargetkan minimal terdapat 50 orang lulusan ToT aktif di setiap provinsi, sehingga secara keseluruhan akan tercapai 1.900 orang lulusan ToT yang dapat menjadi ‘kepanjangan tangan’ Lemhannas RI dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan.

Selain itu, akan dilaksanakan Gebyar Wawasan Kebangsaan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan memanfaatkan momentum hari-hari besar nasional untuk menggelorakan kembali semangat kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan, serta program Lemhannas RI Goes to Campus yang bertujuan membangun komunikasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan sivitas akademika di berbagai perguruan tinggi melalui sosialisasi dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan kepada mahasiswa.

Sebagai terobosan baru di era digital, Lemhannas RI juga meluncurkan program Algoritma Kebangsaan, yaitu inisiatif penyebarluasan nilai-nilai kebangsaan melalui berbagai platform internet dan media sosial dengan memanfaatkan konten digital yang kreatif, interaktif, dan adaptif terhadap tren generasi muda. Program ini mengintegrasikan pendekatan edutainment dan digital storytelling untuk menanamkan semangat nasionalisme di ruang-ruang digital, melibatkan kolaborasi dengan content creator, komunitas digital, serta jejaring alumni Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan sebagai agen-agen kebangsaan di dunia maya.

Dengan keseluruhan rangkaian program tersebut, total target output Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan pada tahun 2025–2029 mencapai 19.600 orang, sekaligus memperluas jangkauan penguatan nilai-nilai kebangsaan, baik secara langsung maupun melalui transformasi digital yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan RPJMN 2025-2029, program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Training of Trainer Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, Dialog Wawasan Kebangsaan, dan Lemhannas RI Goes to Campus turut berkontribusi terhadap Asta Cita 1, Asta Cita 2 dan Asta Cita 8. Program Training of Trainer (ToT) Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan juga berkontribusi pada indikator



Performa Pimpinan tingkat Pusat dan Daerah dalam membina Ketahanan Nasional dimana Lemhannas RI sebagai pengampu indikator ini.

Tabel 30

Target Kinerja Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Kualitas Rencana dan Program Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Terwujudnya kegiatan perencanaan dan pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	15	23	26	29	32	Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana dan Pembinaan serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pembinaan serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	200	800	1000	1200	1952	Orang
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pelatihan untuk Pelatih/Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	Tingkat partisipasi pimpinan pusat, daerah dan tenaga pendidik dalam Pelatihan untuk Pelatih/Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	300	800	850	850	1000	Orang
Meningkatnya Kualitas Rencana dan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1000	4500	4600	4700	4800	Orang

Untuk mencapai tujuan tersebut, Lemhannas RI akan melaksanakan sejumlah strategi utama. Pertama, digitalisasi literasi kebangsaan dengan mengoptimalkan media sosial, platform edukasi daring, dan algoritma kebangsaan untuk memperkuat wawasan kebangsaan generasi muda.

Kedua, penguatan komunikasi, kolaborasi, dan sinergitas lintas sektor dengan tokoh masyarakat, akademisi, komunitas, influencer, dll. agar internalisasi nilai-nilai kebangsaan dapat menjangkau lebih luas, inklusif, dan relevan dengan konteks sosial budaya kontemporer.

Ketiga, Inovasi program kebangsaan dengan pendekatan partisipatif, seperti diskusi publik, simulasi kebijakan, dan pelibatan aktif pelajar/mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan kebangsaan untuk mencetak agen perubahan.

Keempat, memperkuat substansi kurikulum serta materi Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang disusun secara komprehensif, sistematis, dan adaptif terhadap



perkembangan zaman. Materi tersebut harus menekankan pada aspek penghayatan dan implementasi terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, serta disajikan dengan pendekatan kontekstual sehingga relevan dengan kondisi dan tantangan kebangsaan yang aktual.

Dengan implementasi strategi-strategi tersebut, diharapkan Nilai-nilai Kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dapat semakin kokoh untuk memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi disrupsi global.

4. Pusat Laboratorium

Sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki mandat strategis di bidang pendidikan, pengkajian, dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan, Lemhannas RI juga mengembangkan fungsi penting melalui Pusat Laboratorium yang melakukan Pengukuran Ketahanan Nasional dan Pengukuran Kepemimpinan Nasional serta sertifikasi profesi Ketahanan Nasional. Pusat laboratorium ini dibentuk untuk menyediakan perangkat pengukuran yang komprehensif, sistematis, dan terukur guna menilai kondisi ketahanan nasional serta kualitas kepemimpinan nasional. Kehadiran pusat laboratorium ini merupakan bentuk inovasi Lemhannas RI dalam merespons kebutuhan akan instrumen analitis yang dapat mendukung proses perumusan kebijakan negara secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Dalam lingkup pengukuran ketahanan nasional, pusat laboratorium bertugas mengembangkan indikator, metodologi, serta parameter yang mampu menggambarkan secara holistik aspek ketahanan bangsa, baik dalam dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pertahanan-keamanan. Hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional memberikan gambaran nyata mengenai tingkat ketangguhan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari lingkungan eksternal. Dengan demikian, hasil pengukuran ketahanan nasional dapat menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan nasional yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan berkelanjutan. Pada periode 2025-2029, hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional akan disampaikan sebanyak 4 kali dalam setahun.

Di sisi lain, pusat laboratorium juga memiliki fungsi strategis dalam melakukan pengukuran kepemimpinan nasional. Pengukuran ini mencakup evaluasi terhadap kualitas, kapasitas, dan efektivitas kepemimpinan nasional berdasarkan indikator yang dirumuskan secara akademik dan praktis. Dimensi yang diukur antara lain meliputi integritas, visi strategis, kemampuan manajerial, efektivitas komunikasi, hingga komitmen pada kepentingan bangsa dan negara. Dengan adanya pengukuran ini, diharapkan dapat tercipta tolok ukur yang jelas mengenai standar kepemimpinan nasional yang ideal, sekaligus memberikan masukan bagi Presiden dan kementerian/lembaga dalam memperkuat kepemimpinan bangsa di berbagai tingkatan.

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Lemhannas RI merupakan lembaga yang dibentuk oleh Lemhannas RI. LSP bertujuan untuk memastikan dan menjamin kompetensi para pengajar serta tenaga ahli di bidang Ketahanan Nasional memiliki standar profesional terukur dan diakui secara nasional. Keberadaan LSP ini memperkuat peran Lemhannas RI sebagai center of excellence dalam bidang Ketahanan Nasional, tidak hanya melalui pengajaran dan



pengkajian, tetapi juga melalui penjaminan mutu sumber daya manusia strategis yang terlibat dalam pembinaan ketahanan nasional bangsa.

Pusat Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional dan Pengukuran Kepemimpinan Nasional Lemhannas RI melaksanakan tugasnya dengan berlandaskan pada prinsip profesionalisme, independensi, integritas, serta akuntabilitas akademik. Pusat Laboratorium Lemhannas untuk melakukan simulasi ketahanan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (ilpengtek) sehingga pengukuran yang dihasilkan tidak hanya dimaksudkan sebagai laporan teknis, melainkan sebagai instrumen strategis yang dapat digunakan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, membangun ketahanan nasional yang tangguh, serta mengarahkan pembangunan kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa. Keberadaan pusat laboratorium ini memungkinkan pemerintah melakukan *early warning* dan *policy modeling* untuk merespons krisis multidimensi sesuai dengan konsep Astagatra secara cepat dan akurat.

Ancaman multidimensi yang dihadapi Indonesia memerlukan solusi komprehensif dan berbasis data yang kuat. Pusat Laboratorium akan menjadi tulang punggung kapabilitas analisis prediktif dan preskriptif Lemhannas RI, memungkinkan Indonesia untuk beralih dari pendekatan reaktif menjadi proaktif dalam menghadapi berbagai tantangan dalam rangka mendukung tercapainya visi Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, di tengah kompleksitas dinamika global yang semakin menuntut adanya kepemimpinan visioner dan ketahanan nasional yang tangguh.

Tabel 31

Target Kinerja Pusat Laboratorium Lemhannas RI 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Kualitas Pengukuran Ketahanan Nasional	1. Terlaksananya Diseminasi dan validasi data ke provinsi	38	38	38	38	38	Dokumen
	2. Terlaksananya pengembangan sistem pengukuran ketahanan nasional	1	1	1	1	1	Dokumen
	3. Tannas Award and Recommendation	1	1	1	1	1	Dokumen
Pengukuran Kompetensi Kepemimpinan Nasional yang sistematis	1. Persentase Jumlah Data Kompetensi Kepemimpinan Nasional yang terkumpul dan terolah terhadap keseluruhan jumlah peserta program pendidikan tiap angkatan	0	50	60	75	85	%



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
	2. Jumlah Rekomendasi Hasil Kompetensi Kepemimpinan Nasional	0	2	2	2	2	Dokumen
Hasil Pengukuran Kepemimpinan Nasional yang dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Ketahanan Nasional	1. Tersedianya instrumen pengukuran kepemimpinan nasional	0	0	0	1	1	Dokumen
	2. Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengukuran Kepemimpinan Nasional	0	0	0	0	1	Dokumen

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pusat Laboratorium akan melaksanakan sejumlah strategi utama. *Pertama*, modernisasi sistem pengukuran ketahanan nasional melalui penerapan *big data*, kecerdasan buatan (AI), dan algoritma prediktif untuk meningkatkan akurasi serta mendeteksi potensi kerawanan secara dini.

Kedua, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan lanjutan dalam analitik data, pemodelan strategis, dan teknologi siber agar mampu mengoperasikan sistem pengukuran modern.

Ketiga, diseminasi hasil pengukuran secara *real-time* melalui platform digital interaktif agar data ketahanan dapat segera dimanfaatkan oleh pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan.

Keempat, menyusun serta mengembangkan metodologi dan indikator pengukuran yang komprehensif, valid, dan reliabel, dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis nasional maupun global. Hal ini mencakup penyusunan parameter pengukuran ketahanan nasional yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan.

Dengan strategi ini, laboratorium tidak hanya berfungsi sebagai pusat riset teknis, tetapi juga sebagai *“early warning system”* nasional yang mendukung pengambilan kebijakan strategis untuk memperkuat ketahanan bangsa menghadapi kompleksitas geopolitik dan ancaman multidimensi.

Pengukuran Kepemimpinan nasional memiliki strategi mencakup konsolidasi dan fondasi data, validasi, pemanfaatan dan pengembangan serta integrasi kebijakan. *Pertama*, konsolidasi dan fondasi data melalui penyusunan instrumen pengukuran kepemimpinan nasional baik berbasis kompetensi, integritas, kapasitas, efektivitas dan visi strategis, serta pembangunan basis data pengukuran kepemimpinan nasional. *Kedua*, melakukan pengukuran kepemimpinan nasional serta melakukan validasi terhadap hasil pengukuran kepemimpinan nasional untuk menjamin hasil yang akuntabel, valid dan akurat. *Ketiga*, mendorong perluasan cakupan pemanfaatan hasil pengukuran kepemimpinan nasional serta melakukan evaluasi serta pengembangan



pengukuran kepemimpinan nasional. *Keempat*, Puslab sebagai *knowledge hub* perlu mengonsolidasikan data dan rekomendasi hasil pengukuran ke dalam kerangka kebijakan pembangunan sumber data manusia dan perencanaan nasional. *Kelima*, penguatan kompetensi SDM Pengukuran Kepemimpinan Nasional melalui Pelatihan Teknis dan Sertifikasi Kompetensi, Penguatan Konseptual dan Akademik, dan Kolaborasi dan Pembelajaran Lintas Lembaga (*Networked Learning*).

LSP Lemhannas RI menetapkan sejumlah strategi pengembangan yang terarah dan berkesinambungan yang mencakup sertifikasi kompetensi, *suveillance*, sertifikasi ulang, kaji ulang manajemen, anggaran hingga pelaporan. Berikut strategi LSP:

1. Menyusun dan mengembangkan minimal 6 skema sertifikasi kompetensi pengajar Ketahanan Nasional sesuai kebutuhan nasional serta memperbarui perangkat asesmen dan materi uji kompetensi secara berkala.
2. Melaksanakan audit internal, surveilance, serta pembaruan panduan mutu minimal satu kali setiap tahun berdasarkan perkembangan regulasi dan kebutuhan organisasi.
3. Meningkatkan jumlah tenaga pengajar tersertifikasi di bidang ketahanan nasional minimal 30 orang per tahun dengan sosialisasi skema dan penggalian peserta yang berkelanjutan.
4. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan master asesor secara terprogram, dengan target penambahan minimal 24 asesor kompetensi baru setiap tahun dan seluruh asesor serta TUK terakreditasi sesuai standar BNSP.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung proses sertifikasi pengajar Ketahanan Nasional serta mengembangkan sistem digitalisasi LSP untuk pendaftaran, asesmen, dan pelaporan hasil sertifikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dan aman.
6. Membangun dan memperkuat kemitraan strategis dengan Lemhannas, BNPT, TNI, Polri, perguruan tinggi nasional, serta stakeholder terkait lainnya demi peningkatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan sertifikasi profesi di bidang ketahanan nasional.
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan semua program kerja, serta melakukan penyesuaian berdasarkan capaian, hasil audit, dan analisis kebutuhan regulasi terbaru setiap tahun.

4.1.2. Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Lemhannas RI juga diarahkan pada percepatan transformasi birokrasi dan digitalisasi tata kelola kelembagaan. Melalui penerapan sistem manajemen berbasis teknologi informasi, proses administrasi, keuangan, dan layanan kelembagaan dilakukan secara lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel. Penguatan infrastruktur digital, pemanfaatan aplikasi terintegrasi, dan pengembangan sistem informasi manajemen menjadi langkah strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dengan demikian, Lemhannas RI tidak hanya mampu meningkatkan kualitas pelayanan internal, tetapi juga memperkuat kredibilitas kelembagaan di mata publik melalui tata kelola yang modern dan adaptif.

Lebih jauh, transformasi birokrasi dalam program dukungan manajemen ini diwujudkan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penerapan budaya kerja yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Upaya tersebut sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang menuntut lembaga negara untuk



lebih responsif terhadap perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan landasan tersebut, dukungan manajemen Lemhannas RI diharapkan dapat memperkuat efektivitas pelaksanaan program pendidikan, pengkajian, dan pemantapan nilai kebangsaan, sekaligus memastikan keberlanjutan peran Lemhannas RI sebagai institusi strategis dalam menjaga ketahanan nasional.

Tabel 32

Sasaran dan Indikator Program Dukungan Manajemen Lemhannas RI 2025-2029

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Manajemen Lemhannas RI yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien.	Indeks Reformasi Birokrasi General	73	74	75	76	77	Nilai

1. Koordinasi Perumusan Renstra dan Renja, Penataan Organisasi dan Tata Laksana , Monitoring dan Evaluasi, serta Fasilitasi Reformasi Birokrasi

Biro Perencanaan memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini mencakup koordinasi perencanaan strategis, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, termasuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan pengelolaan keuangan. Hal ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP dan RB di lingkungan Lemhannas RI, yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pengelolaan yang akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, prioritas akan diberikan pada beberapa hal. Pertama, pemantapan *Integrated Bottom Up Planning (Money Follows the Function)* melalui *E-Planning* yang menjembatani proses perencanaan tahunan dengan perencanaan strategis organisasi, sistem informasi perencanaan penganggaran (SIPP), dan *E-Performance*. Kedua, peningkatan mutu monitoring dan evaluasi.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa setiap aspek perencanaan dan pelaporan berjalan dengan efektif dan transparan, sehingga tujuan strategis organisasi dapat tercapai dengan baik. Implementasi yang tepat akan memberikan dampak positif terhadap keseluruhan kinerja dan akuntabilitas di lingkungan Lemhannas RI.

Kegiatan penataan organisasi dan tata laksana memiliki peran penting dalam pelaksanaan tiga program reformasi birokrasi. Program ketiga adalah penataan dan penguatan organisasi, yang bertujuan untuk memperkuat struktur dan fungsi organisasi agar lebih efisien dan efektif. Program keempat adalah penataan tata laksana, yang mengoptimalkan prosedur dan proses kerja untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.

Keempat program tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi Lemhannas RI. Dengan peraturan perundang-undangan yang tertata dengan baik, organisasi yang kuat, dan tata laksana yang efektif, Lemhannas RI dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel. Implementasi



yang sukses dari keempat program ini akan menciptakan birokrasi yang responsif dan profesional, yang pada gilirannya mendukung pencapaian tujuan strategis Lemhannas RI dalam berbagai aspek, termasuk peningkatan kualitas layanan publik dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Tabel 33

Target Kinerja Biro Perencanaan Lemhannas RI 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Mewujudkan Layanan Perencanaan Lemhannas RI yang Efektif, Efisien, Profesional, dan Handal	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)	90	90,5	91	91,5	92	Nilai
	Percentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	90	91	92	93	94	%
	Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	91	92	93	94	Nilai
	Percentase Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi RB	85	90	95	98	100	%
	Nilai SAKIP	65	67	69	71	74	Nilai

2. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan

Biro Hubungan Masyarakat memiliki fungsi strategis dalam mengelola komunikasi publik serta koordinasi dukungan pimpinan, yang berperan penting dalam memperkuat posisi strategis dan citra internal maupun eksternal Lemhannas RI. Penguatan ini merupakan prasyarat utama bagi optimalisasi pelaksanaan tugas Lemhannas RI dalam bidang ketahanan nasional.

Pelaksanaan program dan kegiatan strategis ketahanan nasional memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk media dan masyarakat. Dalam proses tersebut, perlu dipastikan bahwa kebijakan, program/kegiatan, serta kinerja Lemhannas RI tersampaikan secara terbuka kepada publik. Dukungan masyarakat akan meningkat apabila kehadiran Lemhannas RI dirasakan memberikan manfaat nyata, khususnya melalui penyampaian informasi yang transparan.

Sehubungan dengan hal tersebut, setiap upaya Lemhannas RI dalam mewujudkan dan menjaga ketahanan nasional perlu disampaikan secara terbuka kepada publik. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu ketahanan nasional harus menjadi bagian integral dari strategi komunikasi kelembagaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) mengenai ketahanan nasional harus dilaksanakan secara transparan, berkelanjutan, dan efektif. Pengelolaan hubungan masyarakat yang baik, didukung oleh koordinasi strategis dari pimpinan, akan memastikan bahwa informasi penting tersampaikan secara tepat, akurat, dan mudah dipahami oleh masyarakat.



Dengan demikian, Lemhannas RI dapat memperkuat dukungan publik serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional secara berkelanjutan.

Tabel 34

Target Kinerja Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Meningkatnya Kualitas Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Protokol, Peliputan, dan Perpustakaan	Nilai monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh KIP	95,1	95,15	95,2	95,25	95,3	Nilai
	Persentase Pengaduan Layanan Publik melalui SP4N-LAPOR yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	%
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Biro Humas	3,30	3,35	3,40	3,45	3,50	Nilai

3. Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Lemhannas RI

Biro Umum memiliki peran penting dalam pengelolaan SDM di Lemhannas RI yang memiliki latar belakang beragam, terdiri dari ASN, TNI, dan Polri. Sistem manajemen SDM mengacu pada sistem merit, yaitu pengelolaan yang berbasis pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan tanpa diskriminasi.

Penerapan sistem merit ini perlu disesuaikan dengan komposisi pegawai yang beragam. Keterpaduan antar instansi menjadi kunci agar kebijakan SDM dapat berjalan selaras tanpa mengesampingkan aturan masing-masing lembaga. Selain itu, setiap keputusan manajerial perlu mempertimbangkan urgensi kepentingan organisasi, terutama dalam hal penempatan dan pengembangan pegawai.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, manajemen pegawai mengalami berbagai perubahan penting. Hal ini menjadi momentum untuk menyempurnakan sistem pengelolaan SDM di Lemhannas RI agar lebih adaptif, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan strategis lembaga.

Pengembangan kompetensi SDM Aparatur di Lemhannas RI dilakukan melalui tiga kegiatan utama:

- Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan *coaching*, *mentoring*, dan *counselling* (CMC) oleh atasan langsung atau oleh *coach*, mentor, atau konselor profesional yang ditunjuk.



- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, magang, *on the job training* (OJT), bimbingan teknis, *workshop*, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi seperti *e-learning*, *teleconference*, *zoom-meeting*, dan teknologi lainnya.
- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri.

Dengan strategi ini, Lemhannas RI dapat memastikan bahwa SDM aparatur memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mencapai visi dan misinya secara efektif dan efisien.

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan faktor penentu keberhasilan Lemhannas RI dalam mencapai visi dan misinya. Mengingat visi dan misi Lemhannas RI serta tuntutan tinggi dari berbagai pemangku kepentingan, pengelolaan SDM pada tahun 2025-2029 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas yang dibutuhkan.

Strategi SDM dalam menghadapi tantangan ini adalah membangun, menyempurnakan, dan mengimplementasikan sistem, program, dan kebijakan SDM yang efisien, efektif, dan terintegrasi. Langkah ini mencakup rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan kinerja, hingga manajemen karir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Lemhannas RI secara menyeluruh. Mengingat kebutuhan organisasi serta sumber daya yang tersedia, Biro Umum yang menangani SDM akan memprioritaskan pembangunan, penyempurnaan, dan implementasi sistem, program, serta kebijakan SDM yang diperlukan. Biro Umum juga akan memfokuskan pada penguatan teknologi pendukung untuk menciptakan pengelolaan SDM yang efisien dan efektif di Lemhannas RI.

Selain SDM, sarana dan prasarana juga merupakan faktor pendukung yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel, mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, hingga pemeliharaan dan ada kemungkinan melakukan rehabilitasi atau pembangunan Gedung di Lemhannas. Dengan demikian, pengelolaan yang baik terhadap SDM serta sarana dan prasarana akan memastikan Lemhannas RI dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, menjawab tuntutan pemangku kepentingan, dan mencapai visi serta misinya dengan sukses.

Tabel 35
Target Kinerja Biro Umum Lemhannas RI 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Mewujudkan Layanan Manajemen Internal Lemhannas RI yang Efektif, Efisien, Profesional, dan Handal	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,25	3,35	3,4	3,45	3,5	Nilai
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	81	81,5	82	82,5	83	Nilai
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal	73	73,5	74	74,5	75	Nilai
	Indeks NSPK	72,5	73	73,5	74	75	Nilai
	Indeks Kepuasan terhadap layanan Biro Umum	3	3,05	3,1	3,15	3,25	Nilai



4. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sangat penting dalam mendukung kinerja Lemhannas RI untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Pengelolaan TIK, data, dan informasi tentang ketahanan nasional bertujuan untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas, dan kewenangan pengambilan keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya TI yang tersedia, baik infrastruktur maupun sistem informasi.

Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan proses bisnis Lemhannas RI, diperlukan tata kelola yang baik dalam pengelolaan teknologi informasi, data, dan informasi. Good governance dalam pengelolaan TIK akan memastikan bahwa setiap aspek teknologi dan informasi di Lemhannas RI digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan strategis, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung ketahanan nasional. Dengan demikian, implementasi TIK yang efektif dan terintegrasi akan memperkuat kapasitas Lemhannas RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.

Pengelolaan TIK ini sejalan dengan upaya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Arsitektur Dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lemhannas RI. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berperan penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SPBE 2025–2029 sebagai landasan integrasi dan arah pengembangan sistem pemerintahan digital yang terkoordinasi, efisien, serta berorientasi pada layanan publik. Arsitektur SPBE berfungsi sebagai kerangka dasar yang menyelaraskan berbagai komponen seperti proses bisnis, data dan informasi, aplikasi, infrastruktur, keamanan, serta layanan SPBE agar tidak berkembang secara terpisah (silo) dan dapat saling berinteroperasi. Dalam konteks Renstra, arsitektur ini menjadi pedoman dalam penyusunan peta rencana (roadmap) implementasi SPBE selama lima tahun ke depan, sekaligus membantu penetapan prioritas program dan investasi TIK agar lebih tepat sasaran. Melalui arsitektur SPBE, instansi pemerintah dapat menghindari duplikasi aplikasi atau infrastruktur, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memastikan setiap sistem yang dikembangkan mendukung integrasi data dan layanan lintas unit kerja.

Selain itu, arsitektur SPBE juga berfungsi memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan keamanan sistem informasi pemerintahan. Dengan adanya standar dan prinsip arsitektur yang diterapkan dalam Renstra, pelaksanaan SPBE dapat terukur melalui indikator kinerja seperti tingkat interoperabilitas, kepatuhan terhadap arsitektur, atau jumlah layanan digital terintegrasi. Arsitektur SPBE juga mendukung penerapan prinsip keamanan dan perlindungan data secara menyeluruh agar transformasi digital tetap aman dan andal. Di sisi lain, fungsi arsitektur ini memastikan bahwa pembangunan SPBE sejalan dengan arah kebijakan nasional, seperti kebijakan Satu Data Indonesia, transformasi digital pemerintahan, dan prioritas pembangunan nasional. Dengan demikian, arsitektur SPBE menjadi instrumen strategis dalam Renstra 2025–2029 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang terpadu, efisien, aman, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan peningkatan kualitas layanan publik.



Tabel 36
Target Kinerja Biro Telematika Lemhannas RI 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Layanan Telematika Lemhannas RI yang Efektif, Efisien, Profesional, dan Handal	Indeks Pemerintah Digital	3,3	3,5	3,7	3,9	4,3	Nilai
	Indeks Kematangan Keamanan Siber	3	3,2	3,4	3,6	3,8	Nilai
	Indeks Performa Pelayanan Bidang Sistem Informatika	80	85	90	95	100	Nilai
	Indeks Presentasi Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	80	81	82	83	84	Nilai

5. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan serta Kerja Sama Lemhannas RI

Penataan peraturan perundang-undangan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan seluruh regulasi yang ada tetap harmonis, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan hukum, sosial, serta kebutuhan institusi, karena efektivitas tata kelola regulasi yang baik akan menjadi landasan penting bagi Lemhannas RI dalam menjalin dan mengelola kerja sama strategis lintas sektor dan lintas negara. Dalam kerangka tersebut, penguatan efektivitas kerja sama Lemhannas RI menjadi faktor krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusional Lemhannas RI. Untuk itu, jejaring kerja sama Lemhannas RI terus diperluas dan diperkuat melalui koordinasi yang terintegrasi dengan berbagai instansi pemerintah (kementerian/lembaga) serta lembaga non-pemerintah, yang mencakup lembaga pendidikan dan riset, asosiasi profesi, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dunia usaha, dan dunia industri, guna mendukung terwujudnya sinergi nasional dalam membangun kepemimpinan dan ketahanan bangsa.

Lemhannas RI melaksanakan koordinasi dan fasilitasi hubungan dalam negeri di bidang ketahanan nasional serta berperan aktif dalam jejaring nasional dan internasional melalui berbagai forum kerja sama. Kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan ini memperkuat peran Lemhannas RI sebagai pusat pendidikan kepemimpinan dan kajian strategik, sekaligus penghubung antar-lembaga dalam memperkuat sinergi ketahanan nasional. Selain itu, pengelolaan alumni sebagai mitra strategis (*strategic partner*) menjadi sarana penting dalam memperluas dan merawat jejaring kepemimpinan nasional. Melalui pembinaan dan tracer study, Lemhannas RI memetakan kiprah serta potensi kolaborasi alumni sehingga pengelolaan alumni berfungsi sebagai mekanisme penguatan ekosistem kepemimpinan nasional yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika strategis.



Tabel 37
Target Kinerja Biro Kerja Sama dan Hukum Lemhannas RI 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Mewujudkan Pengelolaan Hubungan Kerja Sama dalam negeri dan luar negeri dan Penataan Regulasi dan Produk Hukum	Presentase MoU yang ditindaklanjuti menjadi PKS atau kegiatan bersama lainnya	70	70	70	75	75	%
	Indeks Reformasi Hukum	64	70	74	77	80	Nilai

6. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan publik. Sebagai pengawas intern pemerintah, APIP merupakan elemen penting dalam manajemen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, birokrasi yang mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar serta kode etik aparatur negara adalah tujuannya.

Dengan pengawasan yang efektif, APIP dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Hal ini mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan terpercaya, meningkatkan kepercayaan publik, dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut, diperlukan peran APIP yang efektif sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2008, yaitu dalam wujud:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Lemhannas RI (*assurance activities*);
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lemhannas RI (*anticorruption activities*); serta
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Lemhannas RI (*consulting activities*).

Peran APIP yang efektif mampu memastikan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi Lemhannas RI dalam mencapai tujuannya, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).



Tabel 38
Target Kinerja Inspektorat Lemhannas RI 2025-2029

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA					SATUAN
		2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Pengawasan yang Akuntabel, Efektif, Efisien serta Berorientasi pada pelayanan publik	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini
	Tingkat Internal Audit Capability Model (IACM)	2,7	2,8	2,9	3	3,1	Nilai
	Kapabilitas APIP						
	Level Maturitas SPIP	3,3	3,35	3,4	3,45	3,5	Nilai
Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif	Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif	100	100	100	100	100	%

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan Lemhannas RI dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan dan prasarana yang memadai, regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Kerangka Pendanaan menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Tujuan, Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang bersumber dari APBN yang bersumber dari Rupiah Murni dan selanjutnya akan diupayakan juga bersumber dari PNBP.

Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Lemhannas RI tahun 2025-2029 disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju. Konsep Kerangka Pendanaan Lemhannas RI dapat dilihat pada tabel 39 berikut ini:

Tabel 39
Kerangka Pendanaan Lemhannas RI 2025-2029 (dalam ribu rupiah)

UNIT KERJA	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	187.075.846	428.117.991	460.179.235	487.333.909	523.464.223
PROGRAM PEMBINAAN KETAHANAN NASIONAL	44.902.066	199.192.402	220.886.522	242.612.450	276.935.296
Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional	28.301.661	105.302.300	116.477.570	128.125.327	140.937.860



UNIT KERJA	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
3190 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional	15.808.446	61.479.440	67.627.384	74.390.122	81.829.135
3191 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Pimpinan Nasional	11.576.035	43.550.720	47.905.792	52.696.371	57.966.008
3192 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pendidikan Bidang Program Pendidikan	917.180	272.140	944.394	1.038.833	1.142.717
Kedeputian Pengkajian Strategik	5.623.532	57.469.913	62.059.787	68.265.766	75.093.345
3199 Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Ideologi dan Politik	850.000	13.008.831	11.647.714	12.812.486	14.094.734
3200 Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam	1.925.172	10.519.229	14.233.151	12.728.266	14.001.093
3201 Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Sosial Budaya dan Demografi	850.000	11.571.151	11.571.151	15.656.466	14.001.093
3202 Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan dan Geografi	850.000	10.519.229	11.571.151	12.728.266	17.222.113
3203 Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Pengkajian Strategik	1.148.360	11.851.473	13.036.620	14.340.282	15.774.312
Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	8.969.846	32.481.544	37.602.251	40.765.847	54.976.629
3194 Penyusunan Rencana dan Program Deputi Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	667.009	1.987.000	1.857.000	2.037.000	2.687.000



UNIT KERJA	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
3195 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	2.989.140	10.054.505	12.670.438	14.649.310	29.047.091
3197 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Nilai-nilai Kebangsaan	4.113.697	13.700.684	16.249.994	17.183.511	16.054.286
3198 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1.200.000	6.739.355	6.824.819	6.896.026	7.188.252
Pusat Laboratorium	2.007.027	3.938.645	4.746.914	5.455.510	5.927.463
6381 Pengukuran Ketahanan Nasional dan Kepemimpinan Tingkat Nasional	2.007.027	3.938.645	4.746.914	5.455.510	5.927.463
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	142.173.780	228.925.589	239.292.714	244.721.458	246.528.927
3183 Pengelolaan Hubungan Masyarakat	1.483.100	2.347.494	2.575.113	2.796.065	3.280.118
3184 Pengelolaan Hubungan Kerja Sama dan Hukum	1.856.764	2.485.743	2.783.571	3.070.506	3.365.926
3185 Pengelolaan Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana	2.203.808	3.811.810	4.218.843	4.478.964	4.858.960
3186 Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi	255.731	18.000.000	22.250.000	26.300.000	26.800.000
3187 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Lemhannas	134.900.874	200.216.542	205.229.187	205.667.923	205.643.923
3189 Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Lemhannas	1.473.503	2.064.000	2.236.000	2.408.000	2.580.000



BAB V

PENUTUP





Bab V

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Lemhannas RI 2025-2029 menggambarkan komitmen Lemhannas RI dalam melaksanakan kebijakan pemerintah serta penugasan dari Presiden Republik Indonesia. Dokumen ini tidak hanya mencakup upaya untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, tetapi juga meliputi berbagai tugas dan fungsi lainnya yang menjadi tanggung jawab Lemhannas RI.

Selama periode pelaksanaan Renstra, Lemhannas RI dihadapkan pada dinamika kebijakan yang mungkin mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, dalam hal terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau adanya penugasan baru dari Presiden, Lemhannas RI memiliki kewenangan untuk mengusulkan perubahan terhadap Renstra Lemhannas RI 2025-2029. Proses pengusulan perubahan ini dilakukan secara terencana dan terukur untuk memastikan bahwa setiap penyesuaian yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan strategis dan operasional yang baru.

Untuk menjaga kualitas dan relevansi dokumen perencanaan, dengan asistensi dari Bappenas, Lemhannas RI akan berperan aktif dalam memastikan proses perubahan Renstra Lemhannas RI 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Langkah ini diambil untuk menjamin bahwa setiap perubahan yang dilakukan tetap sejalan dengan tujuan utama pembangunan nasional dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Evaluasi berkala dan pengawasan yang ketat juga menjadi bagian integral dalam proses ini. Bappenas dan Lemhannas RI akan terus melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait perubahan atau penyesuaian Renstra, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas.

Dengan dokumen Renstra ini, Lemhannas RI menegaskan kembali komitmennya untuk mendukung penuh tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dengan semangat kerja sama dan inovasi yang terus menerus, Lemhannas RI bertekad untuk menjadi lembaga yang mampu mencetak pemimpin-pemimpin nasional yang berkualitas, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan. Upaya ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas, baik dari segi infrastruktur, sumber daya manusia, maupun metode pengajaran dan penelitian yang digunakan.

Sebagai lembaga strategis, Lemhannas RI menyadari pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, kemampuan adaptasi dan responsif terhadap perubahan kebijakan menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra ini. Dengan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan, Lemhannas RI optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun ketahanan nasional dan mencapai visi Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan makmur.



Dokumen Renstra Lemhannas RI 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program strategis Lemhannas RI, serta menjadi acuan dalam meningkatkan peran dan kontribusi Lemhannas RI dalam mendukung kebijakan pemerintah dan penugasan Presiden. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI, tetapi juga mencerminkan visi-misi Lemhannas RI dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.





LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

	Terwujudnya kegiatan perencanaan dan pengembangan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan		15	23	26	29	32					
Kegiatan 5: 3195 - Penyusunan Rencana dan Pembinaan serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan								2.989.140	10.054.505	12.670.438	14.649.310	29.047.091
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana dan Pembinaan serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan	Pusat											
		200	800	1000	1200	1952						
Kegiatan 6: 3197 - Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan								4.113.697	13.700.684	16.249.994	17.183.511	16.054.286
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pelatihan untuk Pelatih/Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	Pusat											
		300	800	850	850	1000						
Kegiatan 7: 3198 Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan								1.200.000	6.739.355	6.824.819	6.896.026	7.188.252
Meningkatnya Kualitas Rencana dan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Pusat											
		1000	4500	4600	4700	4800						
Kegiatan 8: 3199 - Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Ideologi dan Politik								850.000	13.008.831	11.647.714	12.812.486	14.094.734
Meningkatnya Kualitas Kajian Strategis Ketahanan Nasional Bidang Ideologi dan Politik	Pusat											
		86	87	88	89	90						
Kegiatan 9: 3200 - Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam (SKA)								1.925.172	10.519.229	14.233.151	12.728.266	14.001.093
Meningkatnya Kualitas Kajian Strategis Ketahanan Nasional Bidang Ekonomi dan Sumber Kekayaan Alam	Pusat											
		86	87	88	89	90						
Kegiatan 10: 3201 - Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Sosial Budaya dan Demografi								850.000	11.571.151	11.571.151	15.656.466	14.001.093
Meningkatnya Kualitas Kajian Strategis Ketahanan Nasional Bidang Sosial Budaya dan Demografi	Pusat											
		86	87	88	89	90						
Kegiatan 11: 3202 - Penyusunan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan dan Geografi								850.000	10.519.229	11.571.151	12.728.266	17.222.113
Terlaksananya pengkajian strategis bidang pertahanan keamanan dan geografi	Pusat											
		86	87	88	89	90						

Kegiatan 12: 3203 - Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Pengkajian Strategis								1.148.360	11.851.473	13.036.620	14.340.282	15.774.312	
	Meningkatnya Indeks Perencanaan Kajian	Pusat											
	Indeks Perencanaan Kajian		86	87	88	89	90						
Kegiatan 13: 6381 - Pengukuran Ketahanan Nasional dan Kepemimpinan Nasional								2.007.027	3.938.645	4.746.914	5.455.510	5.927.463	
Meningkatnya Kualitas Pengukuran Ketahanan Nasional Terlaksananya Diseminasi dan validasi data ke provinsi Terlaksananya pengembangan sistem pengukuran ketahanan nasional Tannas Award and Recommendation Pengukuran Kompetensi Kepemimpinan Nasional yang sistematis Persentase Jumlah Data Kompetensi Kepemimpinan Nasional yang terkumpul dan terolah terhadap keseluruhan jumlah peserta program pendidikan tiap angkatan Jumlah Rekomendasi Hasil Kompetensi Kepemimpinan Nasional Hasil Pengukuran Kepemimpinan Nasional yang dimanfaatkan dalam Perbaikan Perencanaan Ketahanan Nasional Tersedianya instrumen pengukuran kepemimpinan nasional Tersedianya Rekomendasi Hasil Pengukuran Kepemimpinan Nasional.	Pusat												Pusat Laboratorium
			38	38	38	38	38						
			1	1	1	1	1						
			1	1	1	1	1						
	Pusat												
			0%	50%	60%	75%	85%						
			0	1	1	2	2						
	Pusat												
			0	0	0	1	1						
			0	0	0	0	1						
Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Lemhannas RI yang Profesional, Efektif dan Efisien													
	Indeks Reformasi Birokrasi		75	76	77	78	79						
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								142.173.780	228.925.589	239.292.714	244.721.458	246.528.927	
Sasaran Program: Terwujudnya Manajemen Lemhannas RI yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien Indeks Reformasi Birokrasi General													
			73	74	75	76	77						
Kegiatan 1: 3183 - Pengelolaan Hubungan Masyarakat Lemhannas								1.483.100	2.347.494	2.575.113	2.796.065	3.280.118	Biro Hubungan Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, Protokol, Peliputan, dan Perpustakaan Nilai monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh KIP Persentase Pengaduan Layanan Publik melalui SP4N-LAPOR yang ditindaklanjuti	Pusat												
			95,1	95,15	95,2	95,25	95,3						
			100%	100%	100%	100%	100%						

	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Biro Humas		3,30	3,35	3,40	3,45	3,50						
Kegiatan 2: 3184 - Pengelolaan Hubungan Kerja Sama dan Hukum								1.856.764	2.485.743	2.783.571	3.070.506	3.365.926	
	Mewujudkan Pengelolaan Hubungan Kerja Sama dalam negeri dan luar negeri dan Penataan Regulasi dan Produk Hukum	Pusat											Biro Kerja Sama dan Hukum
	Presentase MoU yang ditindaklanjuti menjadi PKS atau kegiatan bersama lainnya		70%	70%	70%	75%	75%						
	Indeks Reformasi Hukum		70%	70%	75%	75%	80%						
Kegiatan 3: 3185 - Pengelolaan Perencanaan dan Organisasi Tata Laksana								2.203.808	3.811.810	4.218.843	4.478.964	4.858.960	
	Mewujudkan Layanan Perencanaan Lemhannas RI yang Efektif, Efisien, Profesional, dan Handal	Pusat											Biro Perencanaan
	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN)		90	90,5	91	91,5	92						
	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi		90%	91%	92%	93%	94%						
	Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		90	91	92	93	94						
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi RB		85%	90%	95%	98%	100%						
	Nilai SAKIP		65	67	69	71	74						
Kegiatan 4: 3186 - Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lemhannas								255.731	18.000.000	22.250.000	26.300.000	26.800.000	
	Layanan Telematika Lemhannas RI yang Efektif, Efisien, Profesional, dan Handal	Pusat											Biro Telematika
	Indeks Pemerintah Digital		3,3	3,5	3,7	3,9	4,3						
	Indeks Kematangan Keamanan Siber		3	3,2	3,4	3,6	3,8						
	Indeks Performa Pelayanan Bidang Sistem Informatika		80	85	90	95	100						
	Indeks Presentasi Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		80	81	82	83	84						
Kegiatan 5: 3187 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas Lemhannas								134.900.874	200.216.542	205.229.187	205.667.923	205.643.923	
	Mewujudkan Layanan Manajemen Internal Lemhannas RI yang Efektif, Efisien, Profesional, dan Handal	Pusat											Biro Umum
	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)		3,25	3,35	3,4	3,45	3,5						
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)		81	81,5	82	82,5	83						
	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Internal		73	73,5	74	74,5	75						
	Indeks NSPK		72,5	73	73,5	74	75						
	Indeks Kepuasan terhadap layanan Biro Umum		3	3,05	3,1	3,15	3,25						
Kegiatan 6: 3189 - Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kelembagaan Lemhannas RI								1.473.503	2.064.000	2.236.000	2.408.000	2.580.000	

Terwujudnya Pengawasan yang Akuntabel, Efektif, Efisien serta Berorientasi pada pelayanan publik	Pusat								Inspektorat	
		Opini BPK								
		Tingkat Internal Audit Capability Model (IACM) Kapabilitas APIP								
		Level Maturitas SPIP								
		Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif								

LAMPIRAN 2

Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Lembaga Ketahanan Nasional

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam ribu rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Prioritas: Pelaksanaan Gerakan Nasional Kita Bersaudara	-	-	-	-	-	-	4.189.140	16.793.860	19.495.257	21.545.336	36.235.343	-	-	-	-	-	4.189.140	16.793.860	19.495.257	21.545.336	36.235.343
Proyek Prioritas 1: Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi Penyelenggara Negara dan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	4.189.140	16.793.860	19.495.257	21.545.336	36.235.343	-	-	-	-	-	4.189.140	16.793.860	19.495.257	21.545.336	36.235.343
Rincian Output: Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	Jumlah Rencana dan Pembinaan serta Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan	200 Orang	800 Orang	1000 Orang	1200 Orang	1952 Orang	2.989.140	10.054.505	12.670.438	14.649.310	29.047.091	-	-	-	-	-	2.989.140	10.054.505	12.670.438	14.649.310	29.047.091
Rincian Output: Dialog Wawasan Kebangsaan	Jumlah Rencana dan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	1000 Orang	4500 Orang	4600 Orang	4700 Orang	4800 Orang	1.200.000	6.739.355	6.824.819	6.896.026	7.188.252	-	-	-	-	-	1.200.000	6.739.355	6.824.819	6.896.026	7.188.252
Kegiatan Prioritas: Peningkatan Kualitas Pemimpin Di Tingkat Pusat Hingga Daerah	Performa pimpinan tingkat pusat dan daerah dalam membina ketahanan nasional	85,34-89,87	85,88-90,41	86,43-90,97	86,99-91,52	87,55-92,08	19.922.143	75.180.124	83.877.378	91.573.633	97.883.421	-	-	-	-	-	19.922.143	75.180.124	83.877.378	91.573.633	97.883.421
Proyek Prioritas 1: Penyelenggaraan Pendidikan Pengkaderan Pemimpin di Tingkat Pusat Hingga Tingkat Daerah	-	-	-	-	-	-	15.808.446	61.479.440	67.627.384	74.390.122	81.829.135	-	-	-	-	-	15.808.446	61.479.440	67.627.384	74.390.122	81.829.135
Rincian Output: Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional	Jumlah Lulusan P4N	220 Orang	15.808.446	61.479.440	67.627.384	74.390.122	81.829.135	-	-	-	-	-	15.808.446	61.479.440	67.627.384	74.390.122	81.829.135				
Proyek Prioritas 2: Penyelenggaraan Training of Trainers Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	-	-	-	-	-	-	4.113.697	13.700.684	16.249.994	17.183.511	16.054.286	-	-	-	-	-	4.113.697	13.700.684	16.249.994	17.183.511	16.054.286
Rincian Output: Training of Trainers (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	Jumlah Rencana dan Pelaksanaan Pelatihan Untuk Pelatih/Training of Trainer (ToT) Nilai-Nilai Kebangsaan	300 Orang	800 Orang	850 Orang	850 Orang	1000 Orang	4.113.697	13.700.684	16.249.994	17.183.511	16.054.286	-	-	-	-	-	4.113.697	13.700.684	16.249.994	17.183.511	16.054.286

LAMPIRAN 3
Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Pengaturan tentang Ketahanan Nasional	Bertujuan menjadikan Ketahanan Nasional sebagai Kebijakan Nasional, memberikan landasan hukum yang kuat dalam pembangunan nasional, memungkinkan pelaksanaan program dan kebijakan strategis untuk meningkatkan ketahanan nasional sehingga dapat lebih efektif dalam mengkoordinasikan dan mengimplementasikan upaya ketahanan nasional, memastikan stabilitas dan keamanan negara dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar negeri.	Lembaga Ketahanan Nasional	Seluruh Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah	2029
2	Pengaturan tentang Struktur Organisasi	Berdasarkan kajian evaluasi kelembagaan, terdapat tugas dan fungsi Lemhannas yang masih belum terakomodasi pada regulasi yang ada	Biro Perencanaan	Biro Kerja Sama dan Hukum, Biro Umum	2026
3	Pengaturan koordinasi penyusunan anggaran di Internal Lemhannas	Perlunya bisnis proses yang jelas dan tegas lewat SOP yang diatur dalam Pergub/Kepgub untuk penguatan dan sinergi Biro Perencanaan dan Inspektorat dalam pengendalian penyusunan perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien pada unit-unit kerja di Lemhannas secara terintegratif.	Biro Perencanaan	Biro Kerja Sama dan Hukum, Biro Umum dan Inspektorat	2026
4	Pengaturan tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lemhannas	SDM di Lemhannas RI yang terdiri dari ASN, TNI, dan Polri perlu diatur dengan jelas berkaitan dengan Kedudukan, Tunjangan, Fasilitas, Pembinaan dan Pelatihan.	Biro Umum	Biro Kerja Sama dan Hukum	2026
5	Pengaturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Pengaturan anggaran pada DIPA Lemhannas yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Biro Perencanaan	Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Pusat Laboratorium, Biro Kerja Sama dan Hukum, Biro Umum dan Inspektorat	2026
6	Pengaturan yang berkaitan dengan Kinerja di lingkungan Lemhannas mulai dari <i>Impact, Outcome</i> dan <i>Output</i>	Perlu disusun Standar Prosedur masing-masing Unit Kerja di lingkungan Lemhannas agar seluruh kegiatan menghasilkan <i>Output, Outcome</i> dan <i>Impact</i> yang jelas dan terukur sesuai prinsip SMART	Biro Perencanaan	Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Pengkajian Strategik, Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, Pusat Laboratorium, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Kerja Sama dan Hukum, Biro Telematika, Biro Umum dan Inspektorat	2026